



Kementerian Sosial RI

Vol 19 No 3 Desember 2020
ISSN 1412 - 6451
E-ISSN 2528 - 0430

Jurnal

Penelitian Kesejahteraan Sosial

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial

VOL 19 No 3 Desember 2020 : 207 - 306

Kinerja Pendamping sebagai Ujung Tombak Keberhasilan Program Keluarga Harapan
The performance of the Assistant as the Success Key of the Family Hope Program
(Elly Kuntjorowati)

Studi Eksplorasi : Analisis Faktor Pendorong Ibu dari Keluarga Penerima Manfaat Bantuan
Program Keluarga Harapan dalam Mencapai Graduasi Mandiri
*Exploration Study: Analysis of Supporting Factors of Mothers from Beneficiary Families of the
Hope Family Program in Achieving Independent Graduation*
(Ikhwaniul Ihsan Armalid)

Perbandingan Kebahagiaan Berdasarkan pada Perbedaan Gender dan Status Pernikahan
The Comparison of Happiness Based on Gender Differences and Marital Status
(Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, Imammul Insan, Efan Yudha Winata, Dimas Teguh Prasetyo,
Pratiwi Sakti, dan Fitra Hasri Rosandi)

Pemberdayaan Gepeng melalui Program Desaku Menanti
Empowerment of Homeless Beggars Through Desaku Menanti Program
(Ikawati dan Sri Yuni Murtiwiidayanti)

Mekanisme Survival Warga Miskin Perkotaan Akibat Dampak Pandemi Covid-19
The Mechanism of Survival of the Urban Poor Due to the Impact of Covid-19 Pandemic
(Soetji Andari)

Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial:
Studi Kasus pada Perpustakaan Umum Kabupaten Magelang
*Community Empowerment Activity in Realizing Social Inclusion-Based Library Services: Case
Study at the Public Library of Magelang Regency*
(Reza Mahdi dan Andi Asari)

Faktor-Faktor Keberhasilan Keluarga Penerima Manfaat untuk Mencapai Graduasi
dari Program Keluarga Harapan
*Success Factors for Beneficiary Families to Achieve Graduation
from the Hope Family Program (PKH)*
(Risna Kusumaningrum, Fentiny Nugroho, dan Alfrojems)

Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah, Indonesia
Implementation of Poverty Alleviation Programs in Central Java, Indonesia
(Mursid Zuhri dan Arif Sofianto)

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan
Pelayanan Kesejahteraan Sosial
(B2P3KS)

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial	VOL 19	No 3	Hal 207 - 306	Yogyakarta Desember 2020	ISSN 1412-6451 E-ISSN 2528-0430
---	-----------	---------	------------------	-----------------------------	------------------------------------

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial
Terakreditasi SINTA Peringkat 3 No : 21/E/KPT/2018
Volume 19 No 3 Desember 2020 ISSN 1412-6451, E-ISSN 2528-0430

Terbit tiga kali setahun pada bulan April, Agustus, dan Desember

diterbitkan

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan
Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta
(SK Kuasa Pengguna Anggaran B2P3KS Yogyakarta Nomor: 11 Tahun 2020)
Keputusan Kepala Bidang Dokumentasi PDII LIPI No. 12.360/JI.3.02/SK.ISSN/2001
PDII LIPI SK. No. 0005.25280430/JI.3/SK.ISSN/2016

Visi

Penelitian sebagai landasan ilmiah pembangunan kesejahteraan sosial

Misi

Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial
Apresiasi kerjasama antarlembaga dan komunitas ilmiah
Kontribusi bagi pengembangan ilmu kesejahteraan sosial

Penanggung Jawab: Kepala B2P3KS Yogyakarta

Mitra Bestari

Prof. Dr. Ir. Husein Avicenna Akil, M.Sc. (Science, Technology and Innovation Policy,
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
Prof. Dr. Phil Janianton Damanik, M.Si. (Pembangunan Sosial, Universitas Gadjah Mada)
Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono (Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Bagong Suyanto (Sosiologi, Universitas Airlangga)
Prof. Dr. Achmad Nurmandi (Kebijakan Publik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
Drs. Latiful Khuluq, MA, BSW, Ph.D. (Kesejahteraan Sosial, UIN Sunan Kalijaga)
Dr. Harmona Daulay, S.Sos, M.Si. (Sosiologi, Universitas Sumatera Utara)
Dwi Harsono, S.Sos., MPA, MA, Ph.D. (Evaluasi Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta)

Redaktur / Editor in Chief

Dr. Istiana Hermawati, M.Sos. (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS

Dewan Redaksi / Editor

Dr. Soetji Andari, M.Si. (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS
Dra. Elly Kuntjorowati, M.Si. (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS
Dra. Trilaksmi Udiati (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS
Pandu Yuanjaya, MPA (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS
Dra. Chatarina Rusmiyati, M.Si. (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS
Dra. Sri Yuni Murtiwiidayanti (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS

Desain Grafis / Layout Editor

Fatwa Nurul Hakim, S.Sos.

Sekretariat

Dra. Cicik Kurniawati, M.A.
Dra. Sri Rahayu, M.Si.

Jl. Kesejahteraan Sosial 1, Sonosewu, Yogyakarta
Tromol Pos 65 Kode Pos 55002, Telpon (0274) 377265 Fax. (0274) 373530
e-mail: jpksy.yogyakarta@kemsos.go.id
portal web: <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php?journal=jpks>

Percetakan:

Ash-Shaff

Isi di luar tanggung jawab percetakan

**Ketentuan Penulisan Naskah
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial (JPKS)**

Materi dan jenis tulisan:

1. Miniaturisasi dari hasil penelitian.
2. Ulasan terhadap hasil penelitian untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan hasil implikasinya bagi perorangan, kelompok, dan masyarakat.
3. Hasil sampingan (by research) penelitian.

Topik dan Substansi Tulisan:

1. Bidang sosial, terutama bidang kesejahteraan sosial (misalnya: kemiskinan, kecacatan fisik dan mental, keterlantaran, ketunasosialan, ketunasusilaan, korban bencana, perencanaan dan pemberdayaan sosial, dan permasalahan lain yang berkaitan dengan orang dan masyarakat yang menghadapi keterbatasan sosial)
2. Deskripsi permasalahan sosial, meliputi pengungkapan fakta yang ada, prediksi permasalahan implikasinya bagi perorangan, kelompok, dan masyarakat dan konsep model dalam upaya pemecahan masalah kesejahteraan sosial berpijak pada hasil pengamatan intens dan penelitian.

Teknik Penyajian:

1. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan baku.
2. Proporsi penyajian; (a) Panjang judul tidak lebih dari dua baris ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris (b) Abstrak ditulis dalam satu alinea, dalam bahasa Inggris dan Indonesia, bahasa Indonesia maksimal 250 kata, bahasa Inggris 150-200 kata, ditulis dalam besaran huruf (font) Times New Roman 10 lebih kecil dari besaran huruf batang tubuh (font Times New Roman 12) (c) kata kunci setelah abstrak ditulis minimal tiga kata, maksimal lima kata.
3. Penyajian tabel atau bagan alur (flowchart) tidak lebih 25% dari panjang tulisan. Tabel dibuat tanpa garis vertikal.
4. Pustaka Acuan yang digunakan paling lama lima tahun sejak dibuatnya artikel dan ditulis dalam font lebih kecil (Times New Roman 10) dari batang tubuh (Times New Roman 12). Pustaka acuan ditulis berdasarkan gaya penulisan APA (American Psychological Association) dengan pola: Nama Belakang Pengarang, Inisial (kecuali nama orang Indonesia), tahun penerbitan ditulis dalam kurung, Judul buku (Edisi jika edisinya lebih dari satu), tempat diterbitkan: Penerbit. Contoh: Norvig, Karen. (2013). An Introduction to Social Welfare. New York: Graw Hill.
5. Sistematika tulisan tersusun dalam: a. Judul (Indonesia dan Inggris); b. Nama penulis; c. Biodata penulis (nama lembaga, alamat lembaga dan Email); d. Abstrak (dalam bahasa Inggris dan Indonesia); e. Pendahuluan; f. Penggunaan Metode Penelitian; g. Hasil dan Pembahasan (ditulis dalam judul sesuai dengan topik dan lokasi penelitian); h. Penutup yang terdiri atas kesimpulan dan rekomendasi (apabila diperlukan); i. Pustaka Acuan.

Panjang Tulisan:

1. Antara 10 sampai dengan 25 halaman (2.500 s.d. 6.000 kata, tidak termasuk abstrak)
2. Diketik 1,5 spasi di atas kertas kuarto (A4)
3. Menggunakan tipe huruf (font) Times New Roman 14 untuk judul, Times New Roman 12 untuk batang tubuh tulisan, dan Times New Roman 10 untuk catatan kaki (foot note), sumber di bawah tabel, dan pustaka acuan.
4. Naskah dilampiri dengan disket atau CD (Soft Copy) dari tulisan bersangkutan.
5. Redaksi berhak mengubah naskah yang masuk untuk diterbitkan, tanpa mengubah esensi materi yang disampaikan, dan mengatur urutan pemuatan naskah menurut pertimbangan aktualitas serta kesesuaian naskah dengan misi penerbitan.
6. Naskah yang dimuat diberi imbalan, sedang yang tidak dapat dimuat dikirim kembali ke alamat penulis apabila disertai perangko secukupnya.

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial
Volume 19 No 3 Desember 2020
ISSN 1412 - 6451
E-ISSN 2528-0430

Daftar Isi

1. Kinerja Pendamping sebagai Ujung Tombak Keberhasilan Program Keluarga Harapan
The Performance of the Assistant as the Success Key of the Family Hope Program
Elly Kuntjorowati 207 - 218
2. Studi Eksplorasi : Analisis Faktor Pendorong Ibu dari Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Program Keluarga Harapan dalam Mencapai Graduasi Mandiri
Exploration Study: Analysis of Supporting Factors of Mothers from Beneficiary Families of the Hope Family Program in Achieving Independent Graduation
Ikhwanul Ihsan Armalid 219 - 230
3. Perbandingan Kebahagiaan Berdasarkan pada Perbedaan Gender dan Status Pernikahan
The Comparison of Happiness Based on Gender Differences and Marital Status
Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, Imammul Insan, Efan Yudha Winata, Dimas Teguh Prasetyo, Pratiwi Sakti, dan Fitra Hasri Rosandi 231 - 242
4. Pemberdayaan Gepeng melalui Program Desaku Menanti
Empowerment of Homeless Beggars Through Desaku Menanti Program
Ikawati dan Sri Yuni Murtiwiidayanti 243 - 254
5. Mekanisme Survival Warga Miskin Perkotaan Akibat Dampak Pandemi Covid-19
The Mechanism of Survival of the Urban Poor Due to the Impact of Covid-19 Pandemic
Soetji Andari 255 - 266
6. Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial: Studi Kasus pada Perpustakaan Umum Kabupaten Magelang
Community Empowerment Activity in Realizing Social Inclusion-Based Library Services: Case Study at the Public Library of Magelang Regency
Reza Mahdi dan Andi Asari 267 - 276

7. Faktor-Faktor Keberhasilan Keluarga Penerima Manfaat untuk Mencapai Graduasi dari Program Keluarga Harapan 277 - 288
Success Factors for Beneficiary Families to Achieve Graduation from the Hope Family Program (PKH)
Risna Kusumaningrum, Fentiny Nugroho, dan Alfrojems
8. Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah, Indonesia 289 - 306
Implementation of Poverty Alleviation Programs in Central Java, Indonesia
Mursid Zuhri dan Arif Sofianto

Editorial

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial (JPKS) Volume 19 No 3 Desember 2020 ini akan dibuka dengan artikel Elly Kuntjorowati yang berjudul Kinerja Pendamping sebagai Ujung Tombak Keberhasilan Program Keluarga Harapan, *The Performance of the Assistant as the Success Key of the Family Hope Program*. Dilanjutkan dengan artikel kedua oleh Ikhwanul Ihsan Armalid dengan berjudul Studi Eksplorasi : Analisis Faktor Pendorong Ibu dari Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Program Keluarga Harapan dalam Mencapai Graduasi Mandiri, *Exploration Study: Analysis of Supporting Factors of Mothers from Beneficiary Families of the Hope Family Program in Achieving Independent Graduation*. Artikel ketiga adalah Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, Imammul Insan, Efan Yudha Winata, Dimas Teguh Prasetyo, Pratiwi Sakti, dan Fitra Hasri Rosandi yaitu berjudul Perbandingan Kebahagiaan Berdasarkan pada Perbedaan Gender dan Status Pernikahan, *The Comparison of Happiness Based on Gender Differences and Marital Status*. Artikel keempat oleh Ikawati dan Sri Yuni Murtiwiidayanti yang berjudul Pemberdayaan Gepeng melalui Program Desaku Menanti, *Empowerment of Homeless Beggars Through Desaku Menanti Program*. Artikel kelima oleh Soetji Andari yang mengupas tentang Mekanisme Survival Warga Miskin Perkotaan Akibat Dampak Pandemi Covid-19, *The Mechanism of Survival of the Urban Poor Due to the Impact of Covid-19 Pandemic*. Artikel keenam yaitu Reza Mahdi dan Andi Asari dengan artikelnya berjudul Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial: Studi Kasus pada Perpustakaan Umum Kabupaten Magelang, *Community Empowerment Activity in Realizing Social Inclusion-Based Library Services: Case Study at the Public Library of Magelang Regency*. Artikel ketujuh oleh Risna Kusumaningrum, Fentiny Nugroho, dan Alfrojems yang mengupas tentang Faktor-Faktor Keberhasilan Keluarga Penerima Manfaat untuk Mencapai Graduasi dari Program Keluarga Harapan, *Success Factors for Beneficiary Families to Achieve Graduation from the Hope Family Program (PKH)*. Ditutup dengan artikel kedelapan yaitu Mursid Zuhri dan Arif Sofianto dengan artikelnya berjudul Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah, Indonesia, *Implementation of Poverty Alleviation Programs in Central Java, Indonesia*

dari Redaksi

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial

ISSN 1412 - 6451
E-ISSN 2528 - 0430

Vol 19 No 3 Desember 2020

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh digandakan tanpa ijin dan biaya.
Keywords are based from articles. Abstract may be reproduced without permission and cost.

Elly Kuntjorowati (B2P3KS Yogyakarta)

Kinerja Pendamping sebagai Ujung Tombak Keberhasilan Program Keluarga Harapan

The Performance of the Assistant as the Success Key of the Family Hope Program

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 19 No 3 Desember 2020, hal 207 - 218

The assistants or facilitators in the family hope program (=PKH) were needed because beneficiary families were very poor families who, on average, did not have sufficient capacity to fight for their rights. PKH Facilitators were needed to assist the duties of the Family Hope Program Implementing Unit (UPPKH) at the central or regional levels. This study aimed to determine the various tasks of PKH facilitators in the success of the program and to determine the correlation between PKH facilitator performance and program success. This type of research was evaluative research. The data collection method used was a structured questionnaire where respondents chose answers that were already available. Data were analyzed using Pearson Correlation. The results showed that PKH Facilitators had main duties, routine tasks and supporting tasks. The results of the data analysis showed that the tasks of the assistants or facilitators really supported the success of the program. The recommendation was addressed to the Ministry of Social Affairs because PKH facilitators were recruited by the Ministry of Social Affairs. It was concluded that PKH Facilitators needed additional training, especially those related to empowering KPM to run economically productive businesses. Every month PKH Facilitators needed to hold meetings with Beneficiary Families (KPM) and to carry out empowerment to improve the welfare of KPM so that they could be independent.

Pendamping pada program keluarga harapan diperlukan karena keluarga penerima manfaat merupakan keluarga sangat miskin yang rata-rata tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Pendamping PKH dibutuhkan untuk membantu tugas-tugas unit pelaksana program keluarga harapan (UPPKH) di pusat ataupun daerah. Penelitian bertujuan untuk mengetahui ragam tugas-tugas pendamping PKH dalam mensukseskan program serta untuk mengetahui korelasi antara kinerja pendamping PKH dengan keberhasilan program. Jenis penelitian adalah penelitian evaluatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah angket secara terstruktur dimana responden memilih jawaban yang telah tersedia. Data dianalisa dengan menggunakan Pearson Correlation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping PKH mempunyai tugas pokok, tugas rutin dan tugas pendukung. Hasil analisa data menunjukkan bahwa tugas-tugas pendamping sangat mendukung keberhasilan program. Rekomendasi ditujukan kepada Kementerian Sosial karena pendamping PKH direkrut oleh Kementerian Sosial. Disimpulkan bahwa pendamping PKH memerlukan diklat tambahan, terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan KPM untuk menjalankan usaha ekonomis produktif. Setiap bulan pendamping PKH perlu melakukan pertemuan dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan melakukan pemberdayaan untuk

Keywords: *companion performance; Family Hope Program; spearhead.*

meningkatkan kesejahteraan KPM agar mereka dapat mandiri.

Kata Kunci: kinerja pendamping; Program Keluarga Harapan; ujung tombak.

Ikhwanul Ihsan Armalid, Eka Riyanti Purboningsih, Tiara Ratih Widiastuti, dan Retno Hanggarani Ninin (Fakultas Psikologi, Universitas Padjajaran)

Studi Eksplorasi : Analisis Faktor Pendorong Ibu dari Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Program Keluarga Harapan dalam Mencapai Graduasi Mandiri

Exploration Study: Analysis of Supporting Factors of Mothers from Beneficiary Families of the Hope Family Program in Achieving Independent Graduation

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 19 No 3 Desember 2020, hal 219 - 230

The government has created a poverty alleviation program through empowerment and assistance to Beneficiary Families (KPM) with the Family Hope Program (PKH) since 2007. According to BPS, this program has become an effective program in reducing poverty. There were several mothers from Beneficiary Families (KPM) who managed to get out of poverty and stopped getting assistance from PKH (Independent Graduation). This type of research was qualitative and an exploratory study. This study aimed to determine the factors that influenced mothers of KPM who received assistance from PKH in order to achieve independent graduation or left PKH membership. The research was conducted by carrying out in-depth interviews with mothers from KPM PKH recipients who managed to achieve independent graduation because they felt economically prosperous. The research was conducted in West Bandung Regency which involved six respondents consisting of three KPM mothers who had not received PKH assistance and involved three PKH assistants who accompanied KPM who had achieved independent PKH Graduation. Data was analyzed by using content analysis. The results showed that there were internal and external factors that caused mothers from KPM to be able to leave PKH assistance. Internal factors that influenced them to leave PKH were self-awareness, shame, trust and motivation to have a thriving business. External factors that caused them to leave

Pemerintah sudah membuat program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan dan pendampingan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2007. Menurut BPS, program ini menjadi program yang efektif dalam mengurangi angka kemiskinan. Terdapat beberapa ibu dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berhasil keluar dari kemiskinan dan berhenti mendapatkan bantuan dari PKH (Graduasi Mandiri). Jenis penelitian ini kualitatif dan merupakan studi eksploratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi para ibu dari KPM yang mendapat bantuan PKH agar dapat mencapai graduasi mandiri atau keluar dari kepesertaan PKH. Penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam kepada ibu-ibu dari KPM penerima PKH yang berhasil mencapai graduasi mandiri karena sudah merasa sejahtera secara ekonomi. Penelitian dilakukan di Kabupaten Bandung Barat melibatkan enam responden terdiri dari tiga orang ibu KPM yang sudah tidak mendapatkan bantuan PKH dan melibatkan tiga orang pendamping PKH yang mendampingi KPM yang telah mencapai PKH Graduasi mandiri. Data dianalisa dengan menggunakan analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan terdapat faktor internal dan eksternal yang menyebabkan ibu-ibu dari KPM mampu keluar dari bantuan PKH. Faktor internal yang mempengaruhi mereka keluar dari

PKH were due to social support from their families and PKH assistants.

Keywords: *poverty; program keluarga harapan (hoped family program); social welfare; exploratory study*

PKH adalah kesadaran diri, perasaan malu, kepercayaan dan motivasi untuk memiliki usaha yang maju. Faktor eksternal yang menyebabkan mereka keluar dari PKH karena ada dukungan sosial dari keluarga dan pendamping PKH.

Kata Kunci: kemiskinan; program keluarga harapan; kesejahteraan sosial; studi eksplorasi

Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, Imammul Insan, Efan Yudha Winata, Dimas Teguh Prasetyo, Pratiwi Sakti, dan Fitra Hasri Rosandi (Fakultas Psikologi, Universitas Teknologi Sumbawa)

Perbandingan Kebahagiaan Berdasarkan pada Perbedaan Gender dan Status Pernikahan

The Comparison of Happiness Based on Gender Differences and Marital Status

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 19 No 3 Desember 2020, hal 231 - 242

Marital status and gender differences are often associated with happiness. Psychological research is expected to be an answer to debates related to happiness, gender differences and marital status. This study aimed to determine whether there was a difference between gender and one's marital status with happiness. This survey was conducted using a quantitative approach to 201 academicians in Sumbawa, West Nusa Tenggara. The results of the correlation analysis showed that gender was not a variable related to happiness. Type of work was significantly related to one's happiness ($r = .15$; $p < .05$), marital status was positively correlated with happiness ($r = .21$; $p < .01$). This study found that gender differences were not statistically significant in affecting happiness with $F(1, 197) = .28$; $p = .60$, but marital status predicted happiness with $F(1, 197) = 8.45$; $p = .00$, where happiness in unmarried people ($4.26 \pm .78$) was significantly lower than those who were married ($4.87 \pm .78$) with ($t_{19,09} = -3.07$; $p = .01$). In addition, there was no significant interaction between gender differences and marital status on happiness with $F(1, 197) = .58$; $p = .45$. A person who is married has a higher tendency of happiness than someone who is not

Status pernikahan dan perbedaan gender sering dikaitkan dengan kebahagiaan. Penelitian psikologis diharapkan dapat menjadi jawaban atas perdebatan terkait kebahagiaan, perbedaan gender, dan status pernikahan. Studi ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara gender dan status pernikahan seseorang dengan kebahagiaan. Survei ini dilakukan dengan metode pendekatan kuantitatif terhadap 201 civitas akademika di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa gender tidak menjadi variabel yang berhubungan dengan kebahagiaan. Jenis pekerjaan berkaitan secara signifikan dengan kebahagiaan seseorang ($r = 0,15$; $p < 0,05$), status pernikahan secara positif berkorelasi dengan kebahagiaan ($r = 0,21$; $p < 0,01$). Penelitian ini menemukan bahwa perbedaan gender secara statistik tidak signifikan memengaruhi kebahagiaan dengan $F(1, 197) = 0,28$; $p = 0,60$, tetapi status pernikahan memprediksi kebahagiaan dengan $F(1, 197) = 8,45$; $p = 0,00$, yang mana kebahagiaan pada orang belum menikah ($4,26 \pm 0,78$) secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan yang telah menikah ($4,87 \pm 0,78$) dengan ($t_{19,09} = -3,07$; $p = 0,01$). Selain itu, tidak terdapat signifikansi interaksi antara

married. The results of this study could not be the main reference and information that contained the causal mechanisms. Further studies require the involvement and dynamics of other psychological factors as variables that can predict a person's marital status and happiness.

Keywords: *comparison; gender differences; happiness; married; single.*

perbedaan gender dan status pernikahan pada kebahagiaan dengan $F(1, 197) = 0,58$; $p = 0,45$. Seseorang yang telah menikah memiliki kecenderungan kebahagiaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan seseorang yang belum menikah. Hasil studi ini tidak dapat menjadi rujukan utama dan informasi yang berisi mekanisme sebab-akibat. Studi selanjutnya memerlukan keterlibatan dan dinamika faktor psikologis lain sebagai variabel yang dapat memprediksi status pernikahan dan kebahagiaan seseorang.

Kata Kunci: *perbandingan; perbedaan gender; kebahagiaan; menikah; single*

Ikawati dan Sri Yuni Murtiwiidayanti (B2P3KS Yogyakarta)
Koperasi Pemberdayaan Gepeng melalui Program Desaku Menanti
Empowerment of Homeless Beggars Through Desaku Menanti Program
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 19 No 3 Desember 2020, hal 243 - 254

This study aimed to determine the effectiveness of empowering Gepeng (= homeless beggars) through the Desaku Menanti Program. This type of research was Action Research. The research design used was Quasi Experiment Design in the form of One Group Pre-test & Post-test Design. Subjects and research locations were determined purposively, namely as many as 32 homeless beggars living in Malang City. Data to see the initial condition (pre-test) and the final condition (post-test) were collected by conducting testing with in-depth interviews considering the low education level of respondents and even some were in illiteracy. Researchers found the effectiveness of homeless beggars empowerment through Desaku Menanti Program in order to make them independent, namely by examining conditions between before and after undergoing the empowerment program. Based on the findings, it was recommended that regular and ongoing mentoring was needed for empowerment participants. This was because not all participants had changed their mindset. The marketing factor was still the main inhibiting factor. The skills gained

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemberdayaan Gepeng (gelandangan pengemis) melalui program Desaku Menanti. Jenis penelitian ini adalah Action Research. Rancangan penelitian yang digunakan adalah Quasi Experiment Design dalam bentuk One Group Pre-test – Post-test Design. Subjek dan lokasi penelitian ditentukan secara purposive yaitu Gepeng sebanyak 32 orang yang tinggal di Kota Malang. Data untuk melihat kondisi awal (pre-test) dan kondisi akhir (post-test) dikumpulkan dengan melakukan testing dengan wawancara mendalam mengingat tingkat pendidikan responden rendah bahkan buta huruf. Peneliti menemukan adanya efektivitas pemberdayaan Gepeng melalui program Desaku Menanti guna mewujudkan kemandirian Gepeng, yakni dengan cara mencermati kondisi antara sebelum dan sesudah menjalani program pemberdayaan tersebut. Berdasarkan hasil temuan, direkomendasikan bahwa pendampingan rutin dan berkelanjutan diperlukan bagi peserta pemberdayaan. Hal ini mengingat bahwa belum semua peserta berubah pola pikirnya. Faktor pemasaran masih menjadi faktor

from empowerment provided opportunities to increase family income. This required the involvement of related parties, especially the Office of Industry and Trade which had a big share in marketing so as to help support the independence of Gepeng or homeless beggars and their families through productive economic efforts. The Indonesian Ministry of Social Affairs, through the Directorate of Social Rehabilitation for people who are not socially prosperous (Tuna Sosial), was advised to carry out empowerment of the homeless beggars through the guidance of skills according to their interests and talents by considering potential sources for production from around where they lived. Desaku Menanti Program was expected to be implemented by local governments more broadly in all provinces. The program was able to solve social problems in urban areas, namely that it could prevent urban people from earning a living in the city without work skills, could increase local government involvement in Gepeng problems, could empower Gepeng to want to do business and work, and this program was one of the programs to reduce the number of poverty .

Keywords: *empowerment; homeless beggars; Desaku Menanti Program*

penghambat yang utama. Keterampilan yang diperoleh dari pemberdayaan memberikan peluang untuk dapat menambah pendapatan keluarga. Ini memerlukan keterlibatan pihak terkait terutama Dinas Perindustrian Perdagangan yang mempunyai andil besar dalam pemasaran sehingga membantu kemandirian Gepeng dan keluarga mereka melalui usaha ekonomi produktif. Kementerian Sosial RI melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial untuk Tuna Sosial disarankan untuk melakukan pemberdayaan Gepeng melalui bimbingan keterampilan sesuai minat dan bakat dengan mempertimbangkan sumber potensi untuk produksi dari sekitar tempat tinggal mereka. Program Desaku Menanti diharapkan dapat diterapkan oleh pemerintah daerah secara lebih luas di semua provinsi. Program tersebut mampu memecahkan masalah sosial di perkotaan yakni dapat mencegah kaum urban mencari nafkah ke kota tanpa keterampilan kerja, mampu meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah dalam masalah Gepeng, mampu memberdayakan Gepeng untuk mau berusaha dan bekerja, dan program tersebut merupakan salah satu program untuk mengurangi jumlah kemiskinan.

Kata Kunci: pemberdayaan; gepeng; Program Desaku Menanti

Irfan Ardiansyah¹ dan Muhtadi² ('Prodi Kesejahteraan Sosial UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, ²Prodi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta)
Pengaruh Dukungan Sosial Keluarga terhadap Kemandirian Sosial Anak Tuna Grahita Ringan di Sekolah Dasar SLB Negeri 01 Jakarta Selatan
The Influence of Family Social Support on the Social Independence of Children with Mild Disabilities in South Jakarta SLB Elementary School 01
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 19 No 3 Desember 2020, hal 255 - 266

Employing Social independence is the ability to interact with other people and the ability not to depend on the actions of others. A mentally retarded child really needs help from others in certain fields, including in social interactions with others. The role of family social support is a help, encouragement and attention when children are facing difficulties. Parents as a bridge

Kemandirian sosial adalah kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan kemampuan untuk tidak bergantung pada aksi orang lain. Seorang anak tunagrahita sangat membutuhkan bantuan dari orang lain dalam bidang-bidang tertentu, tidak terkecuali dalam interaksi sosial dengan orang lain. Peran dukungan sosial keluarga merupakan suatu pertolongan, dorongan

between children and the outside world play a very important role in providing motivation and support as well as in giving confidence to socialize with the outside world. Family social support is related to the success of self-development in shaping children's social independence, so it can be concluded that there is an influence from parental guidance at home on the socialization ability of mentally retarded children. The purpose of this study was to determine how family social support for the independence of mentally retarded children had an effect and was implemented using a quantitative approach. The sampling technique was carried out by using probability samples with a total sample size of 61 respondents, namely parents of mentally retarded children who were still actively attending SLB Negeri 01 Jakarta. Data analysis was performed using Partial T Test, Simultaneous F Test and Determination Coefficient Test. The results showed that out of the five dimensions, namely, informational support, reward support, instrumental support, emotional support, and social integrity support, there were two unrelated dimensions, namely informational support and instrumental support. Meanwhile, appreciation support, emotional support and social integrity support had a significant influence on social independence. The result of the R square value showed a value of 0.195, which meant that the family social support variable had an influence of 19.5% on the social independence of mentally retarded children and the rest came from variables outside this study. It can be concluded that the variables of reward support, emotional support, and social integrity support have a significant effect on social independence. Informational support and instrumental support variables do not have a significant effect on social independence. The recommendation from the researchers was that parents, schools, government, non-governmental organizations should provide social support and better parenting styles for mentally retarded children.

semangat dan perhatian kala anak sedang menghadapi kesusahan. Orang tua sebagai jembatan antara anak dengan dunia luar sangat berperan dalam memberikan motivasi dan dukungan serta dalam memberikan rasa percaya diri untuk bersosialisasi dengan dunia luar. Dukungan sosial keluarga berhubungan dengan keberhasilan bina diri dalam membentuk kemandirian sosial anak, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa ada pengaruh dari bimbingan orang tua di rumah terhadap kemampuan sosialisasi pada anak tunagrahita. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dukungan sosial keluarga terhadap kemandirian anak tuna grahita memiliki pengaruh dan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel probabilitas dengan jumlah sampel sebanyak 61 responden yakni orang tua dari anak tuna grahita yang masih aktif bersekolah di SLB Negeri 01 Jakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survey menggunakan kuesioner. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Uji T Parsial, Uji F Simultan dan Uji Koefisien Determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari kelima dimensi yakni, dukungan informasional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dukungan emosional, dan dukungan integritas sosial, terdapat dua dimensi yang tidak berhubungan yakni dukungan informasional dan dukungan instrumental. Sedangkan dukungan penghargaan, dukungan emosional, dan dukungan integritas sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian sosial. Hasil nilai R square menunjukkan nilai sebesar 0.195 yang berarti variabel dukungan sosial keluarga memiliki pengaruh sebesar 19.5% terhadap kemandirian sosial anak tuna grahita dan sisanya berasal dari variabel-variabel diluar penelitian ini. Dapat disimpulkan bahwa variabel dukungan penghargaan, dukungan emosional, dan dukungan integritas sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian sosial. Variabel dukungan informasional dan dukungan instrumental tidak memiliki pengaruh yang signifikan

Keywords: *family social support; social independence; mentally disabled*

terhadap kemandirian sosial. Rekomendasi dari peneliti adalah agar orang tua, pihak sekolah, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat seharusnya memberi dukungan sosial dan pola-pola asuh yang lebih baik kepada anak tuna grahita.

Kata Kunci: *dukungan sosial keluarga; kemandirian sosial; tuna grahita*

Reza Mahdi dan Andi Asari (Fakultas Sastra, Program Studi Ilmu Perpustakaan, Universitas Negeri Malang)

Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial: Studi Kasus pada Perpustakaan Umum Kabupaten Magelang

Community Empowerment Activity in Realizing Social Inclusion-Based Library Services: Case Study at the Public Library of Magelang Regency

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 19 No 3 Desember 2020, hal 267 - 276

Nowdays, the existence of public libraries is not only a place to read but to increase creativity and people's ability to work. It can be said that the library plays a role in empowering the community, for example in this study the Public Library of Magelang Regency. Currently the library has community empowerment activities in order to achieve social inclusion, which means that it is open to all groups, not limited to race, ethnicity, religion, or social or economic status. The problem of this research is what are the community empowerment activities carried out by public libraries to realize social inclusion in society? The purpose of this study is to describe the community empowerment activities carried out by libraries in realizing social inclusion-based library services. This research is a qualitative research with a case study method. Based on data found, the Public Library of Magelang Regency has carried out many community empowerment activities in realizing social inclusion. This activity pays attention to the community such as diffable, women, and ethnicity. For people with disabilities, there is an resin processing activity (wood sap) into decorative items. Furthermore, there is a kur rope processing activity for women, working

Pada era kini keberadaan perpustakaan umum tidak hanya sebagai tempat untuk membaca saja namun tempat untuk meningkatkan kreativitas dan kemampuan masyarakat untuk berkarya. Ini dapat dikatakan bahwa perpustakaan berperan dalam memberdayakan masyarakat sebagai contoh dalam studi ini adalah Perpustakaan Umum Kabupaten Magelang. Saat ini perpustakaan tersebut memiliki kegiatan pemberdayana masyarakat dalam rangka mewujudkan inklusi sosial yang artinya terbuka pada seluruh golongan tidak terbatas ras, etnis, agama, maupun status sosial atau ekonomi. Permasalahan penelitian ini adalah apa saja kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perpustakaan umum untuk mewujudkan inklusi sosial di masyarakat? Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perpustakaan dalam mewujudkan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Berdasarkan data yang ditemukan Perpustakaan Umum Kabupaten Magelang sudah banyak melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan inklusi sosial. Kegiatan tersebut

with the Hand Magic community. Finally, for certain ethnic communities, the library has provided facilities and infrastructure for them even though the community has its own regulations. Regarding social inclusion itself, there are still studies that have not been carried out related to empowerment in other marginalized communities such as people with HIV / PLWHA. Therefore, researchers have a recommendation, further study can be done on community empowerment of people with HIV / PLWHA, in collaboration with non-governmental organizations (NGOs).

Keywords: *Social inclusion, community empowerment, social inclusion, Magelang Regency*

memperhatikan masyarakat seperti difabel, perempuan, dan etnis. Untuk difabel, terdapat kegiatan pengolahan resin (getah kayu) menjadi barang hiasan. Selanjutnya, terdapat kegiatan pengolahan tali kur untuk kaum perempuan, bekerjasama dengan komunitas Hand Magic. Terakhir, terhadap komunitas etnis tertentu, pihak perpustakaan telah menyediakan sarana dan prasarana untuk mereka meskipun dari pihak komunitas memiliki peraturan tersendiri. Mengenai inklusi sosial itu sendiri, masih terdapat kajian yang belum dilakukan terkait dengan pemberdayaan pada masyarakat termarginal lainnya seperti penderita HIV/ODHA. Oleh karena itu peneliti memiliki rekomendasi berupa kajian mengenai pemberdayaan masyarakat terhadap pengidap HIV/ODHA bisa dilakukan, bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Kata Kunci: inklusi sosial; pemberdayaan masyarakat; perpustakaan umum; Kabupaten Magelang

Risna Kusumaningrum, Fentiny Nugroho, dan Alfrojems (Universitas Indonesia)
Faktor-Faktor Keberhasilan Keluarga Penerima Manfaat untuk Mencapai Graduasi dari Program Keluarga Harapan
Success Factors for Beneficiary Families to Achieve Graduation from the Hope Family Program (PKH)
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 19 No 3 Desember 2020, hal 277 - 288

One of the programs carried out by the Government of Indonesia to reduce poverty is the Family Hope Program (PKH). Until 2020 PKH has reached a total of 10 million of Beneficiary Families (KPM). In the midst of this program, PKH is currently focused on the contribution of the poverty reduction program, one aspect of which is the KPM graduation rate. The purpose of this study was to describe and analyze the determinants of the success of KPM in achieving graduation from PKH. This research approach was descriptive qualitative. Data were collected using in-depth interviews, observation and documentation study. Informants were selected purposively based on the criteria

Salah satu program yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mengurangi kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Sampai dengan tahun 2020 PKH telah menjangkau sejumlah 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Di tengah berlangsungnya program tersebut, saat ini PKH difokuskan pada kontribusi program pengurangan angka kemiskinan, salah satu aspeknya adalah angka graduasi KPM. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa faktor-faktor penentu keberhasilan KPM untuk mencapai graduasi dari PKH. Pendekatan penelitian ini adalah diskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara

relevant to the research objectives. Primary data and secondary data collected were analyzed descriptively. The results of this study indicated that there were eight success factors that made KPM achieved graduation from PKH, such as mindset, bad experiences in the past, high fighting power and enthusiasm, not easily discouraged, money management ability, taking advantage of opportunities, discipline and commitment and social sensitivity. The mindset and the ability to manage money were the most dominant factors in determining the graduation. Researchers recommend that the Ministry of Social Affairs and local governments increase the empowerment of KPM to leave PKH and the need to strengthen the role of human resources from PKH as stated in the Family Capacity Building Meeting (P2K2) material, especially related to the eight success factors for achieving KPM graduation from PKH. Researchers also recommend that PKH facilitators need to continue to increase their role, especially in carrying out P2K2 activities that can change the mindset and independence of KPM and to increase their ability in financial management.

Keywords: *poverty; graduation; Hope Family Program*

mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Informan dipilih secara purposif berdasarkan kriteria yang relevan dengan tujuan penelitian. Data primer dan data sekunder yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat delapan faktor keberhasilan yang membuat KPM mencapai graduasi dari PKH, seperti pola pikir, pengalaman pahit di masa lalu, daya juang dan semangat yang tinggi, tidak mudah putus asa, kemampuan pengelolaan uang, memanfaatkan peluang, disiplin dan komitmen serta kepekaan sosial. Pola pikir dan kemampuan atas pengelolaan uang menjadi faktor yang paling dominan dalam menentukan graduasi. Peneliti merekomendasikan agar Kementerian Sosial dan pemerintah daerah meningkatkan pemberdayaan KPM agar keluar dari PKH serta perlunya penguatan peran SDM dari PKH yang tertuang dalam materi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), khususnya terkait dengan delapan faktor keberhasilan demi tercapainya graduasi KPM dari PKH. Peneliti juga merekomendasikan agar pendamping PKH perlu terus meningkatkan perannya khususnya dalam melakukan kegiatan P2K2 yang dapat mengubah pola pikir dan kemandirian dari KPM serta untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan keuangan.

Kata Kunci: kemiskinan; graduasi; Program Keluarga Harapan

Mursid Zuhri dan Arif Sofianto (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah)
Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah, Indonesia
Implementation of Poverty Alleviation Programs in Central Java, Indonesia
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 19 No 3 Desember 2020, hal 289 - 306

Central Java is one of the centers of national economic growth, but poverty still requires special attention. The research objective was to describe the implementation of poverty alleviation programs in Central Java, as well as to formulate poverty reduction designs that were implemented

Jawa Tengah menjadi salah satu kawasan pusat pertumbuhan ekonomis nasional, namun kemiskinan masih memerlukan perhatian khusus. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan implementasi program penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah, serta merumuskan desain penanggulangan

according to needs. This type of research was descriptive, using a mixed method approach, namely qualitative and quantitative. Research locations were in 15 districts in Central Java with the highest poverty rates, 777 informants involved, family heads from the poor, community/institutional leaders, village officials and program assistants. Data were collected using interview techniques, observation, and focused group discussion. The qualitative data analysis used an interactive model developed by Miles and Huberman. While the quantitative data analysis used descriptive statistics in the form of mean and percentage values. The conclusion of this study was First, in the implementation of poverty alleviation programs, there were many cases of wrong targeting due to inaccurate data, program implementation appeared to be more of a gift which increased consumptive behavior than productive, there was no education for people to release themselves from poverty. Second, the expected poverty reduction design was to use the principle of empowerment, the main role was in the poor, where they also determined the programs to be run on the principle of providing education to the poor to be productive and independent.

Keywords: *poverty; prevention program; Central Java*

kemiskinan yang implementatif sesuai dengan kebutuhan. Tipe penelitian ini ialah deskriptif, menggunakan pendekatan mixed method, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Lokasi penelitian di 15 kabupaten di Jawa Tengah dengan angka kemiskinan tertinggi, informan yang terlibat sebanyak 777 orang, para kepala keluarga dari unsur orang miskin, tokoh masyarakat/kelembagaan, aparat desa dan pendamping program. Data dikumpulkan dengan tehnik wawancara, observasi, serta *Focussed Group Discussion*. Analisis data kualitatif menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Sedang analisis data kuantitatif memakai statistik deskriptif berupa nilai rata-rata dan persentase. Kesimpulan penelitian ini ialah Pertama, dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan, terdapat banyak kasus salah sasaran akibat data yang kurang tepat, implementasi program nampak lebih bersifat pemberian yang meningkatkan perilaku konsumtif dibanding produktif, tidak ada pendidikan kepada masyarakat untuk melepaskan diri mereka dari kemiskinan. Kedua, desain penanggulangan kemiskinan yang diharapkan yakni adalah menggunakan prinsip pemberdayaan, peran utama berada pada masyarakat miskin dimana mereka ikut menentukan program yang akan dijalankan dengan prinsip pemberian edukasi kepada masyarakat miskin agar menjadi produktif dan mandiri.

Kata Kunci: kemiskinan; program penanggulangan; Jawa Tengah

Kinerja Pendamping sebagai Ujung Tombak Keberhasilan Program Keluarga Harapan

The Performance of the Assistant as the Success Key of the Family Hope Program

Elly Kuntjorowati

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS),

Jl. Kesejahteraan Sosial No 1, Nomor Telp (0274) 377265, Fax (0274) 373530,

Email ellykuntjorowati@gmail.com, HP. 087838724537

Naskah diterima 16 Juni 2020, direvisi 22 Juli 2020, disetujui 27 Agustus 2020

Abstract

The assistants or facilitators in the family hope program (=PKH) were needed because beneficiary families were very poor families who, on average, did not have sufficient capacity to fight for their rights. PKH Facilitators were needed to assist the duties of the Family Hope Program Implementing Unit (UPPKH) at the central or regional levels. This study aimed to determine the various tasks of PKH facilitators in the success of the program and to determine the correlation between PKH facilitator performance and program success. This type of research was evaluative research. The data collection method used was a structured questionnaire where respondents chose answers that were already available. Data were analyzed using Pearson Correlation. The results showed that PKH Facilitators had main duties, routine tasks and supporting tasks. The results of the data analysis showed that the tasks of the assistants or facilitators really supported the success of the program. The recommendation was addressed to the Ministry of Social Affairs because PKH facilitators were recruited by the Ministry of Social Affairs. It was concluded that PKH Facilitators needed additional training, especially those related to empowering KPM to run economically productive businesses. Every month PKH Facilitators needed to hold meetings with Beneficiary Families (KPM) and to carry out empowerment to improve the welfare of KPM so that they could be independent.

Keywords: *companion performance; Family Hope Program; spearhead.*

Abstrak

Pendamping pada program keluarga harapan diperlukan karena keluarga penerima manfaat merupakan keluarga sangat miskin yang rata-rata tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Pendamping PKH dibutuhkan untuk membantu tugas-tugas unit pelaksana program keluarga harapan (UPPKH) di pusat ataupun daerah. Penelitian bertujuan untuk mengetahui ragam tugas-tugas pendamping PKH dalam mensukseskan program serta untuk mengetahui korelasi antara kinerja pendamping PKH dengan keberhasilan program. Jenis penelitian adalah penelitian evaluatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah angket secara terstruktur dimana responden memilih jawaban yang telah tersedia. Data dianalisa dengan menggunakan Pearson Correlation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping PKH mempunyai tugas pokok, tugas rutin dan tugas pendukung. Hasil analisa data menunjukkan bahwa tugas-tugas pendamping sangat mendukung keberhasilan program. Rekomendasi ditujukan kepada Kementerian Sosial karena pendamping PKH direkrut oleh Kementerian Sosial. Disimpulkan bahwa pendamping PKH memerlukan diklat tambahan, terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan KPM untuk menjalankan usaha ekonomis produktif. Setiap bulan pendamping PKH perlu melakukan pertemuan dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan melakukan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan KPM agar mereka dapat mandiri.

Kata Kunci: *kinerja pendamping; Program Keluarga Harapan; ujung tombak.*

Pendahuluan

Program Keluarga Harapan atau *Conditional Cash Transfer* (CCT), istilah yang digunakan oleh Bank Dunia untuk Program Kemiskinan.

Program ini di Negara Amerika Latin dianggap sebagai program yang berhasil meningkatkan angka partisipasi sekolah dan status kesehatan keluarga miskin dan ibu. Tujuan umum dari

CCT atau PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus mata rantai kemiskinan, memperbaiki kualitas sumber daya manusia, dan perubahan perilaku keluarga penerima manfaat (KPM) yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan (Elly Kuntjorowati, Ikawati, Sri Yuni Murtiwiidayanti, Tri Laksmi Udiati, 2019). Program ini sejak awal dimulai telah ada sejumlah penelitian yang mencoba menilai dampak program bagi KPM. Penelitian dan survey lapangan di tempat yang berbeda telah dilakukan oleh berbagai instansi baik domestik maupun internasional. Dalam upaya awal, Bappenas (2009) mencoba melakukan penilaian kuantitatif menggunakan intervensi acak berbasis rumah tangga, dengan pengukuran sebelum dan setelah intervensi dalam perawatan dan control, dan hasil menunjukkan bahwa program ini sangat penting dalam penanggulangan kemiskinan (Bappenas, 2009). Program ini berhasil meningkatkan status kesehatan ibu dan anak (Gertler, P, 2004); mengurangi defisiensi nutrisi (Hoddinot, J. E., Skoufias, 2004) peningkatan ekonomi lokal (Coudy, D. and R.L. Haris, 2001). Di beberapa negara, CCT telah menjadi program bantuan sosial terbesar yang mencakup jutaan rumah tangga miskin, seperti yang terjadi di Brasil dan Meksiko. CCT telah dipuji sebagai cara untuk mengurangi kemiskinan, terutama di negara-negara yang sangat tidak setara seperti di Amerika Latin; program ini membantu rumah tangga keluar dari lingkaran setan di mana kemiskinan diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya; program ini mempromosikan kesehatan anak, gizi, dan sekolah; dan membantu negara-negara memenuhi pembangunan milenium (Ariel Fiszbein and Norbert Schady, 2009).

Keberhasilan PKH salah satunya ditentukan oleh pendampingan program yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan oleh pendamping PKH. Pendamping PKH adalah warga negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi tertentu serta lulus

seleksi dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI untuk melakukan pendampingan kepada peserta PKH berdasarkan kontrak kerja dalam kurun waktu tertentu (Kementerian Sosial, Ditjen Linjamsos, 2016). Pelaksana PKH di tingkat kecamatan adalah pendamping, yang bertugas di kecamatan dan berkoordinasi dengan camat. Pendamping PKH merupakan pihak kunci yang menjembatani penerima manfaat dengan pihak-pihak lain yang terlibat baik di tingkat kecamatan maupun dengan program di tingkat kabupaten/kota. Tugas pendamping termasuk didalamnya melakukan sosialisasi, pengawasan dan mendampingi para penerima manfaat dalam memenuhi komitmennya.

Pendamping PKH dalam pelaksanaan program di lapangan secara langsung ataupun tidak langsung sangat menentukan keberhasilan program. Kinerja para pendamping secara teknis melaksanakan intervensi, bersentuhan langsung dengan penerima manfaat PKH melalui berbagai peranan yang mereka tampilkan. Kesuksesan suatu program tergantung peran para pendamping sebagai sesuatu yang menjembatani antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, peran pendamping sangat penting dalam kesuksesan program.

Pendamping mempunyai peran khusus diharapkan dapat memandu para penerima PKH dalam melaksanakan kewajibannya seperti yang telah ditentukan. Para pendamping ini tidak serta merta langsung terjun ke lapangan untuk mendampingi penerima PKH. Namun, pendamping diberikan bekal pengetahuan bagaimana untuk mengarahkan para penerima PKH dalam melaksanakan kewajibannya.

Pendampingan diperlukan karena beberapa alasan yaitu: a) PKH merupakan program perlindungan bantuan sosial bagi KPM peserta PKH yang dilakukan secara berkelanjutan; b) pendampingan memberikan ruang tanpa batas bagi peserta PKH untuk saling belajar dan bertanggung jawab atas komitmen yang telah disepakati dan; c) memperkuat modal

sosial bagi peserta PKH terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Agar tujuan tersebut terealisasi, maka dibutuhkan peran pendamping dan operator PKH. Dalam menjalankan tugasnya, pendamping dan operator PKH dibekali kemampuan agar dapat melaksanakan kegiatan PKH sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, memberikan motivasi, fasilitasi serta advokasi kepada KPM peserta PKH di lokasi tugasnya. Pendampingan ini sangat penting dikarenakan peserta PKH merupakan keluarga sangat miskin tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memperjuangkan hak-hak mereka, kemudian untuk merubah perilaku keluarga agar aktif berpartisipasi dan peduli terhadap pendidikan anak mereka, dan juga untuk memastikan peserta PKH melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan program yang telah ditetapkan. Mereka dibekali dengan beberapa pengetahuan antara lain: tujuan PKH, syarat kepersertaan PKH, komponen PKH, siapa yang berhak menerima PKH, kewajiban peserta PKH, pengurus PKH dan jumlah indeks bantuan PKH

(Kemensos RI, 2017). Pendamping PKH dibutuhkan untuk membantu tugas-tugas unit pelaksana program keluarga harapan (UPPKH) di pusat ataupun daerah guna melakukan identifikasi dan melaporkan segala permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan PKH, serta untuk melakukan tindak lanjut penanganan dan penyelesaiannya dalam waktu cepat. Tugas-tugas yang harus dilakukan secara cepat tersebut di antaranya segera membentuk kelompok peserta PKH beranggotakan 10-30 peserta serta tempat tinggalnya berdekatan, hal ini dilakukan segera setelah adanya penetapan dari Kementerian Sosial Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan judul : Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan sebagai Ujung Tombak Keberhasilan Program.

Permasalahan yang diajukan adalah: Apa saja kinerja pendamping PKH dalam rangka mendukung keberhasilan program? dan seberapa besar korelasi antara kinerja

pendamping PKH dengan keberhasilan program. Tujuan penelitian untuk mengetahui kinerja pendamping PKH dalam mendukung keberhasilan program. Untuk mengetahui korelasi antara kinerja Pendamping PKH dengan keberhasilan program.

Penggunaan Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah evaluasi untuk mengetahui program kerja pendamping PKH dalam mendukung keberhasilan program, sedangkan pendekatan penelitian secara kuantitatif deskriptif. Tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk mengembangkan dan menggunakan matematis, dan hipotesis. Hipotesis alternatif yang diajukan antara lain terdapat korelasi antara pendamping PKH dengan keberhasilan program, sedangkan hipotesa nihil tidak terdapat korelasi antara pendamping PKH dengan keberhasilan program. Analisa untuk mengetahui ada atau tidak korelasi dan uji hipotesis dengan menggunakan *Pearson Correlation*.

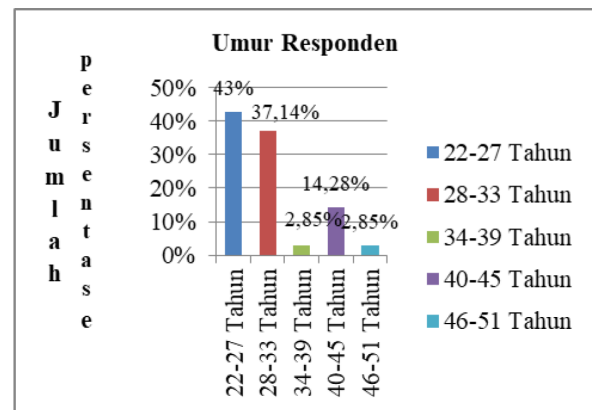
Penelitian ini secara purposive mengambil lokasi di Kota Yogyakarta Provinsi D.I. Yogyakarta. Alasan pemilihan lokasi karena jumlah pendamping Kota Yogyakarta cukup banyak ada 60 orang (UPPKH Kota Yogyakarta). Metode pengumpulan data menggunakan angket. Angket adalah pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadi atau hal-hal yang ia ketahui (Suharsimi Arikunto, 2006), sedangkan Sugiyono menjelaskan bahwa angket merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2012). Angket merupakan sejumlah pertanyaan yang jawabannya telah tersedia dan responden tinggal memilihnya sehingga memudahkan responden untuk menjawabnya. Pertanyaan dapat dibuat terstandar sehingga pertanyaannya bisa dibuat sama untuk seluruh responden, dan pengolahannya lebih mudah.

Penelitian ini dalam pengumpulan data juga menggunakan wawancara terstruktur karena wawancara tersebut sudah terstruktur melalui instrument, dan responden tinggal memilih jawaban yang sesuai dengan pilihannya. Wawancara ditujukan ke semua responden penelitian ini yakni pendamping PKH, UPPKH Kecamatan, Dinas Sosial, KPM, untuk mendapatkan data primer, terutama tentang program kerja pendamping PKH. Selain melalui angket dan wawancara informasi juga dapat diperoleh lewat data yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoritik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna (Sanafiah Faisal, 2007). Telaah dokumen terutama digunakan untuk melengkapi data primer yang sekiranya masih kurang.

Responden penelitian ini seluruhnya berjumlah 35 orang yang terdiri dari: pendamping PKH 30 orang, pegawai dinas sosial satu orang, koordinator UPPKH kecamatan satu orang dan KPM tiga orang.

Program Kerja Pendamping PKH dalam Mendukung Keberhasilan Program Umur Responden

Umur sangat berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Bagi usia yang masih muda peningkatan usia akan menambah produktivitas kerja, tapi sebaliknya bagi yang sudah berusia tua penambahan usia akan menurunkan produktivitas kerja karena faktor kemunduran fisik dan kesehatan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wisnu Sentana (2013) yang mengatakan bahwa umur berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja. Melalui Gambar 1 berikut akan dapat diketahui mengenai usia responden penelitian ini.



Gambar 1.

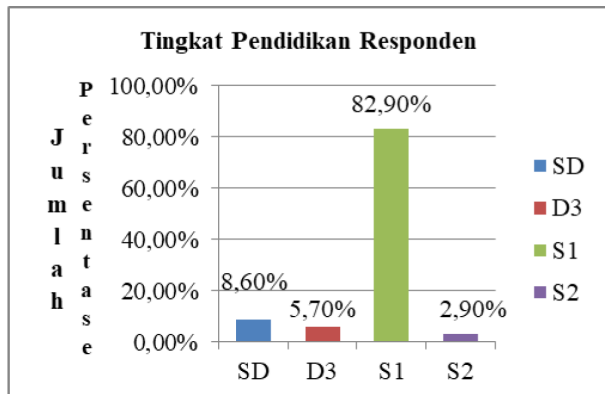
Umur Responden
Sumber : Hasil analisis

Dari Gambar 1 tersebut dapat diketahui bahwa responden sejumlah 50 persen berada pada usia 22 hingga 27 tahun, merupakan usia yang masih sangat produktif untuk berkarya dan menghasilkan produk pekerjaan. Responden dengan jumlah 26,67 persen berusia 28 hingga 33 tahun, usia 40 hingga 45 tahun berjumlah 16,67 persen, dan usia 34 hingga 39 tahun berjumlah sama dengan usia 46 hingga 51 tahun yaitu 3,33 persen. Penduduk usia produktif adalah penduduk usia kerja yang sudah bisa menghasilkan barang dan jasa. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) sejak tahun 1998 menggunakan penduduk umur 15 tahun ke atas sebagai kelompok usia kerja. Kelompok penduduk umur 0-14 tahun dianggap sebagai kelompok penduduk yang belum produktif secara ekonomis, kelompok penduduk umur 15-64 tahun sebagai kelompok penduduk yang produktif, dan kelompok penduduk umur 64 tahun ke atas sebagai kelompok yang tidak lagi produktif.

Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan diri, masyarakat,

bangsa dan Negara (Pemerintah Indonesia, 2003). Melalui Gambar 2 dapat diketahui tingkat pendidikan responden penelitian ini.



Gambar 2.
Tingkat Pendidikan responden
Sumber : Hasil wawancara diolah

Dari Gambar 2 tersebut dapat diketahui bahwa responden terbanyak dengan jumlah 82,90 persen adalah berpendidikan S1, dan mereka yang berpendidikan SD sejumlah 8,6 persen adalah keluarga penerima manfaat (KPM), dan yang berpendidikan D3 berjumlah 5,71 persen dan sisanya responden berpendidikan S2 berjumlah 2,9 persen. Pendamping PKH merupakan salah satu pendukung suksesnya PKH. Pendampingan PKH di Kota Yogyakarta direkrut secara khusus untuk melakukan kegiatan pendampingan. Untuk menjadi pendamping PKH ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain harus berusia sekurang-kurangnya 21 tahun, pendidikan minimal SLTA, diutamakan yang bertempat tinggal di kecamatan yang bersangkutan dan berpengalaman sebagai pekerja sosial. Dari grafik tersebut dapat dimaknai pula meskipun persyaratan minimal pendidikan adalah SLTA, namun kenyataannya 90 persen berpendidikan S1. Pendidikan dapat meningkatkan sumber daya manusia. Pendidikan menjadi modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Sulit rasanya untuk mengatakan bahwa kemajuan pembangunan suatu negara dapat dicapai tanpa adanya investasi di bidang pendidikan.

Pendidikan menjadi salah satu komponen yang digunakan dalam pengukuran Human Development Index (HDI) (Ravik Karsidi, 2007).

Wilayah Dampingan

Jumlah pendamping seluruh Indonesia sampai dengan tahun 2019 berjumlah 36.000 orang. Melalui tabel berikut akan dapat diketahui wilayah dampingan pendamping PKH Kota Yogyakarta.

Tabel 1.
Wilayah Kerja Dampingan

No.	Wilayah Dampingan	f	%
1.	Kecamatan Danurejan	1	3,3%
2.	Kecamatan Gedong Tengen	3	10%
3.	Kecamatan Gondokusuman	1	3,3%
4.	Kecamatan Gondomanan	3	10%
5.	Kecamatan Jetis	2	6,7%
6.	Kecamatan Keraton	2	6,7%
7.	Kecamatan Kotagede	3	10%
8.	Kecamatan Mantri Jeron	2	6,7%
9.	Kecamatan Mergangsan	2	6,7%
10.	Kecamatan Ngampilan	1	3,3%
11.	Kecamatan Pakualaman	1	3,3%
12.	Kecamatan Tegalrejo	2	6,7%
13.	Kecamatan Umbulharjo	4	13,3%
14.	Kecamatan Wirobrajan	3	10%
Jumlah		30	100%

Sumber: Hasil wawancara diolah

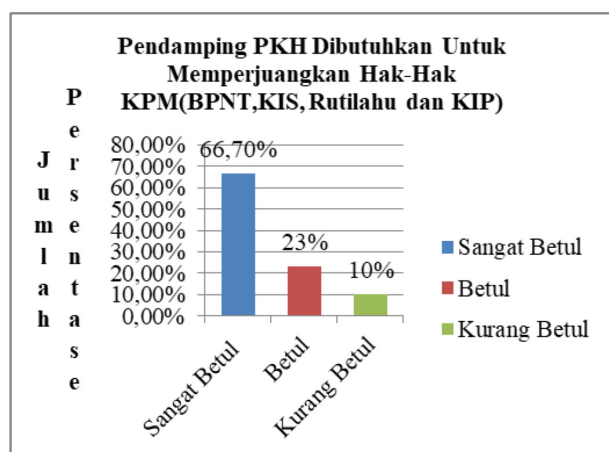
Dari Tabel 1 tersebut dapat diketahui bahwa responden yang merupakan pendamping PKH di suatu kecamatan bisa terdiri dari satu hingga empat orang. Kecamatan Umbulharjo jumlah pendamping paling banyak yaitu empat orang atau 13,3 persen, kemudian diikuti Kecamatan Gedongtengen, Kecamatan Gondomanan, Kecamatan Kotagede dan Kecamatan Wirobrajan masing-masing 10 persen. Satu orang pendamping bertugas mendampingi 250 KPM, dan jumlah KPM Kota Yogyakarta hingga akhir tahun 2019 sebanyak 11.455 KPM.

Jumlah Pendamping PKH tiap kecamatan ditentukan berdasarkan rasio yang telah ditetapkan dan didasarkan atas 6 (enam) aspek berikut: 1) kondisi topografi; 2) jumlah desa/kelurahan; 3) jumlah fasilitas pendidikan dan kesehatan; 4) waktu tempuh rata-rata dari

kecamatan ke desa; 5) waktu tempuh rata-rata ke fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan; 6) alat transportasi yang digunakan (Ditjen Linjamsos, 2016a).

Memperjuangkan Hak-Hak KPM

Peserta PKH sebagian besar mempunyai kemampuan yang terbatas dalam memperjuangkan hak-hak yang mereka butuhkan. Pendampingan dilakukan bertujuan untuk membantu mereka mendapatkan hak sebagai peserta PKH dan hak lainnya terkait dengan program-program komplementaritas baik yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Melalui Gambar 3 berikut akan dapat diketahui secara lebih jelas.



Gambar 3.

Pendamping PKH Dibutuhkan untuk Memperjuangkan Hak-Hak KPM

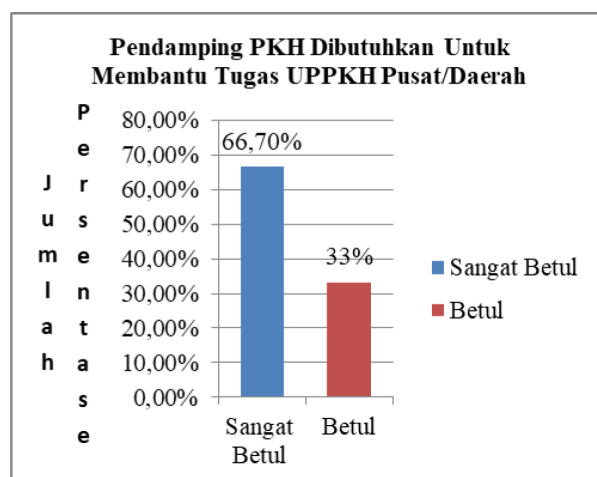
Sumber : Hasil wawancara diolah

Dari Gambar 3 tersebut dapat diketahui bahwa responden sejumlah 66,70 persen mengatakan sangat betul jika pendamping PKH dibutuhkan untuk memperjuangkan hak-hak KPM seperti bantuan pangan non tunai (BPNT), kartu Indonesia sehat (KIS), rumah tidak layak huni (Rutilahu), kelompok usaha bersama (KUBE) dan kartu Indonesia pintar (KIP). Responden sejumlah 23 persen mengatakan betul, dan hanya 10 persen saja yang mengatakan kurang betul. Memperjuangkan hak-hak KPM merupakan tugas pokok pendamping PKH. Pendamping sosial pada program penanganan

kemiskinan dan kelompok rentan memiliki peran yang sangat strategis. Mereka memainkan berbagai peranan penting sebagai ujung tombak yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas Kelompok Penerima Manfaat (KPM), sehingga mereka berdaya untuk mengatasi masalahnya sendiri, dan melaksanakan tugas-tugas kehidupan mereka (Susanty. B, 2018).

Pendamping PKH Membantu Tugas UPPKH Pusat dan Daerah

Pendamping PKH diperlukan untuk membantu tugas-tugas unit pelaksana program keluarga harapan (UPPKH) Pusat/Daerah dalam melakukan identifikasi dan melaporkan segala permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan PKH, serta untuk melakukan tindak lanjut penanganan dan penyelesaian masalah dalam waktu cepat, tugas tersebut merupakan tugas pokok pendamping PKH. Personil UPPKH kecamatan terdiri dari pendamping PKH, jika satu kecamatan terdapat lebih dari satu orang pendamping, maka ditunjuk satu orang sebagai koordinator kecamatan. Melalui Gambar 4 berikut akan dapat diketahui lebih jelas mengenai hal ini.



Gambar 4.

Pendamping PKH Dibutuhkan untuk Membantu Tugas UPPKH Pusat/Daerah

Sumber : Hasil wawancara diolah

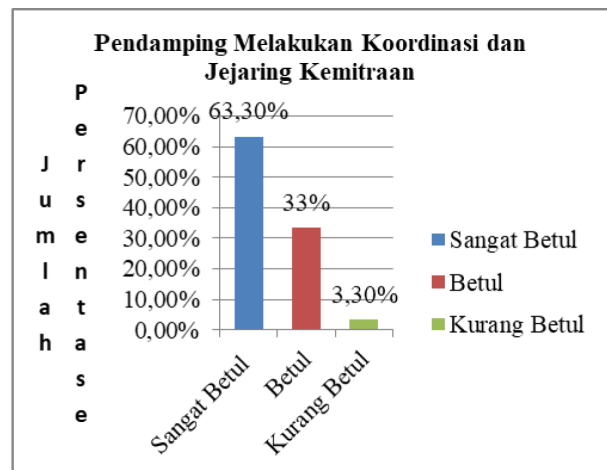
Dari Gambar 4 tersebut dapat diketahui responden sejumlah 66,70 persen mengatakan

sangat betul jika pendamping PKH diperlukan untuk membantu tugas-tugas unit pelaksana program keluarga harapan (UPPKH) di tingkat kecamatan, yang terdiri dari empat belas kecamatan yaitu: Kecamatan Danurejan, Gedong Tengen, Gondomanan, Gondokusuman, Jetis,

Kraton, Kotagede, Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Umbulharjo, dan Kecamatan Wirobrajan. Responden sebagian lagi sejumlah 33 persen mengatakan betul. Tugas pendamping PKH ke UPPKH antara lain melakukan perubahan status KPM dari tidak hamil menjadi hamil, pendidikan anak dari SD ke SMP, perubahan tersebut secara langsung berpengaruh terhadap besar bantuan yang diterima. Tugas UPPKH ke pendamping PKH antara lain menyampaikan jadwal pencarian. Setiap bulan pendamping PKH diwajibkan membuat laporan perkembangan kemajuan pendampingan yang diserahkan ke UPPKH Kabupaten dan UPPKH Kabupaten memasukkan data laporan informasi tersebut pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKH yang terhubung secara *online* dengan UPPKH Pusat sehingga laporan tersebut bisa diakses UPPKH Pusat (Habibullah, 2011).

Pendamping PKH Melakukan Koordinasi dan Jejaring Kemitraan

Pendamping PKH melakukan seluruh tugas-tugas pokok pendamping sesuai ketentuan dan peraturan yang telah ditentukan dalam buku pedoman dan kebijakan program antara lain koordinasi dengan camat, lurah, RW, dan RT terutama untuk menetapkan waktu, menyiapkan fasilitas tempat pertemuan dan sarana yang diperlukan. Melalui Gambar 5 berikut akan dapat diketahui secara lebih jelas.



Gambar 5.

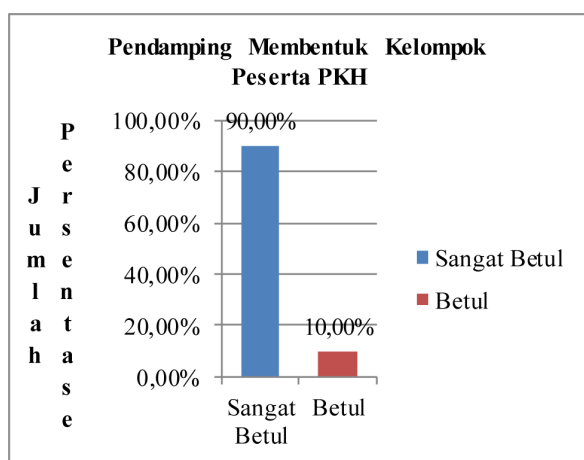
Pendamping PKH Melakukan Koordinasi dan Jejaring Kemitraan

Sumber : Hasil wawancara diolah

Dari Gambar 5 tersebut dapat diketahui bahwa responden terbanyak dengan jumlah 63,30 persen mengatakan sangat betul jika pendamping PKH melakukan koordinasi dengan camat, lurah, RW, dan RT terutama pada saat akan melakukan sosialisasi program dan menentukan jumlah undangan. Pendamping juga diharapkan membangun kemitraan dengan unsur-unsur di luar kelembagaan PKH dan unsur berbasis masyarakat meliputi organisasi sosial, pekerja sosial masyarakat (PSM), tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (TKSK), wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM), karang taruna, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Pada pelaksanaan pendampingan, pendamping sosial juga membangun jejaring/kemitraan dengan berbagai pihak. Jejaring yang dibangun lainnya adalah dengan UPT kesehatan, UPT pendidikan, BNI dan Badan Urusan Logistik (Bulog), dan (*service provider*). Pada setiap program dan kegiatan, termasuk pendampingan sosial jejaring merupakan faktor penting dan menentukan keberhasilan (Harisman. K, 2017).

Pendamping PKH Membentuk Kelompok Peserta PKH

Pendamping PKH juga melakukan tugas-tugas rutin antara lain akan membagi dan membentuk peserta PKH setelah peserta PKH ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Kelompok itu akan beranggotakan 15 hingga 30 orang peserta PKH. Pendamping juga akan memfasilitasi pemilihan ketua kelompok. Melalui grafik berikut akan dapat diketahui lebih jelas mengenai hal ini.



Gambar 6.

Pendamping PKH Membentuk Kelompok Peserta PKH
Sumber : Hasil wawancara diolah

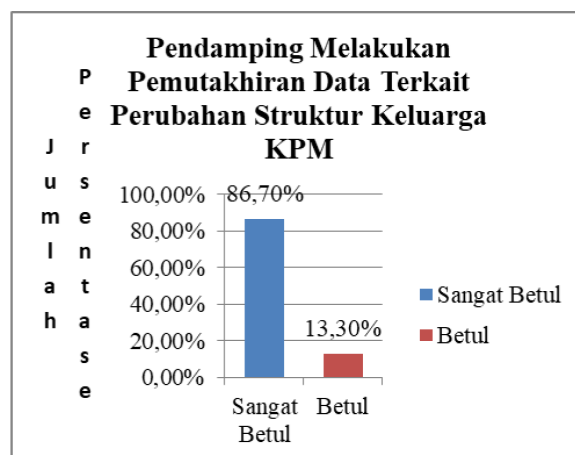
Dari Gambar 6 tersebut dapat diketahui bahwa responden sejumlah 90 persen mengatakan sangat betul jika pendamping PKH membentuk kelompok peserta PKH, dan sebagian kecil responden sejumlah 10 persen mengatakan betul. Pembentukan kelompok peserta PKH ini terdiri dari 15 hingga 30 orang peserta PKH dengan beberapa ketentuan. a) setiap kelompok terdiri dari peserta PKH yang tempat tinggalnya berdekatan; b) setiap kelompok ada ketuanya yang dipilih oleh peserta PKH. Pendamping memfasilitasi untuk pemilihan ketua kelompok.

Sarwono, S. W. (2001) menjelaskan bahwa kelompok dapat dibedakan menjadi kelompok formal dan kelompok non formal. Mengacu pada pendapat ini, sesungguhnya anggota PKH sudah tergabung dalam kelompok formal, sejak PKH

dimulai tahun 2007. Sebagai sesama peserta PKH mereka dikoordinir oleh seorang tenaga pendamping yang ditugaskan oleh penyelenggara program. Mereka merupakan kelompok formal karena terikat dengan berbagai peraturan yang ada pada PKH. Dalam perjalanannya kelompok non formal bisa saja terbentuk sesuai kebutuhan KPM dalam mengembangkan usaha ekonomis produktifnya.

Pendamping Melakukan Pemutakhiran Data KPM

Pendamping melakukan pemutakhiran data yang merupakan tugas rutin apabila ada perubahan struktur keluarga penerima bantuan PKH, baik dari segi penambahan ataupun pengurangan tanggungan maupun perubahan status pendidikan. Mengenai hal ini dapat diketahui pada Gambar 7 berikut ini.



Gambar 7.

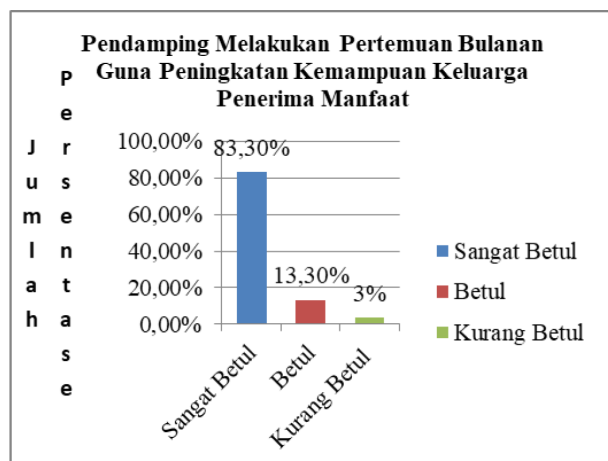
Pendamping Melakukan Pemutakhiran Data Terkait Perubahan Struktur Keluarga KPM
Sumber : Hasil wawancara diolah

Dari Gambar 7 tersebut dapat diketahui bahwa responden sejumlah 86,70 persen mengatakan sangat betul jika pendamping PKH melakukan pemutakhiran data terkait adanya perubahan struktur keluarga KPM, baik itu penambahan atau pengurangan tanggungan maupun perubahan status pendidikan. Hal tersebut merupakan tugas rutin pendamping PKH. Pendamping akan melakukan

pemutakhiran data apabila anak KPM pindah sekolah, pindah alamat, atau kesalahan identitas. Maksud dan tujuan pemutakhiran data adalah untuk memperoleh kondisi terkini anggota KPM PKH. Data tersebut digunakan sebagai data dasar program perlindungan sosial. Khusus PKH, data tersebut digunakan untuk verifikasi, penyaluran dan penghentian bantuan (Kemensos RI, 2019).

Pendamping Melakukan Pertemuan Bulanan Guna Peningkatan Kemampuan Keluarga Penerima Manfaat

Pendamping melakukan pertemuan bulanan dengan KPM, program ini disebut dengan program peningkatan kemampuan keluarga (P2K2), sebuah program yang melekat pada PKH. Program ini memberdayakan KPM dan membantu KPM agar mengerti akan hak dan kewajiban sebagai anggota PKH. Melalui Gambar 8 berikut akan dapat diketahui secara lebih jelas.



Gambar 8.

Pendamping Melakukan Pertemuan Bulanan Guna Peningkatan Kemampuan Keluarga Penerima Manfaat

Sumber : Hasil wawancara diolah

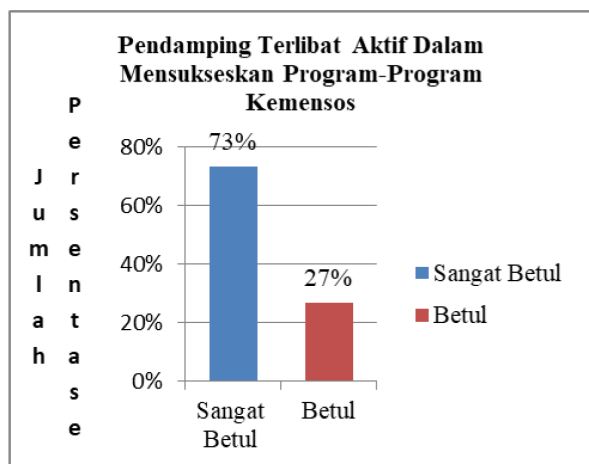
Dari Gambar 8 tersebut dapat diketahui bahwa responden sejumlah 83,30 persen mengatakan sangat betul jika pendamping melakukan pertemuan bulanan dengan seluruh KPM, responden sejumlah 13,3 persen mengatakan betul, dan sisanya sejumlah 3,3

persen mengatakan kurang betul. Pertemuan bulanan ini merupakan tugas pendukung pendamping PKH, yang merupakan program komplementar dari PKH, artinya pertemuan bulanan ini merupakan program melekat pada PKH, yang bertujuan untuk memberdayakan KPM agar meningkatkan kemampuan di bidang usaha ekonomis produktif, agar tidak selalu tergantung pada program dan menghilangkan budaya miskin sehingga bisa mandiri. Pertemuan bulanan ini juga dilakukan guna sosialisasi dan internalisasi program yang diberikan kepada KPM, curah pendapat dan berbagi informasi bagi KPM, menerima keluhan yang menjadi permasalahan yang dihadapi KPM, memberikan motivasi kepada KPM guna meningkatkan kesadaran dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan, menyampaikan evaluasi atas pelaksanaan kewajiban KPM, memberikan wawasan, pengetahuan, keterampilan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian peserta KPM, mendorong peserta KPM untuk melakukan kegiatan produktif yang dapat menghasilkan nilai tambah, seperti kelompok usaha bersama (KUBE). Pertemuan bulanan ini juga telah berhasil meningkatkan pengetahuan KPM terhadap kesehatan bagi ibu hamil dan balita, dan juga kewajiban menyekolahkan anak, karena biasanya keluarga miskin kurang memperhatikan kesehatan dan pendidikan dikarenakan kondisi ekonomi yang tidak memadai. Banyak penelitian yang sudah membuktikan akan keberhasilan program ini (Ariel Fiszbein and Nobert R Schady, 2009). Di Filipina program yang berasal dari World Bank bernama *Conditional Cash Transfer* (CCT) telah terbukti dan efektif meningkatkan dan memberdayakan kesejahteraan keluarga miskin (Jishnu Das Qui, Toando and Benk Ozier, 2005). Keberhasilan program tidak terlepas dari kinerja pendamping yang begitu banyak, termasuk pemberdayaan, maka pengetahuan dan keterampilan pendamping juga perlu untuk ditingkatkan, sehingga pada pertemuan bulanan yang dijadwalkan, pendamping mempunyai

banyak ilmu pengetahuan untuk diajarkan pada KPM.

Pendamping Terlibat Aktif dalam Menyukkseskan Program-program Kemensos

Pendamping PKH terlibat aktif dalam mensukkseskan program-program Kementerian Sosial, karena pada KKS atau kartu kombo yang digunakan KPM untuk mencairkan bantuan sosial PKH tersebut terdapat berbagai macam program pengentasan kemiskinan seperti bantuan pangan non tunai (BPNT), lanjut usia, dan dipastikan setiap penerima BPNT adalah juga sebagai penerima PKH. Melalui Gambar 9 berikut akan dapat diketahui secara lebih jelas.



Gambar 9.

Pendamping PKH Terlibat Aktif dalam Mensukkseskan Program-Program Kemensos
Sumber : Hasil wawancara diolah

Dari Gambar 9 tersebut dapat diketahui bahwa responden sejumlah 73 persen mengatakan sangat betul jika pendamping PKH non tunai terlibat aktif dalam mensukkseskan program-program pengentasan kemiskinan yang berasal dari Kementerian Sosial, sebagian lagi responden sejumlah 27 persen mengatakan betul. Pendamping PKH diharapkan keterlibatannya dalam mensukkseskan program-program pengentasan kemiskinan yang berasal dari Kementerian Sosial. Oleh karenanya dalam rangka pengembangan, maka perlu menjalin komunikasi dan koordinasi serta

membangun kemitraan dengan unsur-unsur di luar kelembagaan PKH (Ditjen Linjamsos, 2016b).

Korelasi antara Kinerja Pendamping dan Keberhasilan Program Keluarga Harapan

Dalam pelaksanaan PKH, pendamping merupakan aktor penting dalam mensukkseskan program PKH. Pendamping PKH adalah sumber daya manusia yang direkrut dan dikontrakkerjakan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana pendampingan di tingkat kecamatan. Korelasi antara pendamping PKH dengan keberhasilan program dapat diketahui melalui Tabel 2 berikut ini yang dianalisa dengan menggunakan *Pearson Correlation*.

Tabel 2.
Korelasi antara Pendamping PKH dan Keberhasilan Program

Korelasi Pendamping PKH dan Keberhasilan Program	Pendamping PKH	Keberhasilan Program
Pendamping PKH Pearson Correlation	1	1.000**
Sig		.000
Keberhasilan Program Pearson Correlation	1**	1
Sig	.000	

** Correlation is significant at the 0.01 level

Terlihat tanda ** yang berarti signifikan. Tingkat kepercayaan korelasi tersebut adalah 99% dengan $\alpha=0,01(1\%)$. Dari tabel tersebut diperoleh *Pearson Correlation* 1 artinya terdapat hubungan yang signifikan antara pendamping PKH dengan keberhasilan program. Hubungan korelasi antara *Independent Variables* (Pendamping PKH) dengan *Dependent Variable* (Keberhasilan Program) sangat kuat yang ditunjukkan dengan nilai korelasi 1**, dengan *P-Value/Sig* sama dengan $000 < 0,05$. Dapat disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara ke dua variable. Tanda ** menunjukkan bahwa korelasi yang terjadi antara *Independent Variables* dengan *Dependent Variable* adalah hubungan yang berbanding

lurus artinya semakin besar peran pendamping PKH akan semakin mendukung keberhasilan program. Dapat disimpulkan bahwa hubungan pendamping PKH dengan keberhasilan program adalah sangat kuat, signifikan dan searah.

Penutup

Kesimpulan. Dari hasil analisa tersebut diketahui bahwa pendamping PKH mempunyai tugas yang sangat berkaitan erat dengan implementasi PKH sehingga dapat dikatakan sebagai ujung tombak keberhasilan program, karena mereka memainkan peranan penting dengan beberapa tugas yang dibebankan. Tugas-tugas tersebut merupakan tugas pokok, rutin dan pendukung. Tugas pokok antara lain memperjuangkan hak-hak peserta PKH seperti bantuan pangan nontunai (BPNT), kartu Indonesia sehat (KIS), kartu Indonesia pintar (KIP) dan rumah tidak layak huni (RTLH). Melakukan koordinasi dengan camat, RW/RT dan menjalin jejaring kemitraan dengan Bulog, BNI, UPTD Kesehatan dan UPTD Pendidikan. Tugas rutin. Tugas rutin di antaranya melakukan pemutakhiran data apabila ada perubahan alamat, pendidikan anak, ibu hamil dan jumlah anak. Tugas pendukung antara lain ikut aktif dalam menyukseskan program-program Kemensos, terutama yang berkaitan dengan PKH seperti P2K2, yang mengharuskan pendamping memiliki ilmu pengetahuan yang memadai untuk memberdayakan KPM terutama di bidang ekonomis produktif.

Rekomendasi. Pendamping PKH membutuhkan pelatihan lanjutan karena begitu banyak tugas yang harus dilaksanakan terutama dalam hal memberdayakan KPM agar bisa mandiri dan tidak tergantung selamanya pada program, maka pendamping perlu dibekali pengetahuan tambahan terutama yang berkaitan dengan usaha ekonomi produktif untuk peningkatan kesejahteraan keluarga. Pelatihan jangan hanya di awal menjelang menjadi pendamping PKH. Pelatihan tersebut terutama yang berkaitan dengan ketrampilan

untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pendamping minimal setahun sekali untuk mengetahui kerja pendamping.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur pertama kami ucapkan Kepada Allah Tuhan Yang Esa karena berkat rahmat dan hidayah yang beliau berikan maka penelitian ini dapat selesai dilaksanakan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Kepala B2P3KS, Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Yogyakarta, Sekretariat UPPKH, Koordinator Pendamping PKH, Operator dan seluruh pendamping PKH yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancara, kami ucapkan terima kasih.

Pustaka Acuan

- Ariel Fiszbein and Norbert Schady. (2009). *Conditional Cash A World Bank Policy Research Report*. The World Bank.
- Bappenas. (2009). *Laporan Akhir Evaluasi Program Perlindungan Sosial: Program Keluarga Harapan 2009*. Bappenas.
- Coudy,D and R.L., Haris. (2001). Evaluating Transfer Programs Within a General Equilibrium Framework'. *Washington, DC, International Food Policy Research Institute, 110*.
- Ditjen Linjamsos. (2016a). *Buku Kerja Pendamping PKH*.
- Ditjen Linjamsos. (2016b). *Buku Kerja Pendamping PKH*.
- Elly Kuntjorowati, Ikawati, Sri Yuni Murtiwiidayantii, Tri Laksmi Udiati. (2019). Conditional Cash Transfer Breaks the Chain of Poverty for Next Generation. *International Journal of Humanities and Social Science, Vol 3 No 9 2019*. <https://doi.org/doi:10.30845/ijhss.v9n3p16>
- Gertler, P. (2004). Do conditional cash transfers improve child health? Evidence from PROGRESA's control randomized experiment'. *American Economic Review*.
- Habibulah. (2011). Peran Pendamping Pada Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Karawang. *Informas, 16*.
- Harisman.K. (2017). Pola Kemitraan Antara Petani Dengan PT Indofood FrytoLay Makmur Pada Usahatani Kentang Industri Varietas Atlantik (Suatu Kasus Di Desa Cigedug Kecamatan Cigedug

- Kabupaten Garut). *Jurnal Istek Sunan Gunung Jati, Vol X No 1*.
- Hoddinot, J., E. Skoufias. (2004). The Impact of PROGRESA on Food Consumption. *Economic Development and Cultural*.
- Jishnu Das Qui, Toando and Benk Ozier. (2005). *World Bank Research Observer. Vol 20 No 1 March 2005*. <https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1093/wbro/lki005>
- Kemensos RI. (2017). *Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*. Ditjen Linjamsos.
- Kemensos RI. (2019). *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2019*. Ditjen Linjamsos.
- Kemnterian Sosial , Ditjen Linjamsos. (2016). *(1) BUKU KERJA PENDAMPING DAN OPERATOR PKH | eka wardana—Academia.edu*. https://www.academia.edu/28297357/BUKU_KERJA_PENDAMPING_DAN_OPERATOR_PKH
- Pemerintah Indonesia. (2003). *Undang-undang N0 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Ravik Karsidi. (2007). *Sosiologi Pendidikan*. LPP UNS dan UNS Press.
- Sanafiah Faisal. (2007). *Format-format Penelitian Sosial*. Raja Grafindo.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (n.d.). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Rev VI)*. P.T. Rineka Cipta.
- Susantyo. B. (2018). *Optimalisasi Peran Pendamping Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*. Puslitbang Kesos.

Studi Eksplorasi : Analisis Faktor Pendorong Ibu dari Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Program Keluarga Harapan dalam Mencapai Graduasi Mandiri

Exploration Study: Analysis of Supporting Factors of Mothers from Beneficiary Families of the Hope Family Program in Achieving Independent Graduation

Ikhwanul Ihsan Armalid¹, Eka Riyanti Purboningsih², Tiara Ratih Widiastuti³, dan Retno Hanggarani Ninin⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Psikologi, Universitas Padjajaran

Jl. Raya Bandung Sumedang No.KM 21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, Indonesia

Email : ikhwanul18001@mail.unpad.ac.id; HP : +628986059819

Naskah diterima 30 April 2020, direvisi 24 Agustus 2020, disetujui 5 Oktober 2020

Abstract

The government has created a poverty alleviation program through empowerment and assistance to Beneficiary Families (KPM) with the Family Hope Program (PKH) since 2007. According to BPS, this program has become an effective program in reducing poverty. There were several mothers from Beneficiary Families (KPM) who managed to get out of poverty and stopped getting assistance from PKH (Independent Graduation). This type of research was qualitative and an exploratory study. This study aimed to determine the factors that influenced mothers of KPM who received assistance from PKH in order to achieve independent graduation or left PKH membership. The research was conducted by carrying out in-depth interviews with mothers from KPM PKH recipients who managed to achieve independent graduation because they felt economically prosperous. The research was conducted in West Bandung Regency which involved six respondents consisting of three KPM mothers who had not received PKH assistance and involved three PKH assistants who accompanied KPM who had achieved independent PKH Graduation. Data was analyzed by using content analysis. The results showed that there were internal and external factors that caused mothers from KPM to be able to leave PKH assistance. Internal factors that influenced them to leave PKH were self-awareness, shame, trust and motivation to have a thriving business. External factors that caused them to leave PKH were due to social support from their families and PKH assistants.

Keywords: poverty; program keluarga harapan (hoped family program); social welfare; exploratory study

Abstrak

Pemerintah sudah membuat program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan dan pendampingan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2007. Menurut BPS, program ini menjadi program yang efektif dalam mengurangi angka kemiskinan. Terdapat beberapa ibu dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berhasil keluar dari kemiskinan dan berhenti mendapatkan bantuan dari PKH (Graduasi Mandiri). Jenis penelitian ini kualitatif dan merupakan studi eksploratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi para ibu dari KPM yang mendapat bantuan PKH agar dapat mencapai graduasi mandiri atau keluar dari kepesertaan PKH. Penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam kepada ibu-ibu dari KPM penerima PKH yang berhasil mencapai graduasi mandiri karena sudah merasa sejahtera secara ekonomi. Penelitian dilakukan di Kabupaten Bandung Barat melibatkan enam responden terdiri dari tiga orang ibu KPM yang sudah tidak mendapatkan bantuan PKH dan melibatkan tiga orang pendamping PKH yang mendampingi KPM yang telah mencapai PKH Graduasi mandiri. Data dianalisa dengan menggunakan analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan terdapat faktor internal dan eksternal yang menyebabkan ibu-ibu dari KPM mampu keluar dari bantuan PKH. Faktor internal yang mempengaruhi mereka keluar dari PKH adalah kesadaran diri, perasaan malu, kepercayaan dan motivasi untuk memiliki usaha yang maju. Faktor eksternal yang menyebabkan mereka keluar dari PKH karena ada dukungan sosial dari keluarga dan pendamping PKH.

Kata Kunci: kemiskinan; program keluarga harapan; kesejahteraan sosial; studi eksplorasi

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia. Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang atau keluarga tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya (Pemerintah Indonesia, 2003).

Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikategorikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, kelompok, maupun keluarga sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain (Rustanto, 2015). Kemiskinan merupakan sebuah masalah bagaimana membangkitkan perasaan mampu mengatasi hidup dikalangan orang miskin dengan cara yang bermartabat dan menjaga harga diri. (Markum, 2015). Kemiskinan bukan semata persoalan ekonomi, dikarenakan bersamaan dengan terjadinya kemiskinan muncul pula persoalan pada bidang lain seperti sosial, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Pada bidang kesehatan, persoalan yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik namun juga psikologis (Liputo, 2014).

Di Indonesia kemiskinan masih menjadi permasalahan yang belum dapat dipecahkan oleh pemerintah. Menurut data BPS pada Maret 2018 presentase penduduk miskin cenderung mengalami penurunan dari 10,12 persen menjadi 9,82 persen (BPS, 2018) (Gambar 1). Terdapat beberapa faktor utama penyebab turunnya persentase kemiskinan di Indonesia. Salah satunya adalah program bantuan dari pemerintah, berupa beras untuk rakyat sejahtera (Rastra) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang berdampak positif terhadap menurunkan jumlah penduduk miskin (Kementerian Sosial, 2018). Dengan berkurangnya angka kemiskinan, bantuan untuk keluarga miskin pun bertambah. Pada tahun 2019, anggaran bantuan untuk PKH ditambah yang pada awalnya

19 triliun menjadi 34,4 triliun per tahun. Dengan penambahan bantuan diharapkan akan mempercepat pengentasan kemiskinan dan lebih banyak keluarga miskin yang keluar dari kemiskinan.

PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan. Bantuan sosial yang diberikan adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya sebagai pelengkap Bantuan Sosial PKH (Kementerian Sosial, 2018). Tujuan dari PKH adalah untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Selain itu yang terpenting adalah menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (Kementerian Sosial, 2018).

Program keluarga harapan ini berfokus kepada ibu dari keluarga miskin. Dalam program PKH ibu menjadi seorang pengurus. Ibu yang menerima bantuan sosial berupa materi dan informasi pengetahuan tentang bagaimana cara mencapai keluarga yang sejahtera. Kesejahteraan keluarga dapat terwujud dengan adanya sistem manajemen yang baik serta berjalannya fungsi dan peran masing-masing anggota keluarga (Alie, 2015). Peran suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga harus berjalan beriringan (Hanum, 2017). Ibu dipilih menjadi pengurus dalam program PKH karena ibu memiliki peran yang lebih dalam mengurus rumah tangga ketimbang ayah. Diharapkan ibu yang menjadi pengurus dapat mengelola keluarga menjadi keluarga yang sejahtera.

Secara statistik, angka kemiskinan menurun dan banyak keluarga miskin yang dapat meraih kesejahteraan ekonomi dengan program keluarga harapan. Namun, kenyataan di lapangan masih banyak keluarga miskin yang belum mencapai kesejahteraan ekonomi. Banyak keluarga miskin yang sudah bertahun-tahun mendapatkan bantuan PKH namun belum ada perubahan yang berarti. Hal ini menjadi

sebuah pertanyaan mengapa ada keluarga yang dapat berhasil keluar dari kemiskinan dan ada yang tidak.

Beberapa penelitian pernah dilakukan untuk mencari tahu alasan seseorang dapat berhasil keluar dari kemiskinan. Sebuah penelitian di Filipina yang meneliti tentang apa yang membedakan orang berhasil keluar dari kemiskinan dengan yang tidak berhasil. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa mereka yang menjadi kaya lebih sering menggambarkan diri secara positif dan mengungkapkan impian mereka untuk diri mereka sendiri. Mereka biasanya menghadapi kesulitan dengan meminta bantuan, mengandalkan orang lain, dan bertahan melalui pekerjaan atau pendidikan meskipun ada banyak kesulitan. Sedangkan mereka yang tetap miskin, orang-orang yang tumbuh dalam keluarga miskin dan tetap miskin umumnya bertahan dan mengandalkan bantuan dan pertimbangan orang lain. Mereka biasanya merasa berhutang budi kepada orang-orang yang membantu mereka dan biasanya melepaskan serta mengandalkan Tuhan untuk nasib mereka. Hanya sesekali mereka menyebutkan mengandalkan keberuntungan. Peserta yang tetap miskin umumnya menekan kebutuhan untuk bertahan (*magpunyagi*); bekerja keras setiap hari; penghematan; dan sabar, banyak akal, dan toleran terhadap keadaan yang sulit (Tuason, 2011).

Di Indonesia belum banyak penelitian yang meneliti tentang alasan seseorang dapat keluar dari kemiskinan. Belum diketahui secara pasti faktor apa yang menyebabkan seseorang dapat keluar dari kemiskinan. Terutama pada orang-orang yang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah, salah satunya PKH. Alasan seseorang dapat keluar dari kemiskinan penting untuk diteliti agar dapat mempercepat proses pengentasan kemiskinan di Indonesia. Hal inilah yang mendasari penelitian ini perlu dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi ibu dari keluarga miskin penerima program PKH agar keluar dari kepesertaan atau graduasi mandiri.



Gambar 1.
Profil Kemiskinan di Indonesia, Maret 2018
Sumber: (BPS, 2018)

Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain penelitian studi eksploratif. Penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (John W. Creswell, 2009). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh keluarga miskin penerima manfaat PKH yang berada di Kabupaten Bandung Barat dan pendamping PKH-nya yakni berjumlah sekitar 73.775 keluarga dan 262 pendamping PKH. Bandung Barat dipilih menjadi lokasi penelitian karena Bandung Barat merupakan salah satu kabupaten dengan tingkat kemiskinan cukup tinggi di Jawa Barat. Berdasarkan data BPS tahun 2018 Kabupaten Bandung Barat termasuk ke dalam lima kabupaten/kota dengan persentase kemiskinan tertinggi yakni memiliki 10,06 persen penduduk miskin. (BPS, 2018). Selain itu, tujuan dari dipilihnya kabupaten ini agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dari program PKH yang ada di Kabupaten Bandung Barat itu sendiri.

Berdasarkan populasi tersebut peneliti akan memfokuskan penelitian kepada ibu dari

keluarga miskin penerima bantuan PKH yang sudah tidak menerima bantuan PKH karena sudah mandiri dan dapat dikatakan sejahtera secara ekonomis serta pendamping PKH. Terdapat 56 orang ibu dari keluarga miskin yang mundur dari kepesertaan PKH atas keinginan sendiri. Dari 56 ibu tersebut akan dijangkau beberapa ibu yang sudah mundur dari kepesertaan PKH dan pendampingnya. Pengambilan data dilakukan baik kepada ibu dari keluarga miskin maupun pendamping PKH. Hal ini dilakukan sebagai triangulasi data.

Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, yakni dengan pertimbangan dan karakteristik sebagai berikut: 1) Ibu dari KPM bantuan PKH yang sudah mendapatkan bantuan PKH selama minimal satu tahun; 2) sudah tidak mendapatkan bantuan PKH karena sudah merasa sejahtera; dan 3) berusia >18 tahun, sudah atau pernah menikah dan masih memiliki tanggungan anak yang harus dibiayai minimal satu orang anak.

Sedangkan untuk pendamping PKH kriterianya sebagai berikut: 1) Pendamping PKH-selama minimal satu tahun; 2) memiliki dampingan keluarga yang sudah keluar dari PKH secara mandiri dan tidak mendapatkan bantuan PKH lagi.

Pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam. Wawancara dilakukan menggunakan pedoman wawancara yang dibuat oleh peneliti yang sudah melalui proses review oleh *expert reviewer*. Beberapa pertanyaan yang ada dalam pedoman wawancara seperti bagaimana kondisi sebelum, saat dan sesudah mendapatkan bantuan, kemudian hal apa yang menyebabkan ibu memutuskan untuk berhenti mendapatkan bantuan serta siapa saja yang berperan dalam membantu ibu untuk keluar dari kemiskinan. Pertanyaan ditujukan kepada ibu dari keluarga miskin dan pendamping PKH. Kemudian, untuk pendamping terdapat beberapa pertanyaan tambahan seperti apa yang

membedakan ibu yang sudah keluar dari PKH dengan yang belum keluar dari PKH, serta hal apa saja yang sudah anda berikan kepada ibu tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui lebih mendalam tentang faktor pendorong ibu keluar dari PKH yang tidak dapat dilihat dari sudut pandang ibu tersebut dan dapat diketahui dari sudut pandang pendamping. Wawancara untuk ibu dari keluarga miskin yang keluar dari PKH dilakukan di rumah ibu tersebut, sedangkan wawancara pendamping dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat.

Analisis data menggunakan analisis konten konvensional yakni metode analisis yang pengkodean kategorinya diturunkan secara langsung dari data (Hsieh & Shannon, 2005). Dalam penelitian ini digunakan pendekatan induktif dimana analisis konten ini digunakan dalam kasus di mana tidak ada studi yang berhubungan dengan fenomena (Elo & Kyngäs, 2008).

Tabel 1.
Proses Analisis Data dalam Analisis Konten Kualitatif

Persiapan	Memilih unit analisis, memutuskan analisis konten
Pengorganisasian	Pengkodean terbuka dan membuat kategori, mengelompokkan kode, merumuskan deskripsi umum topik penelitian melalui pembuatan kategori dan subkategori sebagai abstrak.
Pelaporan	Pelaporan proses analisis dan hasil melalui kategori konseptual, dan alur cerita

Sumber: (Vaismoradi, Turunen, & Bondas, 2013)

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian dan wawancara kepada informan menghasilkan beberapa temuan. Temuan ini dihasilkan dari wawancara kepada tiga orang ibu penerima bantuan PKH yang sudah keluar dari kepesertaan PKH (Tabel 2) dan tiga orang pendamping PKH yang mendampingi ibu tersebut selama menjadi penerima bantuan PKH (Tabel 3).

Tabel 2.
Data Demografi Ibu Penerima PKH

	Ibu E	Ibu H	Ibu S
Usia	45	35	47
Pekerjaan	wiraswasta	Ibu rumah tangga	Buruh harian
Status Pernikahan	menikah	menikah	Menikah
Jumlah tanggungan	2	3	1
Lama menerima PKH	7 tahun	7 tahun	7 tahun

Ketiga ibu KPM ini dipilih menjadi informan karena mereka secara pribadi mengajukan diri untuk keluar dari kepesertaan PKH atau graduasi mandiri. Sedangkan ketiga pendamping PKH dipilih menjadi informan karena merekalah yang mendampingi ibu KPM ini dalam mencapai graduasi mandiri.

Tabel 3.
Data Demografi Pendamping PKH

	Pdp I	Pdp N	Pdp L
Usia	24	25	30
Jenis Kelamin	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
Jumlah dampingan	182	187	235
Lama Mendampingi	1.5 tahun	1.5 tahun	1.5 tahun

Hasil temuan penelitian kemudian dianalisis berdasarkan hasil wawancara menggunakan analisis konten, seperti yang disampaikan pada subbab metode penelitian. Beberapa hasil temuan ini di antaranya adalah terdapat faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang dirasakan oleh ibu yang berpengaruh dalam mencapai kesejahteraannya. Sedangkan, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari orang lain diluar diri ibu penerima manfaat bantuan PKH, dalam hal ini adalah pendamping PKH. Untuk lebih jelasnya faktor internal dan eksternal yang ditemukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel analisis. (Tabel 4).

Tabel 4.
Faktor Internal dan Eksternal

Internal	Eksternal
Kesadaran diri	Dukungan sosial pendamping
Malu	Dukungan sosial keluarga
Kepercayaan	
Motivasi usaha	

Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri ibu penerima manfaat PKH. Faktor ini mendorong ibu tersebut untuk keluar dari PKH. Dari hasil wawancara dengan ibu penerima manfaat PKH yang sudah keluar dari PKH ditemukan empat faktor yang mendorong mereka keluar dari PKH, yakni kesadaran diri, perasaan malu, motivasi memiliki usaha dan kepercayaan.

Kesadaran Diri

Kesadaran diri merupakan salah satu faktor internal yang menyebabkan ibu penerima bantuan PKH melakukan graduasi mandiri. Kesadaran diri ini merujuk pada kesadaran akan kondisinya sekarang khususnya kondisi ekonomi keluarga. Salah satu KPM graduasi mandiri yang memiliki faktor ini adalah ibu E.

Ibu E merasa sadar diri dengan kondisinya yang sudah memiliki usaha sehingga mengalami peningkatan ekonomi. Dari kesadaran diri itu timbul perasaan malu dan perasaan tidak enak. Malu karena merasa sudah mampu tercukupi kebutuhannya tetapi masih mendapatkan bantuan dari pemerintah. Seperti yang disampaikan oleh ibu E.

“Ya, karena sekarang sudah punya usaha terus saya melihat kebawah ternyata masih banyak yang lebih membutuhkan daripada saya, masa’ saya dapet bantuan terus sudah cukup lah sadar diri.” (E:33)

Pernyataan yang disampaikan Ibu E, menunjukkan kondisinya sekarang sudah memiliki usaha membuatnya sadar bahwa dengan memiliki usaha maka sudah tidak layak mendapatkan bantuan dari pemerintah lagi. Ketika ditanya lebih lanjut, untuk mendapatkan jawaban yang meyakinkan beliau menjawab seperti berikut.

“Ya kemauan sendiri saja ngga ada dorongan atau paksaan dari orang lain.” (E:28)

Hal ini juga didukung dengan pernyataan dari pendamping I selaku pendamping Ibu E,

ia menjelaskan bahwa memang ada kesadaran diri dari Ibu E untuk keluar dari bantuan PKH, seperti pada ungkapannya berikut.

“Ibu E ini adalah ibu yang baik, beliau sadar akan kondisinya, beliau peka terhadap lingkungannya, dia orang yang percaya diri bahwa rezeki tidak akan habis jika dibagikan dan percaya bahwa rezeki itu datang dari mana saja.” (I: 33-34)

Pendamping I kemudian ditanyakan lebih dalam tentang apa yang menjadi alasan paling kuat dari ibu-ibu yang ia dampingi untuk graduasi mandiri. Pendamping I menyebutkan bahwa kesadaran diri dan munculnya perasaan malu menjadi alasan graduasi mandiri, seperti yang diungkapkannya sebagai berikut.

“Ya, kalo menurut saya sih mereka sadar dan malu akan kondisi mereka sekarang, sadar karena sudah punya warung yang cukup besar, dan malu baik malu terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain.” (I: 33-34)

Dari penuturan di atas diketahui bahwa faktor yang mendorong Ibu E untuk keluar dari PKH adalah adanya kesadaran diri dari mereka. Ia sudah merasa cukup dalam memenuhi kebutuhan dan tidak berhak lagi mendapatkan bantuan. Faktor kesadaran diri ini memunculkan faktor lain dalam diri KPM graduasi mandiri, beberapa di antaranya adalah munculnya perasaan malu, tidak enak atau tenggang rasa karena merasa orang lain masih banyak yang lebih membutuhkan bantuan ketimbang dirinya.

Perasaan Malu dan Tidak Enak

Perasaan malu yang dirasakan oleh ibu penerima bantuan PKH menjadi faktor pendorong lain bagi ibu penerima bantuan PKH untuk graduasi mandiri. Perasaan malu ini muncul karena diawali dengan kesadaran diri. Kesadaran diri akan kondisi keluarga mereka yang sudah dikatakan mampu menimbulkan perasaan malu. Mereka malu karena dinilai mampu oleh orang lain tetapi masih saja mendapatkan bantuan. Selain perasaan malu,

timbul juga perasaan tidak enak terhadap tetangga atau keluarga lain yang membutuhkan bantuan tetapi tidak mendapatkannya. Hal ini dirasakan oleh Ibu SKPM graduasi mandiri. Ibu S menuturkan bahwa salah satu alasan graduasi mandiri karena malu dengan kondisinya yang dikatakan orang lain sudah mampu, dan tidak enak dengan keluarga lain yang kondisinya dibawah keluarga ibu S. Ia mengungkapkannya seperti berikut ini.

“Apa ya? paling itu sih, saya jadi merasa tidak enak sama tetangga, malu karena ada yang lebih membutuhkan dari saya.” (S:32)

Menurut Ibu S, ia merasa malu setelah mendengar tetangganya ada yang membicarakan kondisinya. Hal ini ia ungkapkan dalam pernyataan berikut.

“Ya, adalah bisik-bisik tetangga, biasa yang iri, saya dapet PKH dia tidak begitu, ya dari situ muncul perasaan malu juga ada yang lebih kurang mampu dibanding saya.” (S:26-28)

Perasaan malu yang dirasa Ibu S memunculkan juga perasaan tidak enak atau tenggang rasa di dalam dirinya. Perasaan ini muncul karena Ibu S merasa masih banyak yang lebih membutuhkan bantuan dibanding dirinya. Hal ini ia ungkapkan sebagai berikut.

“Ya jadi kadang kadang kalo pas dapet merasa gimanaaa gitu yah ga enak ada yang lebih membutuhkan.” (S:26-28)

Ketika Ibu S ditanyakan lebih lanjut tentang motivasinya graduasi mandiri untuk memperkuat jawaban yang sudah ia berikan, karena merasa ada yang lebih membutuhkan bantuan dibandingkan keluarganya, seperti yang ia sampaikan berikut.

“Kalo itu, ya motivasinya karena ada yang lebih membutuhkan kalo dibilang saya sudah mampu? ya... tapi kan kebutuhan itu selalu ada, tap[i kan ada yang lebih membutuhkan. Jadi saya merasa tidak enak.” (S:46-47)

Hal ini diperkuat lagi dengan apa yang disampaikan oleh suami dari Ibu S yang merasa

malu dengan kondisinya yang sudah mampu tetapi masih mendapatkan bantuan, yang disampaikannya sebagai berikut.

“Dari suami juga begitu merasa malu karena ada yang lebih membutuhkan.” (S:33)

Selain Ibu S, perasaan malu ini juga dirasakan oleh Ibu E. Ibu E yang sudah memiliki usaha warung merasa malu karena ia memiliki usaha yang dapat memenuhi kebutuhannya tetapi masih mendapatkan bantuan. Ibu E menyampaikannya sebagai berikut.

“Saya lihat di sekitar saya masih banyak yang lebih membutuhkan daripada saya, masa saya dapat bantuan terus? Malu..” (E:33-34)

Dari pernyataan Ibu E tentang kondisi ketika ibu E mendapatkan bantuan dengan kondisi ibu E setelah graduasi mandiri, kembali ibu E menjawab bahwa ada perasaan malu memutuskan untuk graduasi mandiri, seperti yang ia sampaikan berikut.

“Yah, mending sekarang ya dulu kan saya merasakan gimana dapat bantuan ga enak karena masih banyak yang lebih membutuhkan dari saya, sekarang lebih nyaman, ya malu sama yang lain karena lebih banyak yang membutuhkan.” (E:41-43)

Ibu E merasa malu karena melihat masih banyak yang lebih membutuhkan. Perasaan malu yang muncul di dalam diri ibu E pun dirasakan oleh pendamping I. Pendamping I menyampaikan bahwa memang ibu E ini memiliki kesadaran diri dan perasaan malu yang membuatnya memutuskan untuk graduasi mandiri. Pendamping I menyampaikannya sebagai berikut.

“Ya kalo menurut saya sih mereka sadar dan malu akan kondisi mereka sekarang, sadar karna sudah punya warung yang cukup besar, dan malu baik malu terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain.” (I:33-34)

Pendamping I memberikan pernyataan tambahan untuk memperkuat pernyataannya. Pernyataan tambahan ini memperkuat alasan

mengapa faktor kesadaran diri dan perasaan malu menjadi faktor internal utama mengapa KPM melakukan graduasi mandiri. Hal tersebut ia ungkapkan dalam pernyataan berikut.

“Yang menjadi poin penting adalah dia sendiri sadar akan kondisinya, karna diluar sana juga banyak KPM yang sebenarnya sudah tidak layak mendapatkan bantuan PKH dilihat dari ekonominya tapi mereka tidak ingin melakukan graduasi mandiri.” (I:38-39)

Menurut pendamping I, faktor internal penting yang menyebabkan KPM melakukan graduasi mandiri adalah adanya kesadaran diri dan perasaan malu, karena tidak semua KPM memiliki hal tersebut. Banyak KPM yang sudah mampu tidak memiliki hal itu, mereka tidak mengajukan diri untuk graduasi mandiri dan ingin terus mendapatkan bantuan.

Motivasi Usaha

Faktor internal lain yang mempengaruhi Ibu penerima bantuan PKH mencapai graduasi selain kesadaran diri adalah motivasi. Motivasi yang dimiliki oleh KPM graduasi mandiri adalah motivasi memiliki usaha untuk menunjang kebutuhan mereka. Salah satu KPM yang memiliki motivasi berusaha adalah Ibu M. Ibu M merasa bahwa faktor yang mendorongnya keluar dari bantuan PKH adalah motivasi ingin mandiri secara ekonomi dengan menjalankan usaha konveks yang dilakukan bersama dengan pendamping PKH. Ibu M mengungkapkan alasan keluar dari PKH adalah membutuhkan bantuan.

“Ya saya ingin punya usaha dan mandiri, kan sekarang sama pendamping juga usaha konveksi inginnya nanti usahanya dapat berkembang.” (M :30-31)

Selain itu, dilihat dari sudut pandang pendamping, diketahui bahwa ibu M pun memiliki motivasi untuk usaha itu. Pendamping L menambahkan faktor yang mendorong ibu M keluar dari PKH adalah semangatnya untuk memiliki usaha, seperti yang disampaikannya dalam kutipan berikut.

“Saya melihat ibu ini punya semangat untuk punya usaha, ya sebagai pendampingnya saya dukung dia, saya ajak kerja samamerintis usaha konveksi, saya yakinkan usaha ini bisa maju dan ibu bisa mandiri.” (L: 39)

Pada kasus lain, terdapat KPM graduasi mandiri yang juga memiliki motivasi usaha yaitu ibu E. Dalam kasus ibu E meskipun beliau tidak mengungkapkan bahwa ia memiliki motivasi untuk mengembangkan usahanya. Pendamping I menuturkan bahwa Ibu E memiliki kegigihan dan semangat sebagai motivasi untuk mengembangkan usaha yang sudah dimilikinya seperti yang dia sampaikan berikut.

“Beliau ini orangnya gigih, semangatnya pada peluang usaha tinggi, ada usaha apapun dia manfaatkan, saya tahu awalnya warungnya hanya kecil, sekarang warungnya sudah jadi warung kelontong yang lumayan lah, di warungnya dijual es krim, air isi ulang, bahkan sekarang jadi agen bank juga.” (I : 29)

Selain Ibu E dan Ibu M, motivasi akan memiliki usahapun dimiliki oleh Ibu S, seperti yang dituturkannya ketika peneliti bertanya tentang harapannya kedepan, berikut ini adalah jawabannya.

“Kalo dapet bantuan modal saya mau nerusin usaha jualan sendal, dulu kan sempat jualan sendal dari Tasik, tapi setelah punya anak berhenti dulu, ya sekarang dengan sudah berhenti dari PKH inginnya sih usaha jualan lagi, biar ada kegiatan juga karena di rumah ngga ada kegiatan.” (S:52)

Sayangnya motivasi dari Ibu S ini belum didukung penuh oleh pendampingnya. Pendamping N menyatakan hanya memberikan apa yang menjadi hak dari ibu penerima manfaat tidak lebih dari itu.

“Cuma memastikan apa yang menjadi hak ibu-ibu KPM sudah diterima aja, seperti uang dan beras, tidak ada lagi yang saya berikan.” (N:16)

Berdasarkan penuturan pendamping N, ditemukan bahwa faktor internal pendorong ibu penerima PKH keluar dari kepesertaan PKH adalah adanya motivasi untuk memiliki atau mengembangkan usaha. Namun, tidak semua KPM graduasi mandiri dapat mewujudkan motivasi mereka karena belum ada dukungan yang maksimal dari pendamping PKH.

Kepercayaan

Kepercayaan menjadi faktor internal lainnya yang mendorong ibu KPM PKH untuk melakukan graduasi mandiri. Kepercayaan ini adalah kepercayaan kepada Tuhan, bahwa Tuhan telah mengatur hidup seluruh manusia dengan rezekinya masing-masing. Kepercayaan dirasakan oleh Ibu E, hal ini dituturkan oleh ibu E dalam kutipan wawancara berikut.

“Yah keluar juga engga apa apa percaya we da rezeki mah dari mana aja.” (E : 34-35)

Pernyataan Ibu E menunjukkan kepercayaannya bahwa rezeki sudah ada yang mengatur dan dapat datang dari mana saja tidak hanya dari bantuan PKH. Senada dengan yang disampaikan oleh ibu E, Ibu S dan suaminya pun percaya bahwa rezeki sudah ada yang mengatur seperti pada pernyataannya berikut.

“Iya saya sama suami percaya saja rezeki, jodoh, hidup, mati, takdir semua ada yang mengatur.” (S:36)

Ibu M pun memiliki kepercayaan seperti ibu E dan ibu S. Namun ibu M memiliki kepercayaan yang sedikit berbeda dengan Ibu E dan Ibu S. Ibu M memiliki kepercayaan atau keyakinan terhadap keputusannya keluar dari KPM PKH dan menjalankan usahanya akan menjadikan hidupnya lebih baik. Pernyataan ini ia sampaikan seperti berikut.

“Bismillah aja lahaula keluar dari PKH yakin bisa jadi lebih baik lagi dengan saya usaha.” (M:29)

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut ditemukan bahwa semua ibu yang

sudah graduasi mandiri memiliki kepercayaan, baik kepercayaan terhadap Tuhan maupun kepercayaan diri terhadap apa yang ia putuskan dan ia jalani akan menjadikannya lebih baik lagi. Dalam penelitian ini peneliti menemukan empat faktor internal utama yang menyebabkan ibu dari KPM PKH memutuskan untuk melakukan graduasi mandiri yakni, kesadaran diri, malu, motivasi dan kepercayaan. Keempat faktor ini dinilai penting dan menjadi faktor penentu dari ibu KPM PKH melakukan graduasi mandiri. Dari hasil wawancara diketahui jika ibu KPM PKH memiliki faktor tersebut besar kemungkinan akan graduasi mandiri. Berdasarkan informasi banyak KPM PKH yang sudah mampu dan dapat dikatakan sudah tidak layak mendapatkan bantuan PKH tidak kunjung graduasi mandiri karena tidak memiliki faktor-faktor tersebut.

Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Dalam hal ini, faktor eksternal berarti faktor yang berasal dari luar diri KPM PKH yang melakukan graduasi mandiri. Faktor eksternal yang ditemukan pada penelitian ini berasal dari pendamping PKH dan keluarga. Faktor eksternal yang mendorong Ibu KPM PKH graduasi mandiri adalah adanya dukungan sosial dari pendamping dan dari anggota keluarganya. Dukungan sosial yang dirasa didapatkan oleh ibu KPM adalah dukungan materi, informasi dan dukungan emosional.

Dukungan sosial pendamping

Dukungan sosial dapat berupa dukungan emosional, informasional dan materi. Dukungan sosial yang diberikan oleh pendamping kepada ibu KPM PKH menjadi salah satu faktor eksternal yang mendorong ibu penerima PKH untuk keluar dari kepesertaan PKH. Tidak hanya memberikan apa yang menjadi hak dari ibu penerima PKH yakni materi berupa bantuan uang tunai dan informasional berupa modul tentang bagaimana menjadi keluarga yang sejahtera tetapi, pendamping juga memberikan

dukungan lain, seperti dukungan emosional berupa motivasi untuk dapat mandiri dan keluar dari bantuan PKH. Seperti yang dituturkan oleh pendamping I ketika ditanyakan perihal apa saja yang sudah diberikan kepada KPM PKH dampungnya. Ia menjawab bahwa ia memberikan dukungan sosial kepada Ibu E seperti pada pernyataannya.

“Ya saya sebagai pendamping memfasilitasi ibu untuk mendapatkan haknya seperti uang bantuan PKH, beras, KIS, KIP, pokoknya segala macam bantuan, selain itu juga pernah ngasih modal KUBE buat modal Ibu E sama ibu-ibu yang lain untuk usaha warungnya tapi ibu ibu yang lain kurang motivasi banyaknya pengen instan usaha langsung sukses, beda sama Ibu E, dia gigih dan motivasi untuk usahanya tinggi.” (I:22-23)

Pernyataan pendamping I juga didukung oleh apa yang disampaikan oleh Ibu E ketika peneliti menanyakan apa saja yang didapatkan oleh ibu ketika menjadi penerima bantuan PKH, beliau menyampaikannya dalam pernyataan berikut.

“Alhamdulillah KIS dapat sama KIP sama KKS sama ya bantuan uang tunai. Dapat lagi BPNT. Oh ya karena bimbingan pendamping, memberi masukan ke saya ya terima kasih kepada pendamping yang sudah menggoal kan saya untuk jadi KPM graduasi mandiri.” (E:13)

Sama seperti yang terjadi pada ibu E dan pendamping I, dukungan sosial juga diberikan oleh pendamping L kepada ibu M. Pernyataan pendamping L bahwa ia memberi dukungan sosial kepada ibu M disampaikannya pada kutipan berikut.

“Selain memberi bantuan PKH saya juga memberi kesempatan ke ibu M untuk usaha sama saya, kebetulan saya juga sedang merintis usaha baru, dan butuh orang yang dapat diajak kerjasama. Jadi, saya ajaklah ibu M ini untuk ikut usaha saya dengan catatan harus yakin dan percaya bahwa ibu akan mandiri dan nantinya siap untuk keluar dari PKH karena sudah punya usaha.” (L:20)

Hal itupun dirasakan oleh ibu M. Ia merasakan dukungan yang diberikan oleh pendamping L kepadanya. Hal tersebut ia tunjukan dalam kutipan berikut.

“Ya saya mau saja diajak kerja sama pendamping L, tapi belum yakin untuk berhenti dari PKH, tapi akhirnya didukung dan dikasih kepercayaan sama pendamping yaudah akhirnya saya mutusin untuk melepas PKH.” (M:26-27)

Berdasarkan penjelasan kasus di atas diketahui bahwa faktor dukungan sosial dari pendamping ikut andil dalam keputusan ibu penerima PKH untuk berhenti dari bantuan PKH tersebut. Dukungan sosial yang diberikan oleh pendamping, terutama dukungan emosional dan dukungan materi menjadi faktor pendorong ibu penerima PKH mengambil keputusan untuk keluar dari kepesertaan PKH.

Dukungan emosional berupa pemberian motivasi dan keyakinan bahwa ibu penerima PKH dapat mandiri merupakan faktor yang paling berperan dibanding dukungan materi yang diberikan oleh pendamping kepada ibu penerima PKH.

Dukungan sosial keluarga

Faktor eksternal lain yang mendorong ibu penerima manfaat PKH keluar dari kepesertaan PKH adalah adanya dukungan sosial berupa motivasi dari keluarga, utamanya dari suami. Suami membantu memberikan motivasi kepada ibu dengan meyakinkan bahwa dengan keluar dari PKH, keluarga masih bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu S bahwa suami memotivasi untuk keluar dari PKH, meski Ibu S masih menimbang-nimbang keputusan tersebut.

“Ya bingung kan gimana gitu namanya orang semua juga butuh. Tapi, kata suami yaudah berhenti sajalah, insyaallah rezeki selalu ada aja.” (S:36)

Senada dengan suami dari ibu S, suami ibu E pun menyampaikan hal yang sama terkait

keputusan keluarga tersebut untuk berhenti mendapatkan bantuan PKH. Berikut merupakan pernyataan yang disampaikan oleh ibu E terkait motivasi yang didapatkannya dari suami.

“Ya kalo di pikir-pikir cape lah a, sekarang dapet bantuan uang segitu tapi ibu kan ketua, ngurusin anggota, ngurusin ini itu, ya ngga sebanding lah capenya sama uang cair cuman 3 bulan sekali, jadi yaudah berhenti saja dapat bantuan PKH, insyaallah masih bisa cukup dari warung juga bu.” (C:25)

Suami dari ibu M pun mendukung istrinya untuk keluar dari PKH ketika mengetahui istrinya akan memiliki usaha bersama dengan pendamping PKH. Berikut pernyataannya.

“Ya saya didukung suami untuk keluar dari PKH, kata suami yaudah kalo ada pilihan dari pendamping untuk buka usaha sendiri, kenapa engga dicoba saja, toh kan dibimbing sama pendamping, jadi ya yakin aja lah insyaallah kalo berusaha pasti bisa maju usahanya.” (M:32)

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa dukungan dari keluarga utamanya dari suami juga menjadi salah satu faktor pendorong ibu penerima PKH untuk berhenti dari kepesertaan PKH. Suami yang memberikan motivasi dan meyakinkan istri bahwa dengan berhenti dari PKH mereka masih bisa mencukupi kehidupannya. Hal ini, sangat berpengaruh pada ibu dalam mengambil keputusan untuk berhenti dari PKH, karena bisa jadi ketika suami atau keluarga tidak setuju untuk berhenti maka ibu penerima bantuan PKH pun tidak akan mengajukan diri untuk berhenti dari kepesertaan PKHnya.

Penutup

Kesimpulan: Penelitian ini menemukan beberapa faktor pendorong ibu penerima manfaat bantuan PKH keluar dari kepesertaan PKH yang terbagi ke dalam faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor ini saling menguatkan satu sama lain dalam mendorong ibu penerima bantuan PKH untuk keluar dari kepesertaan

PKH. Berdasarkan analisis peneliti, jika faktor pendorong hanya berasal dari salah satu faktor saja, tidak akan cukup untuk mendorong ibu penerima bantuan PKH untuk keluar dari kepesertaan bantuan PKH. Faktor yang lebih dominan mendorong ibu penerima bantuan PKH keluar dari PKH adalah faktor internal. Faktor internal lebih kuat dibandingkan faktor eksternal karena faktor eksternal sifatnya hanya memperkuat faktor internal dari ibu penerima bantuan PKH.

Faktor internal yang ditemukan di antaranya kesadaran diri, adanya perasaan malu, adanya motivasi untuk memiliki usaha, dan faktor kepercayaan. Kesadaran diri merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap faktor internal karena faktor kesadaran diri memunculkan faktor internal yang lain seperti perasaan malu dan tidak enak untuk menerima bantuan dari pemerintah. Faktor kepercayaan menjadi faktor internal kedua yang menguatkan ibu penerima bantuan PKH keluar dari kepesertaan PKH. Mereka memiliki kepercayaan atau keyakinan bahwa Tuhan sudah mengatur rezeki mereka dan pasti akan memberikan rezeki kepada mereka. Lain halnya dengan faktor motivasi untuk memiliki usaha, faktor ini tidak langsung muncul dari dalam diri ibu penerima bantuan PKH tetapi terdapat faktor eksternal penguat yang memunculkan motivasi untuk memiliki usaha yaitu dukungan sosial dari pendamping PKH.

Faktor eksternal yang ditemukan di antaranya adalah adanya dukungan sosial yang berasal dari pendamping PKH dan dukungan sosial dari keluarga dalam hal ini suami. Faktor eksternal ini merupakan penguat dari faktor internal yang mendorong keluar dari kepesertaan PKH. Dukungan sosial yang diberikan pendamping di antaranya adalah dukungan informasional berupa cara memulai dan mengembangkan usaha serta dukungan material berupa pemberian kesempatan untuk bekerja bersama dengan pendamping PKH untuk menjalankan usaha. Faktor dukungan sosial inilah yang menguatkan faktor internal

dari ibu penerima bantuan PKH untuk keluar dari kepesertaan PKH yakni motivasi memiliki usaha. Dukungan sosial dari keluarga dalam hal ini suami berupa pemberian keyakinan bahwa rezeki sudah ada yang mengatur, hal ini lah yang memperkuat faktor internal dari ibu penerima bantuan PKH untuk keluar dari kepesertaan PKH.

Rekomendasi: Rekomendasi ditujukan kepada instansi yang menaungi program keluarga harapan dalam hal ini Kementerian Sosial. Rekomendasi yang diberikan yakni perlunya peningkatan kapasitas pendamping program keluarga harapan dalam mendampingi keluarga miskin agar dapat keluar dari kemiskinan dan mencapai sejahtera. Berdasarkan hasil penelitian masih dijumpai pendamping PKH yang belum maksimal dalam mendampingi KPM PKH agar keluar dari kemiskinan dan mencapai kesejahteraan. Kurangnya kapasitas pendamping PKH dalam mendampingi KPM PKH menyebabkan banyak KPM tidak memiliki semangat dan tujuan yang jelas untuk keluar dari bantuan PKH, imbasnya banyak dari KPM PKH yang bertahun-tahun mendapatkan bantuan PKH tidak kunjung ada perubahan. Dengan meningkatnya kapasitas pendamping dalam mendampingi KPM PKH diharapkan akan banyak KPM yang dapat mencapai kesejahteraan dan keluar dari kemiskinan.

Rekomendasi selanjutnya terkait pemberian program komplementer pendukung program keluarga harapan. Pemberian program komplementer berupa pemberian modal usaha melalui program kelompok usaha bersama (KUBE) diharapkan juga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kemandirian KPM sehingga KPM dapat mencapai kesejahteraan dan keluar dari kemiskinan.

Rekomendasi juga diberikan kepada para peneliti lain terkait penelitian lanjutan pada kemiskinan yang terjadi di Indonesia, khususnya pada Program Keluarga Harapan ini. Masih banyak KPM PKH yang sudah lama mendapatkan bantuan tetapi tidak kunjung sejahtera juga. Maka dari itu perlu ada penelitian

lanjutan untuk mengetahui mengapa KPM PKH tidak kunjung sejahtera berdasarkan sudut pandang mereka. Bisa jadi dampingan yang diberikan oleh pendamping selama ini tidak dirasakan oleh mereka, atau karena memang mereka sudah tidak dapat mengembangkan diri sehingga hanya bergantung pada bantuan dari pemerintah.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih diberikan kepada para responden penelitian yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini. Kepada pihak yang sudah membantu berlangsungnya penelitian ini seperti Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat dan Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten Bandung Barat. Selain itu ucapan terima kasih diberikan kepada Eka Riyanti Purboningsih, S.Psi, M.Psi dan Tiara Ratih Widiastuti, S.Psi, M.Psi sebagai supervisor dalam penelitian ini. Terakhir ucapan terima kasih juga diberikan kepada Dr. Retno Hanggarani Ninin, S.Psi, M.Psi sebagai reviewer yang sudah bersedia menganalisis dan memberikan masukan kepada artikel ini agar menjadi artikel yang baik dan layak untuk dipublikasikan.

Pustaka Acuan

- Alie, M. (2015). *Indikator Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YPKN.
- BPS. (2018). Berita Resmi statistik keadaan ketenagakerjaan. *Badan Pusat Statistik*.
- Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. *Journal of Advanced Nursing*, 62(1), 107–115. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x>
- Hanum, S. L. (2017). Peran Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Kesejahteraan Keluarga. *Journal of Multidisciplinary Studies*, 5(2), 1–9.

- Hsieh, H.-F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. *Qualitative Health Research*, 15(9), 1277–1288. <https://doi.org/10.1177/1049732305276687>
- John W. Creswell. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (3rd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Kementrian Sosial. (2018). *PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN*. Jakarta: Dinas Sosial. Retrieved from <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7556065%0Ahttp://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC394507%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.humpath.2017.05.005%0Ahttps://doi.org/10.1007/s00401-018-1825-z%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27157931>
- Kemosos. (2018). No Title. Retrieved from <https://www.kemosos.go.id/siaranpers/penduduk-miskin-turun-119-juta-bps-akui-pkh-dan-rastra-berdampak-signifikan>
- Liputo, S. (2014). Distres psikologik dan disfungsi sosial di kalangan masyarakat miskin kota malang. *Jurnal Sains Dan Praktik Psikologi*, 2(3), 286–295.
- Markum, M. E. (2015). Pengentasan Kemiskinan dan Pendekatan Psikologi Sosial, 1(1), 1–12.
- Pemerintah Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang No.13 Tahun 2003*. Jakarta: Sekretariat Negara. Retrieved from http://www.kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf
- Rustanto, B. (2015). Menangani Kemiskinan, 164.
- Tuason, M. T. G. (2011). Those Who Were Born Poor : A Qualitative Study of Philippine Poverty, 1(2), 38–57. <https://doi.org/10.1037/2157-3883.1.S.38>
- Vaismoradi, M., Turunen, H., & Bondas, T. (2013). Content analysis and thematic analysis: Implications for conducting a qualitative descriptive study. *Nursing and Health Sciences*, 15(3), 398–405. <https://doi.org/10.1111/nhs.12048>

Perbandingan Kebahagiaan Berdasarkan pada Perbedaan Gender dan Status Pernikahan

The Comparison of Happiness Based on Gender Differences and Marital Status

Kusumasari Kartika Hima Darmayanti¹, Imammul Insan², Efan Yudha Winata³, Dimas Teguh Prasetyo⁴, Pratiwi Sakti⁵, dan Fitra Hasri Rosandi⁶

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Psikologi, Universitas Teknologi Sumbawa

Jl. Raya Olat Maras, Batu Alang, Leseng, Moyo Hulu, Sumbawa 84371, Indonesia

Email : kusumasari.darmayanti@uts.ac.id; HP. 082226155860

Diterima tanggal 8 Agustus 2020 diperbaiki tanggal 9 September 2020 disetujui tanggal 2 Oktober 2020

Abstract

Marital status and gender differences are often associated with happiness. Psychological research is expected to be an answer to debates related to happiness, gender differences and marital status. This study aimed to determine whether there was a difference between gender and one's marital status with happiness. This survey was conducted using a quantitative approach to 201 academicians in Sumbawa, West Nusa Tenggara. The results of the correlation analysis showed that gender was not a variable related to happiness. Type of work was significantly related to one's happiness ($r = .15$; $p < .05$), marital status was positively correlated with happiness ($r = .21$; $p < .01$). This study found that gender differences were not statistically significant in affecting happiness with $F(1, 197) = .28$; $p = .60$, but marital status predicted happiness with $F(1, 197) = 8.45$; $p = .00$, where happiness in unmarried people ($4.26 \pm .78$) was significantly lower than those who were married ($4.87 \pm .78$) with ($t_{19,09} = -3.07$; $p = .01$). In addition, there was no significant interaction between gender differences and marital status on happiness with $F(1, 197) = .58$; $p = .45$. A person who is married has a higher tendency of happiness than someone who is not married. The results of this study could not be the main reference and information that contained the causal mechanisms. Further studies require the involvement and dynamics of other psychological factors as variables that can predict a person's marital status and happiness.

Keywords: *comparison; gender differences; happiness; married; single.*

Abstrak

Status pernikahan dan perbedaan gender sering dikaitkan dengan kebahagiaan. Penelitian psikologis diharapkan dapat menjadi jawaban atas perdebatan terkait kebahagiaan, perbedaan gender, dan status pernikahan. Studi ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara gender dan status pernikahan seseorang dengan kebahagiaan. Survei ini dilakukan dengan metode pendekatan kuantitatif terhadap 201 civitas akademika di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa gender tidak menjadi variabel yang berhubungan dengan kebahagiaan. Jenis pekerjaan berkaitan secara signifikan dengan kebahagiaan seseorang ($r = 0,15$; $p < 0,05$), status pernikahan secara positif berkorelasi dengan kebahagiaan ($r = 0,21$; $p < 0,01$). Penelitian ini menemukan bahwa perbedaan gender secara statistik tidak signifikan memengaruhi kebahagiaan dengan $F(1, 197) = 0,28$; $p = 0,60$, tetapi status pernikahan memprediksi kebahagiaan dengan $F(1, 197) = 8,45$; $p = 0,00$, yang mana kebahagiaan pada orang belum menikah ($4,26 \pm 0,78$) secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan yang telah menikah ($4,87 \pm 0,78$) dengan ($t_{19,09} = -3,07$; $p = 0,01$). Selain itu, tidak terdapat signifikansi interaksi antara perbedaan gender dan status pernikahan pada kebahagiaan dengan $F(1, 197) = 0,58$; $p = 0,45$. Seseorang yang telah menikah memiliki kecenderungan kebahagiaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan seseorang yang belum menikah. Hasil studi ini tidak dapat menjadi rujukan utama dan informasi yang berisi mekanisme sebab-akibat. Studi selanjutnya memerlukan keterlibatan dan dinamika faktor psikologis lain sebagai variabel yang dapat memprediksi status pernikahan dan kebahagiaan seseorang.

Kata Kunci: *perbandingan; perbedaan gender; kebahagiaan; menikah; single*

Pendahuluan

Pernikahan merupakan sebuah proses untuk menyatukan dua insan yang berbeda untuk menjadi satu (Andjariah, 2005) (Andjariah, 2005). Hal itu sesuai dengan arahan yang ada dalam ajaran Agama serta kehidupan sosial dalam masyarakat telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi 'pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Indonesia, 1975). Pernikahan dianggap sebagai proses menjalani kehidupan yang baru. Hal tersebut disebabkan pasangan yang menikah akan menjalani proses yang berbeda dari sebelum menikah, baik itu dalam hal kehidupan, keuangan, penyatuan dua keluarga yang berbeda serta saling konsisten menyatukan dan menjalani komitmen yang di butuhkan bersama. Pernikahan memiliki beberapa manfaat penting dalam kehidupan seseorang.

Setiap orang menginginkan pernikahan yang penuh dengan kebahagiaan dalam menjalankan peran sebagai suami istri. Pada pasangan suami-istri, mereka berusaha untuk memecahkan masalah dan melewati tantangan tersebut untuk tetap menjaga hubungan pernikahan dan menjaga komitmen yang sudah dibuat pada saat memutuskan menikah. Pasangan suami-istri memerlukan kedekatan emosi sebagai teman hidup yang utuh sebagai pasangan suami-istri. Menurut Yuniariandini (2016), berteman dengan pasangan adalah salah satu dari banyak cara untuk membuat pernikahan yang bahagia. Pasangan yang telah menikah terlihat lebih bahagia dibandingkan dengan pasangan yang belum menikah. Hal itu disebabkan oleh komitmen dan tanggung jawab yang dipikul bersama. Menurut Taylor (1997) komitmen perkawinan adalah semua kekuatan, yang menjaga individu tetap bersama dalam hubungan.

Pasangan suami isteri yang menjalankan hubungan komunikasi secara baik akan meningkatkan kebahagiaan. Menurut Yoseph (1994), suami-istri harus mampu menciptakan komunikasi yang harmonis dalam keluarga, sebab komunikasi harmonis akan memungkinkan adanya saling pengertian dan ketulusan terhadap segala aspek kehidupan itu sendiri.

Kebahagiaan dalam penelitian ini mengacu pada konsep yang telah dibangun oleh Argyle (2013). Argyle (2013) mendefinisikan kebahagiaan manakala individu mempunyai tiga komponen dalam hidup mereka, yaitu: (1) mencapai kepuasan dalam hidup mereka berdasarkan pada tingkat rata-rata dalam periode waktu yang spesifik; (2) intensitas dan pengaruh positif; dan (3) tidak mempunyai pengaruh negatif pada waktu temporer.

Seseorang yang menikah lebih bahagia dibandingkan dengan yang tidak menikah. Seligman (2002) mengatakan bahwa pernikahan sangat berkaitan erat dengan kebahagiaan. Selain itu Stutzer dan Frey (2006) menyatakan bahwa kesejahteraan seseorang yang menikah juga meningkat jika dibandingkan dengan yang belum menikah. Dari pernyataan kedua tokoh tersebut, kami menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan kebahagiaan antara individu yang telah menikah dengan individu yang belum menikah. Lebih lanjut, kebahagiaan individu yang sudah menikah lebih tinggi dibandingkan dengan yang belum menikah.

Terdapat beberapa penelitian tentang kebahagiaan pasangan yang sudah menikah, namun juga ada beberapa hasil survei yang menjelaskan tentang perbedaan kebahagiaan pasangan yang sudah menikah dengan yang belum menikah. Penelitian terbaru menyebutkan jika pernikahan merupakan faktor terpenting dalam mendapatkan kebahagiaan. Hasil survei yang dikutip dari media portal daring Susita (2019), survei yang dilakukan oleh *Office for National Statistics* (ONS; dalam Susita, 2019) menunjukkan status pernikahan berada di urutan kedua, setelah kesehatan yang dianggap sebagi

alasan paling utama mengapa orang merasa bahagia dengan nilai kepuasan hidup mereka 9,9 persen lebih tinggi dibanding duda atau janda dan 8,8 persen lebih tinggi dari mereka yang telah bercerai atau berpisah dari pasangan. Di sisi lain, mereka yang lajang merasa lebih bahagia 0,2 persen dibanding mereka yang telah bercerai atau berpisah.

Hasil survei lainnya ialah sebagaimana yang dikutip dari media portal daring yang ditulis oleh Karo (2015). Survei tersebut merupakan survei yang dilakukan oleh Universitas Warwick yang mengungkapkan bahwa 60 persen pasangan menikah mengaku lebih bahagia dibandingkan saat masih melajang (Karo, 2015). Hal ini dikarenakan individu yang telah menikah mengalami peningkatan perasaan puas dan lebih mudah melewati masa-masa stress (Karo, 2015).

Dari hasil penjelasan di atas, baik dari hasil penelitian sebelumnya maupun dari media portal daring yang dapat dijadikan sebagai referensi acuan, kami tertarik untuk mengetahui lebih mendalam tentang perbedaan kebahagiaan pasangan yang sudah menikah dengan yang belum menikah. Variabel utama dalam penelitian ini yaitu kebahagiaan, kemudian variabel kelompoknya adalah pasangan yang sudah menikah dan yang belum menikah.

Di sisi lain, Hori dan Kamo (2018) memaparkan bahwa untuk budaya Asia perbedaan gender merupakan hal yang masih dipertimbangkan di masyarakat hingga saat ini. Dalam konteks tradisional, peran di ranah publik pada laki-laki cenderung lebih mendominasi di masyarakat (Hori & Kamo, 2018), sehingga hal itu akan memengaruhi kebahagiaan laki-laki dan masyarakat ketika hidup di masyarakat.

Sejalan dengan pemaparan Hori dan Kamo (2018), Eagly dan Karau (2002) menjelaskan bahwa perbedaan peran gender di masyarakat bermula dari perbedaan jenis yang menjadi standar norma yang berlaku di masyarakat. Norma yang berada di masyarakat memengaruhi 'bagaimana seharusnya berperilaku', yang di dalamnya menyangkut pekerjaan yang

sesuai, sifat yang harus melekat, dan ekspresi emosi yang seharusnya terdapat pada masing-masing laki-laki dan perempuan. Individu yang tidak menerima norma tersebut seringkali mengalami kekerasan gender (Eagly & Karau, 2002). Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Garcia-Retamero dan López-Zafra (2006), perempuan lebih sering menerima dampak negatif dari nilai tradisional yang berbasis gender.

Secara biologis, penelitian Røysamb et al. (2002) menemukan bahwa perempuan lebih bahagia dari pada laki-laki. Hal itu disebabkan oleh adanya perbedaan gen, yang mana gen monoamine oxidase A (MAOA) yang berfungsi untuk mengatur emosi hanya berpengaruh terhadap perempuan, tidak pada laki-laki (Batz & Tay, 2018).

Dalam perspektif sosial-masyarakat, Zweig (2015) menemukan bahwa perempuan lebih bahagia daripada laki-laki. Hal itu disebabkan perempuan lebih merasa puas dengan tingkat pendidikan mereka (meskipun pendidikan mereka tidak tinggi), keluarga, pertemanan, dan penghasilan (Casas et al., 2007).

Berdasarkan dari pemaparan di atas, penelitian kebahagiaan dari perspektif perbedaan gender ditemukan tidak konsisten. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh (Lobos et al., 2016), justru pada penelitian tidak ditemukan signifikansi perbedaan secara statistik kebahagiaan antara perempuan dan laki-laki. Ketidakkonsistenan temuan penelitian selanjutnya menjadi fokus utama dalam penelitian ini manakala penelitian perbedaan gender dalam kebahagiaan dilakukan di Kabupaten Sumbawa.

Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan oleh (Darmayanti et al., 2020) Darmayanti, Prasetyo, Winata, Rosandi, dan Sakti (*n.d.*). Secara detail, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan kebahagiaan berdasarkan pada perbedaan gender dan status pernikahan sivitas akademika pada salah satu universitas di Kabupaten

Sumbawa. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan kebahagiaan berdasarkan pada perbedaan gender dan status pernikahan sivitas akademika pada salah satu universitas di Kabupaten Sumbawa. Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk memberikan penilaian pada khalayak secara umum tentang perbedaan kebahagiaan pada individu yang sudah menikah dengan yang belum menikah serta dapat menjadi gambaran yang lebih khusus tentang apakah terdapat perbedaan kebahagiaan berdasarkan pada perbedaan gender dan status pernikahan sivitas akademika pada salah satu universitas di Kabupaten Sumbawa.

Pada penelitian ini, terdapat dua hipotesis alternatif (H_1) dan hipotesis nol (H_0) yang diajukan, yakni:

1. Terdapat perbedaan kebahagiaan yang signifikan pada individu yang sudah menikah dengan yang belum menikah pada salah satu universitas di Kabupaten Sumbawa. (H_1)
Tidak terdapat perbedaan kebahagiaan yang signifikan pada individu yang sudah menikah dengan yang belum menikah pada salah satu universitas di Kabupaten Sumbawa. (H_0)
2. Terdapat perbedaan kebahagiaan yang signifikan pada individu laki-laki dan perempuan pada salah satu universitas di Kabupaten Sumbawa. (H_1)
Tidak terdapat perbedaan kebahagiaan yang signifikan pada individu laki-laki dan perempuan pada salah satu universitas di Kabupaten Sumbawa. (H_0)
3. Terdapat interaksi yang signifikan antara perbedaan gender dan status pernikahan pada kebahagiaan di salah satu universitas di Kabupaten Sumbawa. (H_1)
Tidak terdapat interaksi yang signifikan antara perbedaan gender dan status pernikahan pada kebahagiaan di salah satu universitas di Kabupaten Sumbawa. (H_0)

Penggunaan Metode Penelitian

Partisipan penelitian. Partisipan penelitian ini merupakan sivitas akademika pada salah satu

universitas di Kabupaten Sumbawa ($N = 201$). Berdasarkan pada status pernikahan partisipan ($M = 1,08$; $SD = 0,28$), sebanyak 184 (91,5%) partisipan dengan status belum menikah dan 17 (8,5%) partisipan sudah menikah. Partisipan dari latar belakang suku yang berbeda-beda dengan rincian Jawa (42 orang; 20,9%), Samawa (52 orang; 25,9%), Bugis (20 orang; 10%), Sunda (13 orang; 6,5%), Mbojo/Bima (6 orang; 3%), Kaili (2 orang; 1%), Batak (4 orang; 2%), Melayu (6 orang; 3%), Betawi (4 orang; 2%), Sasak (8 orang; 4%), dan Banggai (4 orang; 2%). Selain itu, terdapat beberapa partisipan dari beberapa suku di Indonesia dengan jumlah partisipan masing-masing satu, yakni: Singkil, Banjar, Minangkau, Flores, Cia cia, Tolaki, Saluan, dan tidung (8 orang; 4%). Sisanya, partisipan berasal dari orang tua dengan latar belakang suku yang berbeda ($N = 14$; 7%) dan partisipan yang tidak menyebutkan identitas suku ($N = 18$; 9%).

Lebih lanjut, partisipan juga dengan latar belakang demografis, laki-laki sebanyak 88 orang (53,8%) dan perempuan sebanyak 113 orang (56,2%). Sementara itu, untuk latar belakang pekerjaan, terdapat 163 orang (81,1%) mahasiswa, 19 orang (9,5%) dosen, dan 19 orang (9,5%) tenaga kependidikan.

Prosedur penelitian. Penelitian ini menerapkan *incidental sampling* (Cozby & Bates, 2015; Gravetter & Forzano, 2016), partisipan yang terlibat pada penelitian ini ialah yang memperoleh informasi pengisian survei secara daring. Pada saat pengisian survei, partisipan dimintai persetujuannya untuk mengisi survei secara sukarela dengan menyetujui *informed consent* yang telah kami sediakan pada bagian awal *form* pengisian survei.

Alat ukur. Pengukuran kebahagiaan menggunakan alat ukur kebahagiaan yang telah dikembangkan oleh Hills dan Argyle (2002). Alat ukur tersebut ialah *the Oxford Happiness Questionnaire* (TOHQ; Hills & Argyle, 2002). Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian sebelumnya, sehingga TOHQ

yang digunakan menggunakan hasil adaptasi dari Darmayanti et al. (2020) dengan $\alpha = 0,91$. TOHQ yang digunakan pada penelitian ini melibatkan 23 item setelah proses uji validitas dan reliabilitas dengan $D = 0,35-0,75$ yang mengindikasikan bahwa item tidak perlu direvisi hingga berfungsi cukup memuaskan (Crocker & Algina, 1986; Urbina & Anastasi, 1997).

Analisis data. Kami menggunakan IBM SPSS versi 23 untuk menganalisis data yang telah terkumpul. Selain menggunakan analisis deskripsi untuk mengetahui skor rata-rata, standar deviasi, dan jumlah perbedaan (berdasarkan sosio-demografis pada jenis kelamin, pekerjaan, dan status pernikahan), kami menggunakan analisis perbandingan *mean* dengan kategori *two-way anova* untuk mengetahui perbedaan kebahagiaan berdasarkan status pernikahan (1 = Belum menikah; 2 = Menikah) dan perbedaan gender (1 = Perempuan; 2 = Laki-laki). Setelah itu, kami melakukan analisis *independent sample t-test* (Gravetter & Wallnau, 2013) untuk mengetahui perbedaan besaran perbedaan kebahagiaan pada masing-masing orang yang sudah menikah dan belum menikah dan perbedaan gender perempuan dan laki-laki.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian terdiri dari dua analisis data yang telah disebutkan pada bagian metode. Kami meringkas hasil korelasi kebahagiaan dan beberapa variabel sosio-demografis pada Tabel 1 dan hasil analisis perbandingan kebahagiaan pada Tabel 2.

Tabel 1 menunjukkan hubungan korelasi antara beberapa variabel sosio-demografis dengan kebahagiaan. Dalam hal ini, kami menyimpulkan bahwa jenis kelamin (yakni: Laki-laki dan perempuan) tidak berkorelasi secara signifikan dengan kebahagiaan. Sementara itu, untuk korelasi yang positif dan signifikan, kami menemukannya pada hubungan pekerjaan (yakni: Mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan) dan kebahagiaan ($r = 0,15$; $p < 0,05$), dan hubungan status pernikahan (yakni:

Menikah dan *single*) dengan kebahagiaan ($r = 0,21$; $p < 0,01$).

Tabel 1.
Korelasi antara Kebahagiaan dengan Beberapa Variabel Sosio-demografis

	<i>M± SD</i>	1	2	3	4
Gender	1,44±0,50	1			
Pekerjaan	1,28±0,63	0,15*	1		
SP	1,08±0,28	0,10	0,30**	1	
Kebahagiaan	4,31±0,80	0,01	0,17*	0,21**	1

SP = Status pernikahan

* $p < 0,05$; ** $p < 0,01$

Tabel 2 menunjukkan pengaruh perbedaan gender dan status pernikahan terhadap kebahagiaan individu. Hasil uji *two-way anova* mengindikasikan bahwa tidak terdapat signifikansi interaksi antara pengaruh perbedaan gender dan status pernikahan pada kebahagiaan individu dengan $F(1, 197) = 0,58$; $p = 0,45$ (di mana $p > 0,05$). Sementara itu, skor F yang berkaitan dengan *main effect* yang pertama (perbedaan gender) ditemukan tidak signifikan dengan $F(1, 197) = 0,28$; $p = 0,60$ (di mana $p > 0,05$). Untuk skor *main effect* yang signifikan, penelitian ini menemukan bahwa perbedaan status pernikahan memengaruhi kebahagiaan individu dengan $F(1, 197) = 8,45$; $p = 0,00$ (di mana $p < 0,01$). Oleh karena yang ditemukan signifikansi *main effect* pada perbedaan status pernikahan, selanjutnya kami melakukan uji *independent sample t-test* untuk mengetahui besaran perbedaan skor masing-masing *mean*.

Tabel 2.
Ringkasan ANOVA untuk Kebahagiaan

Source	<i>df</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>p</i>	η^2
PG	1	0,17	0,28	0,60	0,00
SP	1	5,17	8,45	0,00	0,04
PG*SP	1	0,36	0,58	0,45	0,00
Error	197	0,61			
Total	201				

$R^2 = 0,05$; $\Delta R^2 = 0,03$

PG = Perbedaan gender; SP = Status pernikahan

df = Degree of freedom; *MS* = Mean square

Sebelum melakukan uji *independent sample t-test*, kita melakukan analisis deskriptif dan membuat grafis guna mengetahui bahwa data

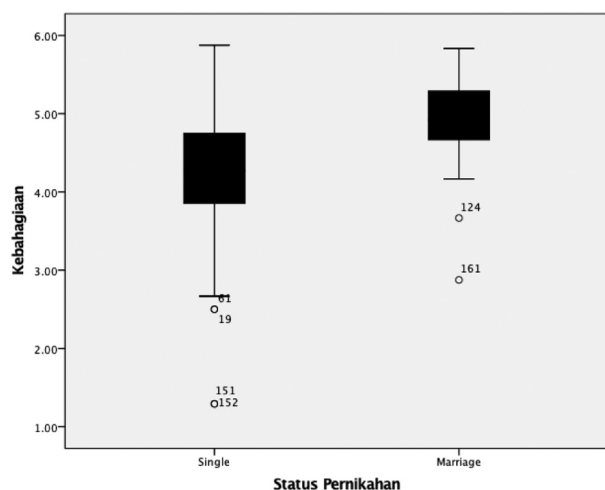
sudah sesuai untuk diujikan secara komparatif. Kami juga menampilkan *comparative boxplot* sebagaimana terpapar pada grafik di Gambar 1.

Tabel 3 merupakan hasil dari *Levene's Test for Equality of Variance*. Hasil ini mengindikasikan bahwa kami menolak H_0 dan menerima H_1 pada penelitian ini ($p > 0,05$). Hasil ini sama dengan hasil sebelumnya (lihat Gambar 1), yang mana kedua grup tidak sama (*unequal*).

Tabel 3.
Hasil *Levene's Test for Equality of Variance*

Kategori	F	p
Equal variances assumed	0,19	0,66

Pada Gambar 1, grafik mengindikasikan bahwa persebaran data individu yang *single* (belum menikah) lebih banyak dibandingkan dengan individu yang telah menikah. Dengan demikian, hal itu dapat disimpulkan bahwa varians dari kedua grup cukup berbeda, sehingga hasil ini pun sudah bisa memprediksi signifikansi hasil *independent sample t-test*.



Gambar 1.
Grafik untuk *Comparative Boxplot*

Pada Tabel 4, terdapat hasil analisis *independent sample t-test* pada status pernikahan terhadap kebahagiaan. Kami menemukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan kebahagiaan pada individu yang telah menikah dan *single* ($t_{19,09} = -3,07$; $p < 0,01$). Dari perbandingan

mean, penelitian ini menemukan bahwa individu yang telah menikah ($M = 4,87$; $SD = 0,78$) lebih bahagia daripada individu yang belum menikah ($M = 4,26$; $SD = 0,78$). Selain itu, Gravetter dan Wallnau (2013) mengulas bahwa pengujian hipotesis pada *independent sample t-test* menggunakan t statistik. Hasil penelitian mengindikasikan negatif, yang artinya skor negatif pada t statistik mengindikasikan bahwa skor *mean* individu yang masih *single* lebih kecil daripada individu yang telah menikah.

Tabel 4.
Koefisien Perbandingan Tingkat Kebahagiaan

Kategori	N	M	SD	Independent sample t-test	
				t	p
Belum menikah	184	4,26	0,78		
Menikah	17	4,87	0,78	-3,07	0,01

Penelitian ini menjelaskan tentang konteks kebahagiaan berdasarkan variable sosio-demografis. Pada Tabel 1 dijelaskan bahwa kebahagiaan berkorelasi dengan pekerjaan, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh (Carr, 2003), dan status perkawinan seperti penelitian yang dilakukan oleh Bailey dan Fernando (2012), dibandingkan dengan perbedaan gender. (Power, 2015) mengatakan bahwa perbedaan gender tidak sepenuhnya dapat mempengaruhi kebahagiaan individu. Begitu juga dengan pendapat Rahayu (2016), dia menyatakan bahwa tidak ada perbedaan kebahagiaan pada orang yang menikah berdasarkan perbedaan gender.

Sebagaimana hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2016), penelitian ini juga menemukan bahwa tidak ada perbedaan kebahagiaan pada individu perempuan dan laki-laki. Dalam hal ini, perbedaan gender tidak memengaruhi kebahagiaan, sehingga kebahagiaan pada individu perempuan dan laki-laki sama.

Hasil studi deskriptif yang dilakukan oleh Chui dan Wong (2016) pada partisipan Hongkong juga menemukan tidak ada signifikansi perbedaan skor *mean* kebahagiaan

pada partisipan perempuan dan laki-laki. Begitu pula dengan Tkach dan Lyubomirsky (2006), mereka mengemukakan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai kesamaan tingkat kebahagiaan.

Lebih spesifiknya pada Tabel 4, individu yang menikah lebih bahagia dibandingkan dengan yang belum menikah. Hal ini konsisten dengan penelitian sebelumnya mengenai tingkat kebahagiaan individu dapat dilihat berdasarkan status pernikahan (Carr et al., 2019; Checa et al., 2019; Hsu & Barrett, 2020; Zhu et al., 2018). Penelitian Chapman dan Guven (2016) dan penelitian England et al. (2001) mengatakan bahwa individu yang menikah lebih bahagia daripada belum menikah atau tidak pernah menikah. Pernikahan juga dapat memberi manfaat pada individu, sehingga membuat mereka bahagia (Carr, 2003). Salah satu di antaranya ialah hubungan interpersonal yang dapat terjalin antara suami dan istri serta adanya dukungan emosional yang dapat membantu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih lanjut, Lawrence et al. (2019) juga menemukan kebahagiaan dalam penelitian pada beberapa negara. Dalam pernikahan, individu dari beberapa negara tersebut merasakan tidak terlalu bahagia dengan pernikahan yang mereka jalani (Lawrence et al., 2018). Sebagian lagi merasakan sangat berbahagia dengan pernikahan mereka (Lawrence et al., 2018). Masing-masing perasaan bahagia yang mereka rasakan berkontribusi terhadap kesehatan mereka (Lawrence et al., 2018). Dalam penelitiannya, Lawrence et al. (2018) menambahkan bahwa kesehatan meningkat pada pernikahan yang bahagia disebabkan oleh bagaimana individu menghadapi tekanan psikologi pada rumah tangga mereka, sedangkan rendahnya kualitas kesehatan terjadi sebagai dampak dari rendahnya kebahagiaan pernikahan yang semakin meningkat setiap hari hingga menyebabkan stress yang kronis.

Navaitis et al. (2016) menyebutkan bahwa setelah menikah, individu mengalami perubahan status baik secara formal maupun informal, baik

di dalam keluarga maupun di sosial masyarakat. Di dalam keluarga, perubahan terjadi pada seorang wanita yang mengambil peran sebagai ibu dan laki-laki sebagai ayah, setelah kelahiran anak. Kehadiran anak dalam keluarga dan peran sebagai orang tua, menurut (Vanassche et al., 2013), mampu meningkatkan kebahagiaan individu. Navaitis et al. (2016) menyatakan bahwa kebahagiaan individu dan kesejahteraan individu, salah satunya, tergantung pada status mereka dalam keluarga.

Fok dan Cheng (2018) menemukan bahwa kebahagiaan dalam pernikahan meningkatkan kualitas keintiman hubungan (*intimate relationship*; kualitas hubungan). Menurut mereka, temuan penelitian yang lakukan ini sama dengan temuan penelitian tentang kualitas hubungan dan kebahagiaan dalam pernikahan pada konteks negara-negara Barat (Fok & Cheng, 2018). Penelitian Fok dan Cheng (2018) menyebutkan bahwa kebahagiaan pada pernikahan tidak lepas dengan *value* pada sebuah budaya. Dalam konteks Taiwan sebagai contoh, kualitas hubungan pada sebuah pernikahan mendatangkan sebuah harmoni, yang dalam konteks Taiwan disebut dengan '*enqing*' (yakni: Perasaan bersyukur yang mana melibatkan dimensi kognisi dan emosi individu dalam konteks psikologi) (Chen & Li, 2007; Wang et al., 2016). Sementara itu, dalam konteks Indonesia sendiri, Himawan et al. (2018) menjelaskan bahwa pernikahan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan sebuah pencapaian yang kemudian memposisikan kondisi *single* pada posisi *undervalued* maupun beberapa stigma negatif di tengah sosial-masyarakat. Demikian, Himawan et al. (2018) mengemukakan bahwa pernikahan menjadi standar normatif pada budaya masyarakat Indonesia.

Berbeda dengan individu yang tidak menikah, mereka tentunya merasa kesepian, kurang relasi sosial serta dapat memberikan hubungan negatif terhadap orang lain (Pinquart, 2003). Kesepian dalam hal ini dapat berdampak pada ketidakjujuran individu, cenderung

mengungkapkan hal negatif, dan merasa kurang diperhatikan dan dipahami (Leung, 2002).

Hubungan sosial penting dalam memperoleh kebahagiaan individu. Adapun hubungan sosial yang dimaksud, tentunya hubungan sosial dalam jangka panjang. Hal itu sebagaimana hubungan dalam perkawinan (Nelles et al., 2002). Hubungan perkawinan merupakan hubungan yang dapat membuat individu memperoleh keharmonisan dan kebermaknaan dalam hidup (Fatimah & Nuqul, 2018).

Beberapa penelitian sebelumnya yang telah kami paparkan terkait kondisi yang dialami oleh individu yang belum menikah menunjukkan bahwa mereka tidak terlalu merasa bahagia. Sementara pada penelitian ini, sekalipun tingkat kebahagiaan individu yang telah menikah dan belum menikah lebih tinggi pada individu yang telah menikah, akan tetapi selisih nilai rata-rata kebahagiaan individu yang belum menikah dan telah menikah sebesar 0,61. Hal ini mengindikasikan bahwa individu yang belum menikah pun merasa cukup bahagia.

Terkait kebahagiaan individu yang belum menikah, beberapa penelitian menemukan bahwa kondisi individu yang masih *single* justru mampu mendatangkan kepuasan dalam hidup dan kebahagiaan bagi mereka (Kislev, 2018; Xiao, 2017). Penelitian Xiao (2017) dilakukan di negara Jepang. Menurutnya, di Jepang sendiri terdapat istilah '*makeinu*' (yakni: *A loser dog*) bagi perempuan yang masih *single* (Xiao, 2017). Hal ini mengindikasikan adanya stigma sosial terhadap perempuan yang belum menikah (Xiao, 2017). Sekalipun demikian, perempuan Jepang pada penelitian Xiao (2017) lebih menikmati hidup dengan status *single*. Beberapa pertimbangan mereka ialah adanya konsep tradisional tentang *gender* terhadap perempuan yang masih diterapkan oleh masyarakat, permasalahan keuangan, dan pengalaman keluarga, cinta, serta pekerjaan (Xiao, 2017).

Penutup

Kesimpulan: Mengacu pada permasalahan penelitian yang telah disebutkan di awal, kami menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan kebahagiaan antara perempuan dan laki-laki. Hal itu dapat dipahami bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai kebahagiaan yang sama. Selain itu, penelitian ini mengindikasikan signifikansi perbedaan kebahagiaan antara orang yang telah menikah dan orang *single*. Dari adanya perbedaan yang signifikan tersebut, kami juga menemukan bahwa orang yang telah menikah lebih bahagia daripada orang yang belum menikah. Untuk interaksi perbedaan gender dan status pernikahan, tidak ditemukan signifikansi interaksi di antara keduanya pada kebahagiaan individu di salah satu universitas di Kabupaten Sumbawa.

Rekomendasi: Berdasarkan pada hasil penelitian kami, penelitian selanjutnya bisa menggunakan beberapa variabel yang berkaitan dengan penelitian ini. Hal itu sebagaimana variabel kepuasan dalam pernikahan (*marrital satisfaction*; Margelisch et al., 2017; Shahbazi & Khademali, 2018) dan beberapa variabel yang merepresentasikan emosi positif seperti *subjective well-being* (Chapman & Guven, 2016; Kennedy et al., 2018). Sementara, untuk analisis data, penelitian selanjutnya dapat menggunakan *dyadic analysis* untuk menguji kebahagiaan pernikahan pada pasangan pernikahan sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Stokes (2017). Selain itu, agar individu memperoleh kebahagiaan pada pernikahan, psikolog pernikahan bisa menerapkan beberapa program konseling dan psikoterapi pernikahan pada pasangan yang hendak menikah terkait dengan kebahagiaan pernikahan dan bagaimana mengatasi konflik yang ada.

Ucapan Terima Kasih

Kami berterimakasih kepada rekan-rekan Dosen di Fakultas Psikologi, Universitas Teknologi Sumbawa yang telah mendukung penelitian ini hingga pada tahap pelaporan.

Pustaka Acuan

- Andjariah, S. (2005). Kebahagiaan perkawinan ditinjau dari faktor komunikasi pada pasangan suami istri. *Jurnal Psikologi*, 1(1).
- Argyle, M. (2013). *The psychology of happiness* (2nd ed.). Routledge.
- Bailey, A. W., & Fernando, I. K. (2012). Routine and Project-Based Leisure, Happiness, and Meaning in Life. *Journal of Leisure Research*, 44(2). <https://doi.org/10.1080/00222216.2012.11950259>
- Batz, C., & Tay, L. (2018). Gender differences in subjective well-being. In *Handbook of well-being*. DEF Publishers.
- Carr, A. (2003). Positive psychology: The science of happiness and human strengths. In *Positive Psychology: The Science Of Happiness And Human Strengths*. <https://doi.org/10.4324/9780203506035>
- Carr, D., Cirmman, J. C., & Freedman, V. A. (2019). Do Family Relationships Buffer the Impact of Disability on Older Adults' Daily Mood? An Exploration of Gender and Marital Status Differences. *Journal of Marriage and Family*, 81(3), 729–746. <https://doi.org/10.1111/jomf.12557>
- Casas, F., Figuer, C., González, M., Malo, S., Alsinet, C., & Subarroca, S. (2007). The Well-Being of 12 - to 16-Year-Old Adolescents and their Parents: Results from 1999 to 2003 Spanish Samples. *Social Indicators Research*, 83(1). <https://doi.org/10.1007/s11205-006-9059-1>
- Chapman, B., & Guven, C. (2016). Revisiting the Relationship Between Marriage and Wellbeing: Does Marriage Quality Matter? *Journal of Happiness Studies*, 17(2). <https://doi.org/10.1007/s10902-014-9607-3>
- Checa, I., Perales, J., & Espejo, B. (2019). Measurement invariance of the Satisfaction with Life Scale by gender, age, marital status and educational level. *Quality of Life Research*, 28(4), 963–968. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0191-8869\(01\)00213-6](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0191-8869(01)00213-6)
- Chen, F.-M., & Li, T.-S. (2007). Marital Enqing : An Examination of Its Relationship to Spousal Contributions, Sacrifices, and Family Stress in Chinese Marriages. *The Journal of Social Psychology*, 147(4). <https://doi.org/10.3200/SOCP.147.4.393-412>
- Chui, W. H., & Wong, M. Y. H. (2016). Gender Differences in Happiness and Life Satisfaction Among Adolescents in Hong Kong: Relationships and Self-Concept. *Social Indicators Research*, 125(3), 1035–1051. <https://doi.org/10.1007/s11205-015-0867-z>
- Cozby, P. C., & Bates, S. C. (2015). *Methods in Behavioral Research* (12th ed.). McGraw-Hill Education.
- Crocker, L., & Algina, J. (1986). *Introduction to modern and classical test theory*. Holt Rinehart & Winston.
- Darmayanti, K. K. H., Prasetyo, D. T., Winata, E. Y., Rosandi, F. H., & Sakti, P. (2020). *Studi Deskriptif Kesehatan Mental Akademisi di Kabupaten Sumbawa*. 157–166. <https://doi.org/https://doi.org/10.31105/jpks.v19i2.2106>
- Eagly, A. H., & Karau, S. J. (2002). Role congruity theory of prejudice toward female leaders. *Psychological Review*, 109(3). <https://doi.org/10.1037/0033-295X.109.3.573>
- England, P., Waite, L. J., & Gallagher, M. (2001). The Case for Marriage: Why Married People Are Happier, Healthier, and Better off Financially. *Contemporary Sociology*, 30(6). <https://doi.org/10.2307/3088984>
- Fatimah, M., & Nuqul, F. L. (2018). Kebahagiaan Ditinjau Dari Status Pernikahan dan Kebermaknaan Hidup. *Jurnal Psikologi*, 14(2), 145. <https://doi.org/10.24014/jp.v14i2.5125>
- Fok, H.-K., & Cheng, S.-T. (2018). Intimate Relationships and Happiness in Asia: A Critical Review. In *Close relationships and happiness across cultures* (pp. 55–67). https://doi.org/10.1007/978-3-319-89663-2_4
- Garcia-Retamero, R., & López-Zafra, E. (2006). Prejudice against Women in Male-congenial Environments: Perceptions of Gender Role Congruity in Leadership. *Sex Roles*, 55(1–2). <https://doi.org/10.1007/s11199-006-9068-1>
- Gravetter, F. J., & Forzano, L. A. B. (2016). *Research methods for the behavioral sciences*. Cengage Learning.
- Gravetter, F. J., & Wallnau, L. B. (2013). *Statistics for the behavioral sciences*. Cengage Learning.
- Hills, P., & Argyle, M. (2002). The Oxford Happiness Questionnaire: a compact scale for the measurement of psychological well-being. *Personality and Individual Differences*, 33(7), 1073–1082. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0191-8869\(01\)00213-6](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0191-8869(01)00213-6)
- Himawan, K. K., Bambling, M., & Edirippulige, S. (2018). Singleness, religiosity, and the implications for counselors: The Indonesian case. In *Europe's Journal of Psychology* (Vol. 14, Issue 2, pp. 485–497). PsychOpen. <https://doi.org/10.5964/ejop.v14i2.1530>
- Hori, M., & Kamo, Y. (2018). Gender Differences in Happiness: the Effects of Marriage, Social Roles, and Social Support in East Asia. *Applied Research in Quality of Life*, 13(4), 839–857. <https://doi.org/10.1007/s11482-017-9559-y>
- Hsu, T.-L., & Barrett, A. E. (2020). The Association between Marital Status and Psychological Well-being: Variation across Negative and Positive Dimensions. *Journal of Family Issues*, 41(11). <https://doi.org/10.1177/0192513X20910184>
- Indonesia. (1975). *Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*.

- Karo, T. K. (2015, February 9). *Lebih bahagia mana, lajang atau menikah?* Jawaban.Com.
- Kennedy, H. R., Dalla, R. L., & Dreesman, S. (2018). "We are Two of the Lucky Ones": Experiences with Marriage and Wellbeing for Same-Sex Couples. *Journal of Homosexuality*, 65(9). <https://doi.org/10.1080/00918369.2017.1407612>
- Kislev, E. (2018). Happiness, Post-materialist Values, and the Unmarried. *Journal of Happiness Studies*, 19(8), 2243–2265. <https://doi.org/10.1007/s10902-017-9921-7>
- Lawrence, E. M., Rogers, R. G., Zajacova, A., & Wadsworth, T. (2019). Marital Happiness, Marital Status, Health, and Longevity. *Journal of Happiness Studies*, 20(5), 1539–1561. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10902-018-0009-9>
- Leung, L. (2002). Loneliness, Self-Disclosure, and ICQ ("I Seek You") Use. *CyberPsychology & Behavior*, 5(3). <https://doi.org/10.1089/109493102760147240>
- Lobos, G., Grunert, K. G., Bustamante, M., & Schnettler, B. (2016). With Health and Good Food, Great Life! Gender Differences and Happiness in Chilean Rural Older Adults. *Social Indicators Research*, 127(2). <https://doi.org/10.1007/s11205-015-0971-0>
- Margelisch, K., Schneewind, K. A., Violette, J., & Perrig-Chiello, P. (2017). Marital stability, satisfaction and well-being in old age: variability and continuity in long-term continuously married older persons. *Aging & Mental Health*, 21(4). <https://doi.org/10.1080/13607863.2015.1102197>
- Navaitis, G., Labutis, G., & Kairienė, B. (2016). The Marital Status and The Happiness. *SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference*, 1, 456–468. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17770/sie2016vol1.1513>
- Nelles, W., Nelles, W., & Shaw, D. J. (2002). Book Reviews / Comptes rendus. *Canadian Journal of Development Studies/Revue Canadienne d'études Du Développement*, 23(2). <https://doi.org/10.1080/02255189.2002.9668871>
- Pinquart, M. (2003). Loneliness in married, widowed, divorced, and never-married older adults. *Journal of Social and Personal Relationships*, 20(1). <https://doi.org/10.1177/0265407503020001186>
- Power, M. (2015). *Understanding Happiness*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315681337>
- Rahayu, T. P. (2016). Determinan Kebahagiaan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 18(1). <https://doi.org/10.24914/jeb.v19i1.485>
- Røysamb, E., Harris, J. R., Magnus, P., Vittersø, J., & Tambs, K. (2002). Subjective well-being. Sex-specific effects of genetic and environmental factors. *Personality and Individual Differences*, 32(2). [https://doi.org/10.1016/S0191-8869\(01\)00019-8](https://doi.org/10.1016/S0191-8869(01)00019-8)
- Seligman, M. E. P. (2002). *Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfillment*. Free Press.
- Shahbazi, masoud, & Khademali, G. (2018). The study and comparison of marital satisfaction, quality of life, happiness and life expectancy among married women with either less or more than five years of marital. *Biannual Journal of Applied Counseling*, 8(2), 39–54. <https://doi.org/10.22055/jac.2018.27623.1639>
- Stokes, J. E. (2017). Two-Wave Dyadic Analysis of Marital Quality and Loneliness in Later Life: Results From the Irish Longitudinal Study on Ageing. *Research on Aging*, 39(5). <https://doi.org/10.1177/0164027515624224>
- Stutzer, A., & Frey, B. S. (2006). Does marriage make people happy, or do happy people get married? *The Journal of Socio-Economics*, 35(2). <https://doi.org/10.1016/j.socec.2005.11.043>
- Susita, S. (2019, May 28). *Menurut survei, pernikahan lebih penting dari kekayaan jika ingin bahagia*. Womantalk.Com.
- Taylor, S. E. (1997). *Social psychology*. Prentice-Hall.
- Tkach, C., & Lyubomirsky, S. (2006). How Do People Pursue Happiness?: Relating Personality, Happiness-Increasing Strategies, and Well-Being. *Journal of Happiness Studies*, 7(2). <https://doi.org/10.1007/s10902-005-4754-1>
- Urbina, S., & Anastasi, A. (1997). *Study Guide [to] Psychological Testing, by Anne Anastasi, Susana Urbina*. Pearson Education/Prentice Hall.
- Vanassche, S., Swicegood, G., & Matthijs, K. (2013). Marriage and Children as a Key to Happiness? Cross-National Differences in the Effects of Marital Status and Children on Well-Being. *Journal of Happiness Studies*, 14(2), 501–524. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10902-012-9340-8>
- Wang, S.-Y., Wong, Y. J., & Yeh, K.-H. (2016). Relationship Harmony, Dialectical Coping, and Nonattachment. *The Counseling Psychologist*, 44(1). <https://doi.org/10.1177/0011000015616463>
- Xiao, L. E. I. (2017). "What We Want is to be Happy rather than Marrying": Exploring Japanese Single Women's Perceptions on Marriage, Childlessness and Being Single. *Journal of International and Advanced Japanese Studies*, 9, 15–29. http://japan.tsukuba.ac.jp/research/JIAJS9_PRINT02_XIAO.pdf
- Yoseph. (1994). Bersatu dalam segalanya. *Majalah Hidup*.
- Yuniariandini, A. (2016). Kebahagiaan Pernikahan: Pertemanan dan Komitmen. *Psikovidya*, 2(2), 53–58. <http://psikovidya.wisnuwardhana.ac.id/index.php/psikovidya/article/view/17>

Zhu, X., Wang, K., Chen, L., Cao, A., Chen, Q., Li, J., & Qiu, J. (2018). Together Means More Happiness: Relationship Status Moderates the Association between Brain Structure and Life Satisfaction. *Neuroscience*, 384, 406–4016. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2018.05.018>

Zweig, J. S. (2015). Are Women Happier than Men? Evidence from the Gallup World Poll. *Journal of Happiness Studies*, 16(2). <https://doi.org/10.1007/s10902-014-9521-8>

Koperasi Pemberdayaan Gepeng melalui Program Desaku Menanti ***Empowerment of Homeless Beggars Through Desaku Menanti Program***

Ikawati dan Sri Yuni Murtiwiidayanti

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS).

Jl. Kesejahteraan Sosial No 1 Nitipuran Yogyakarta

Email : ikawati.susatyo@yahoo.com Hp.087839561959, yunimurti@rocketmail.com. HP. 085747435299

Diterima 9 Juni 2020, diperbaiki 6 Oktober 2020, disetujui 3 November 2020

Abstract

This study aimed to determine the effectiveness of empowering Gepeng (= homeless beggars) through the Desaku Menanti Program. This type of research was Action Research. The research design used was Quasi Experiment Design in the form of One Group Pre-test & Post-test Design. Subjects and research locations were determined purposively, namely as many as 32 homeless beggars living in Malang City. Data to see the initial condition (pre-test) and the final condition (post-test) were collected by conducting testing with in-depth interviews considering the low education level of respondents and even some were in illiteracy. Researchers found the effectiveness of homeless beggars empowerment through Desaku Menanti Program in order to make them independent, namely by examining conditions between before and after undergoing the empowerment program. Based on the findings, it was recommended that regular and ongoing mentoring was needed for empowerment participants. This was because not all participants had changed their mindset. The marketing factor was still the main inhibiting factor. The skills gained from empowerment provided opportunities to increase family income. This required the involvement of related parties, especially the Office of Industry and Trade which had a big share in marketing so as to help support the independence of Gepeng or homeless beggars and their families through productive economic efforts. The Indonesian Ministry of Social Affairs, through the Directorate of Social Rehabilitation for people who are not socially prosperous (Tuna Sosial), was advised to carry out empowerment of the homeless beggars through the guidance of skills according to their interests and talents by considering potential sources for production from around where they lived. Desaku Menanti Program was expected to be implemented by local governments more broadly in all provinces. The program was able to solve social problems in urban areas, namely that it could prevent urban people from earning a living in the city without work skills, could increase local government involvement in Gepeng problems, could empower Gepeng to want to do business and work, and this program was one of the programs to reduce the number of poverty .

Keywords: empowerment; homeless beggars; Desaku Menanti Program

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemberdayaan Gepeng (gelandangan pengemis) melalui program Desaku Menanti. Jenis penelitian ini adalah Action Research. Rancangan penelitian yang digunakan adalah Quasi Experiment Design dalam bentuk One Group Pre-test – Post-test Design. Subjek dan lokasi penelitian ditentukan secara purposive yaitu Gepeng sebanyak 32 orang yang tinggal di Kota Malang. Data untuk melihat kondisi awal (pre-test) dan kondisi akhir (post-test) dikumpulkan dengan melakukan testing dengan wawancara mendalam mengingat tingkat pendidikan responden rendah bahkan buta huruf. Peneliti menemukan adanya efektivitas pemberdayaan Gepeng melalui program Desaku Menanti guna mewujudkan kemandirian Gepeng, yakni dengan cara mencermati kondisi antara sebelum dan sesudah menjalani program pemberdayaan tersebut. Berdasarkan hasil temuan, direkomendasikan bahwa pendampingan rutin dan berkelanjutan diperlukan bagi peserta pemberdayaan. Hal ini mengingat bahwa belum semua peserta berubah pola pikirnya. Faktor pemasaran masih menjadi faktor penghambat yang utama. Keterampilan yang diperoleh dari pemberdayaan memberi peluang untuk dapat menambah pendapatan keluarga. Ini memerlukan keterlibatan pihak terkait terutama Dinas Perindustrian Perdagangan yang mempunyai andil besar dalam pemasaran sehingga membantu kemandirian Gepeng dan keluarga mereka melalui usaha ekonomi produktif. Kementerian Sosial RI melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial untuk Tuna Sosial disarankan untuk melakukan pemberdayaan Gepeng melalui bimbingan keterampilan sesuai minat dan bakat dengan mempertimbangkan sumber potensi untuk produksi dari sekitar tempat tinggal mereka. Program Desaku Menanti diharapkan dapat diterapkan oleh pemerintah daerah secara lebih luas di

semua provinsi. Program tersebut mampu memecahkan masalah sosial di perkotaan yakni dapat mencegah kaum urban mencari nafkah ke kota tanpa keterampilan kerja, mampu meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah dalam masalah Gepeng, mampu memberdayakan Gepeng untuk mau berusaha dan bekerja, dan program tersebut merupakan salah satu program untuk mengurangi jumlah kemiskinan.

Kata Kunci: pemberdayaan; gepeng; Program Desaku Menanti

Pendahuluan

Stigma masyarakat tentang Gepeng adalah negatif, seperti sampah masyarakat yang terlihat merusak pemandangan dan ketertiban umum, kotor, sumber kriminal, tanpa norma, tidak dapat dipercaya, tidak teratur, penipu, pencuri, malas dan apatis (Bagong Suyanto, 2010). Kondisi ini berakibat adanya diskriminasi yaitu ada jarak dengan masyarakat pada umumnya, sehingga mereka sulit mengembangkan potensi dan mendayagunakan dirinya sendiri (Weinberg & Martin, S, 1981). Daya tarik kota menjadi salah satu penyebab terjadinya peningkatan jumlah penduduk desa ke kota atau urbanisasi (Bagong Suyanto, 2010). Mereka ke kota tanpa bekal apapun untuk menopang hidupnya karena keterbatasan pendidikan, pengetahuan, wawasan dan keterampilan (Irsan Suani, 2015). Akibatnya, mereka menghadapi kesulitan ekonomi, sosial, psikologis dan budaya (Gunansyah, 2015) sehingga akhirnya di kota hidup menggelandang (gelandangan dan pengemis atau Gepeng).

Amanat dalam UUD 1945, pasal 27, setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 34 ayat 1 mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara, sementara pasal 34 ayat 2 menegaskan Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Amanat tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh pihak terkait dalam hal ini Kementerian sosial terutama pada gelandangan dan pengemis melalui suatu program Desaku Menanti.

Secara yuridis formal UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dalam

pasal 3 tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan (1) meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup; (2) memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; (3) meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; (4) meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembagakan berkelanjutan; (5) meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; serta (6) meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis dan Keputusan Presiden RI Nomor. 40 tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Peraturan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial dalam kegiatan Desaku Menanti

Kementerian Sosial RI, melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial mengembangkan sebuah model terpadu berbasis desa tentang penanganan Gepeng yang diberi nama Desaku Menanti baik bersifat preventif, rehabilitatif, suportif yang dilakukan bersamaan, simultan dan berkesinambungan melalui pemberdayaan, jaminan dan perlindungan sosial dengan menjadikan masyarakat dan desa sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Kementerian Sosial RI mengembangkan Program Desaku Menanti sebagai salah satu solusi mengatasi gelandangan dan pengemis. Sesuai dengan undang-undang, Kementerian Sosial menjadi *leading sector* dalam penanganan Gepeng.

Rehabilitasi sosial berbasis masyarakat dalam paradigma baru tidak lagi mengandalkan bantuan dan fasilitas yang diberikan pemerintah. Namun lebih mengoptimalkan sumber-sumber atau potensi yang ada di masyarakat. Program Desaku Menanti merupakan alternatif penanganan yang ditawarkan dengan tujuan untuk memberikan sentuhan baik sebelum menjadi Gepeng dan setelah menjadi Gepeng serta pemberdayaan di kampung halamannya (daerah asal). Kegiatan Program Desaku Menanti berfokus kepada penanganan keluarga Gepeng termasuk di dalamnya anak dan orangtua. Sedangkan untuk keberhasilan Program Desaku Menanti yang terbesar adalah potensi dan sumber yang ada di desa dimanfaatkan secara optimal.

Prinsip umum dalam program Desaku Menanti (Rohman Arif, 2013) adalah (1) individualisasi, artinya setiap Gepeng tidak disamaratakan begitu saja dalam penanganan, tetapi harus dipahami secara khusus sesuai dengan keunikan pribadi dan masalah mereka masing-masing; (2) penghargaan terhadap harkat dan martabat, artinya Gepeng sebagai manusia diterima dan dihargai sebagai pribadi yang utuh dalam kehidupan bermasyarakat; (3) penerimaan, artinya mengedepankan upaya dan perlakuan terhadap Gepeng secara apa adanya dengan kelebihan dan kekurangannya. Gepeng diberi kesempatan sama, seluas-luasnya untuk mengembangkan diri dan berperan serta dalam berbagai aktivitas kehidupan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.

Hasil temuan penelitian B2P3KS (Siti Wahyu Iryani dkk., 2017), yakni belum optimalnya pemberdayaan Gepeng melalui keterampilan dalam program Desaku Menanti, terutama dalam kegiatan pemasaran hasil usaha dan pendampingan kewirausahaan. Belum optimalnya tersebut menjadi kendala dalam pemberdayaan Gepeng ke arah kemandirian berusaha. Kemandirian berusaha yang dimiliki dapat meningkatkan pendapatan bagi Gepeng yang pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan keluarga.

Keberhasilan implementasi program Desaku Menanti membutuhkan keterlibatan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, LKS, dunia usaha dan elemen masyarakat. Titik sukses keberhasilan penerima manfaat/Gepeng diperlukan kemauan yang keras untuk berusaha, dilandasi jiwa militansi (semangat juang) yang tinggi dalam merubah pola pikir, pola tindak agar Gepeng mampu berfungsi sosial.

Berdasarkan temuan hasil penelitian B2P3KS (2017) tersebut, dilakukan tindak lanjut melalui kegiatan penyelenggaraan Laboratorium Sosial B2P3KS dengan judul penelitian Pemberdayaan Gepeng melalui Program Desaku Menanti. Rumusan masalah yang diajukan: bagaimanakah efektivitas pemberdayaan Gepeng melalui Program Desaku Menanti? Berdasarkan rumusan tersebut tujuan penelitiannya adalah diketahui efektivitas pemberdayaan gepeng melalui Program Desaku Menanti.

Untuk melihat efektivitas pemberdayaan Gepeng melalui Program Desaku Menanti diajukan beberapa hipotesis berikut: Ada perbedaan tingkat pemahaman Gepeng (variabel X) : (1) tentang pentingnya peran dan fungsi keluarga; (2) tentang cara mengatasi permasalahan keluarganya; (3) tentang penentuan pemecahan masalahnya dengan mengacu potensi dan sumber kesejahteraan sosial; (4) tentang kewirausahaan; (5) tentang menentukan keterampilan kerja yang disesuaikan dengan minat dan bakat untuk menentukan UEP yang di kerjakan; (6) tentang pemahaman melalui bantuan stimulan untuk berusaha mandiri yang disesuaikan dengan minat bakat serta pasar kerja, sebelum dan sesudah dilakukan pemberdayaan melalui *treatment* berupa PBS.

Untuk melihat efektivitas (variabel Y) tersebut, maka diajukan beberapa hipotesis berikut. (7) Ada perbedaan kepemilikan keterampilan kerja sesuai dengan minat dan bakat serta pasaran sebelum dan sesudah dilakukan pemberdayaan melalui *treatment* berupa PBS; (8) Ada perbedaan kepemilikan

UEP untuk kemandirian ekonomi keluarga sebelum dan sesudah dilakukan pemberdayaan melalui *treatmen* berupa PB; (9) Ada perbedaan peran aktif di masyarakat sebelum dan sesudah dilakukan pemberdayaan melalui *treatmen* berupa PBS; (10) Ada perbedaan tingkat kepercayaan diri dan harga diri sebelum dan sesudah dilakukan pemberdayaan melalui *treatmen* berupa PBS; (11) Ada perbedaan perubahan perilaku tidak kembali menjadi gepeng sebelum dan sesudah dilakukan pemberdayaan melalui *treatmen* berupa PBS; (12) Ada perbedaan keinginan untuk kembali ke daerah asal sebelum dan sesudah dilakukan pemberdayaan melalui *treatmen* berupa PBS; (13) Ada perbedaan keinginan untuk memiliki tempat tinggal yang tetap sebelum dan sesudah dilakukan pemberdayaan melalui *treatmen* berupa PBS.

Penggunaan Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *Action Research* karena akan melihat efektivitas pemberdayaan Gepeng melalui Program Desaku Menanti di Kota Malang. Rancangan penelitian yang digunakan adalah *Quasi Exsperimen Design* dalam bentuk *One Group Pretest Post Test Design*. Esensi analisis yang terkandung dalam rancangan penelitian ini adalah perbandingan antar kelompok subjek penelitian dan antarwaktu yang tercermin dalam perbedaan nilai dari sejumlah variabel antara sebelum dan sesudah *treatment*/perlakuan (Stanley dan Campbell, 1986). Peneliti memanipulasi suatu gejala yang direncanakan (*treatment*) secara teratur bertujuan untuk peningkatan pemecahan masalah dan perubahan tingkah laku (Sudjud, 2010). Menurut Vredenbregt (1984) pada kelompok ujicoba dikenai perlakuan/*treatment* pada variabel bebas (independent variabel). Penelitian ini menguji ada tidaknya hubungan sebab akibat yang terjadi pada variabel terikat/dependent (Y) sebagai akibat dari manipulasi secara sengaja pada variabel bebas.

Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* dengan pertimbangan bahwa lokasi

penelitian sudah terkena program Desaku Menanti dan sudah berjalan (*Pilot Project* Kementerian Sosial). Melalui teknik tersebut ditentukan lokasi Kota Malang Provinsi Jawa Timur.

Subjek penelitian ditentukan secara *purposive* yaitu Gepeng sebagai penerima manfaat dalam Program Desaku Menanti, yang berusia <60 tahun, masih produktif, mempunyai keluarga, menjadi Gepeng karena keterpaksaan, tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan mau mengikuti kegiatan pemberdayaan. Melalui teknik tersebut, maka ditentukan sebanyak 32 orang. Penentuan subjek penelitian tersebut sesuai dengan sasaran Program Desaku Menanti yakni (1) gelandangan, yaitu kelompok umur dibawah 55 tahun, memiliki keluarga/kerabat di desa, menjadi gelandangan karena keterpaksaan, tidak memiliki tempat tinggal tetap dan tidak memiliki tanda identitas resmi; (2) pengemis, yaitu kelompok umur dibawah 55 tahun, memiliki keluarga/kerabat di desa, menjadi pengemis karena keterpaksaan, tidak memiliki tempat tinggal tetap dan tidak memiliki tanda identitas resmi (Rohman Arif, 2013).

Penentuan informan penelitian berdasarkan *purposive* dengan alasan dianggap relevan dan berkompeten dalam mengungkap pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial Gepeng melalui Program Desaku Menanti. Berdasarkan hal tersebut, ditentukan informan dari pengelola Program Desaku Menanti, SKPD terkait yang melaksanakan Program Desaku Menanti, LKS, dunia usaha yang terlibat dalam pelaksanaan Program Desaku Menanti.

Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan testing dengan pedoman wawancara yang sudah dipersiapkan, melalui wawancara mendalam untuk memperoleh berbagai masukan yang lebih banyak dan berkembang. Selain itu juga untuk menghindari tidak terjawabnya pertanyaan, mengingat tingkat pendidikan responden rendah atau bahkan buta huruf. Testing dipergunakan untuk melihat kondisi awal (pre-test) sebelum ada perlakuan/*treatment* berupa penyuluhan dan bimbingan

sosial (PBS) dan untuk melihat kondisi akhir (post-test) setelah dilakukan treatment kepada peserta pemberdayaan (Gepeng).

Teknik analisis data untuk melihat efektivitas pemberdayaan Gepeng melalui bimbingan keterampilan guna mewujudkan kesejahteraan keluarga, digunakan uji komparasi melalui kelompok yang sama (Gepeng) dengan tenggang waktu yang berbeda yaitu pre-test sebelum mendapatkan intervensi yakni pemberdayaan Gepeng melalui PBS dan *post-test* sesudah mendapatkan intervensi. Esensi analisis yang terkandung dalam rancangan penelitian ini adalah perbandingan antarkelompok subjek penelitian dan antarwaktu yang tercermin dalam perbedaan nilai rerata atau mean dari sejumlah variabel antara sebelum dan sesudah *treatment*/perlakuan (Stanley, J.C & Campbell, 1966). Peneliti melihat manipulasi suatu gejala yang direncanakan (*treatment*) secara teratur bertujuan untuk peningkatan pemecahan masalah dan perubahan tingkah laku (Sujud dalam Ikawati, 2005).

Penelitian ini menguji ada tidaknya hubungan sebab akibat yang terjadi pada variabel terikat/dependent (y) sebagai akibat dari manipulasi secara sengaja pada variabel bebas/independent (x). Pada penelitian ini kelompok Gepeng akan dikenai *treatment*/perlakuan (variabel x) berupa pemberdayaan Gepeng melalui kegiatan PBS dengan materi: (1) peran dan fungsi keluarga (oleh psikolog); (2) strategi mengatasi permasalahan keluarga dan pemecahan masalah melalui pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (oleh Bappeda); (3) kewirausahaan (oleh LKS Insan Sejahtera); (4) bimbingan keterampilan Kardus (Dunia Usaha), bimbingan keterampilan membuat topeng (dunia usaha), dan bimbingan

keterampilan payung (dunia usaha). Dengan PBS diharapkan: (1) Gepeng paham tentang pentingnya peran dan fungsi keluarga; (2) Gepeng dapat mengatasi permasalahan keluarga; (3) Gepeng dapat menentukan pemecahan masalahnya dengan mengacu potensi dan sumber kesejahteraan sosial; (4) Gepeng paham tentang kewirausahaan; (5) Gepeng dapat menentukan keterampilan kerja sesuai dengan minat dan bakat untuk menentukan UEP yang akan di kerjakan.

Intervensi pemberdayaan Gepeng melalui Program Desaku Menanti, antara lain dapat diukur dari variabel Y (kemandirian Gepeng) yakni: (1) kepemilikan keterampilan kerja sesuai dengan minat dan bakat dan pasaran; (2) kepemilikan UEP untuk kemandirian ekonomi keluarga; (3) peran aktif di masyarakat; (4) kepercayaan diri dan harga diri; (5) berubahnya tingkah laku dengan tidak kembali menjadi Gepeng; (6) mempunyai keinginan kembali ke daerah asal; dan (7) mempunyai keinginan memiliki tempat tinggal yang tetap.

Hasil dan Pembahasan

Efektivitas pemberdayaan Gepeng melalui Program Desaku Menanti ditinjau dari Pre-Post Test Treatment PBS.

Variabel X yang akan diamati: (a) X1: sebelum PBS/treatment dan (b) X2: setelah PBS/treatment.

Untuk menjawab hipotesa yang diajukan maka dalam Tabel 1 dapat dilihat hasil uji hipotesa dibawah ini yaitu dari hipotesa pertama sampai dengan hipotesa keenam dilakukan pengujian hipotesis menggunakan program komputerisasi dengan modul analisis dwivariat program uji t-test amatan ulangan Edisi (Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih, 2000).

Tabel 1.
Rangkuman Analisis Uji t-test Pemberdayaan Gepeng melalui Program Desaku Menanti (variabel X)

Hipotesa	P	Uji Amatan (A1-A2)	Mean	T	Signifikansi	Kesimpulan	Keterangan
1	0,000	Gepeng paham ttg pentingnya peran dan fungsi keluarga	A1= 8,500 A2 = 13,844	-22,650	p<0,01 sangat signifikan	Hipotesis pertama diterima	Ada perbedaan tingkat pemahaman Gepeng tentang pentingnya peran dan fungsi keluarga sebelum dan sesudah dilakukan pemberdayaan
2	0,000	Gepeng dapat mengatasi permasalahan keluarganya	A1= 8,063 A2 = 14,531	-14,940	p<0,01 sangat signifikan	Hipotesis kedua diterima	Ada perbedaan tingkat pemahaman Gepeng tentang mengatasi masalah keluarganya sebelum dan sesudah dilakukan pemberdayaan
3	0,000	Gepeng dapat memecahkan masalahnya dengan mengacu potensi dan sumber kesos	A1= 7,031 A2 = 14,000	-18,486	p<0,01 sangat signifikan	Hipotesis ketiga diterima	Ada perbedaan tingkat pemahaman Gepeng dalam menentukan pemecahan masalahnya dengan mengacu potensi dan sumber kesos sebelum dan sesudah dilakukan pemberdayaan
4	0,000	Gepeng paham tentang kewirausahaan	A1= 7,031 A2 = 12,906	-18,740	p<0,01 sangat signifikan	Hipotesis keempat diterima	Ada perbedaan tingkat pemahaman Gepeng tentang kewirausahaan sebelum dan sesudah dilakukan pemberdayaan
5	0,000	Gepeng dapat menentukan keterampilan kerja sesuai dengan minat dan bakat	A1= 6,781 A2 = 14,688	-17,754	p<0,01 sangat signifikan	Hipotesis kelima diterima	Ada perbedaan tingkat pemahaman Gepeng dapat menentukan keterampilan kerja sesuai dengan minat dan bakat sebelum dan sesudah dilakukan pemberdayaan
6	0,000	Gepeng melalui bantuan stimulan, dapat berusaha mandiri dan sesuai dengan minat dan bakatnya serta pasaran.	A1= 8,063 A2 = 14,813	-17,595	p<0,01 sangat signifikan	Hipotesis keenam diterima	Ada perbedaan tingkat pemahaman Gepeng melalui bantuan stimulan, berusaha mandiri karena disesuaikan dengan minat bakat serta pasaran sebelum dan sesudah dilakukan pemberdayaan

Sumber: Hasil Analisis SPS Sutrisno Hadi (Program Dwi Variat; Uji t-test)

Kesimpulan hasil treatment melalui PBS (variabel X) efektif baik sebelum maupun sesudah pemberdayaan. Efektivitas tersebut ditunjukkan data lapangan bahwa ada perbedaan pemahaman gepeng yakni: (1) Gepeng paham tentang pentingnya peran dan fungsi keluarga sebelum dan sesudah pemberdayaan melalui PBS yaitu ada perbedaan sebelum pemberdayaan yang paham ada 12,55 persen dan sesudah pemberdayaan menjadi 93,75 persen. Pemahaman tersebut meliputi pemahaman Gepeng dalam hal kepala keluarga harus memiliki penghasilan tetap untuk menghidupi keluarga, harus bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga, dapat mendidik anak dengan baik, dapat memotivasi anak untuk bersekolah, dan kepala keluarga harus ikut berpartisipasi dalam masyarakat.

(2) Gepeng paham dalam mengatasi permasalahan keluarga sebelum dan sesudah pemberdayaan melalui PBS yaitu ada perbedaan sebelum pemberdayaan yang paham ada 9,37 persen dan sesudah pemberdayaan menjadi 96,87 persen. Gepeng paham bahwa kepala keluarga harus tahu kondisi keluarga terutama kekurangan dan keterbatasannya, maka harus lebih giat untuk mencukupi kebutuhan keluarga, mencari upaya dan solusi untuk mencukupi kebutuhan keluarga, bekerja keras untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan harus mempunyai keterampilan kerja yang dapat dipakai memenuhi kebutuhan keluarga.

(3) Gepeng paham dalam menentukan pemecahan masalah mengacu potensi dan sumber kesejahteraan sosial sebelum dan sesudah pemberdayaan melalui PBS yaitu ada perbedaan sebelum pemberdayaan tidak ada

(0%) yang paham dan sesudah pemberdayaan menjadi 96,88 persen paham. Gepeng paham bahwa kepala keluarga harus mempunyai keterampilan kerja sesuai yang diminati sehingga akan lebih sukses dan berhasil, harus dapat menggerakkan anggota keluarga untuk bekerja sama memenuhi kebutuhan keluarga, keluarga harus dapat membaca peluang kerja sehingga dapat dipakai untuk mencari kerja, dan kepala keluarga harus mampu memanfaatkan kemampuannya untuk dapat mencukupi kebutuhan keluarga.

(4) Gepeng paham tentang kewirausahaan sebelum dan sesudah pemberdayaan melalui PBS yaitu ada perbedaan sebelum pemberdayaan tidak ada (0%) yang paham dan sesudah pemberdayaan menjadi 59,38 persen paham. Gepeng paham bahwa kepala keluarga harus dapat merencanakan usaha yang akan dikerjakan, harus mempunyai target terhadap usaha yang akan dikerjakan, harus disiplin terhadap pengaturan uang agar usahanya dapat maju dan berkelanjutan dan harus dapat berjejaring atau kerja sama dengan pihak lain agar usahanya berkembang.

(5) Gepeng paham dalam menentukan keterampilan sesuai dengan minat dan bakat guna UEP yang akan dikerjakan sebelum dan sesudah pemberdayaan melalui PBS yaitu ada perbedaan sebelum pemberdayaan ada 3,13 persen paham dan sesudah pemberdayaan menjadi 96,87 persen. Gepeng paham bahwa kepala keluarga memiliki usaha yang dikerjakan didasarkan minat dan bakat akan berhasil, harus tekun terhadap keterampilan kerja yang sudah dipilih dan keterampilan kerja yang diikuti hendaknya digunakan dengan baik agar dapat dipakai untuk mencari nafkah keluarga.

(6) Gepeng paham tentang keterampilan sesuai dengan minat bakat didukung adanya bantuan stimulan, agar dapat mandiri sebelum dan sesudah pemberdayaan melalui PBS yaitu ada perbedaan sebelum pemberdayaan tidak ada yang paham (0%) dan sesudah pemberdayaan 100 persen menjadi paham. Gepeng paham bahwa kepala keluarga dengan memiliki

keterampilan kerja yang sesuai dengan minat dan bakat serta didukung adanya bantuan stimulan dapat mandiri; kepemilikan keterampilan yang diikuti sudah sesuai dengan minat dan bakat serta UEP sehingga dapat mencari nafkah; bantuan stimulan dimanfaatkan dengan baik sehingga dapat untuk mencari nafkah keluarga; dan kesempatan yang ada hendaknya digunakan sebaik-baiknya agar ermanfaat untuk mencari nafkah. Menurut Sumodiningrat (2001), bahwa strategi pemberdayaan dapat dilakukan melalui pengembangan ekonomi sebagai modal usaha. Apabila dikaitkan dengan pemberdayaan Gepeng dalam penelitian ini, pemberian bantuan stimulan untuk modal usaha, bila dimanfaatkan dengan baik dapat menambah penghasilan keluarga. Menurut Runian Brow (Payne, 1986) bahwa pemberdayaan dapat bermanfaat bagi penerima manfaat, apabila dilakukan dengan langkah-langkah pendayagunaan kesejahteraan sosial, yakni dapat mengatur, mengalokasikan dan menggunakan sumber potensi yang ada. Apabila dikaitkan dengan pemberdayaan dalam penelitian ini bahwa kepemilikan keterampilan dengan mempertimbangkan sumber potensi yang ada dapat berhasil dan dapat berkesinambungan.

Efektivitas pemberdayaan Gepeng melalui Desaku Menanti ditinjau dari Pre-Post Pemberian Bantuan Stimulan.

Perbedaan variabel Y: Kemandirian Gepeng sebelum pemberdayaan dan variabel Y setelah pemberdayaan.

Untuk menjawab hipotesa-hipotesa yang diajukan maka dalam Tabel 2 dapat dilihat hasil uji hipotesa dibawah ini, yakni dari hipotesa tujuh sampai dengan hipotesa tigabelas. Pengujian hipotesis menggunakan program komputerisasi dengan modul analisis dwivariat program uji t-test amatan ulangan Edisi (Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningasih, 2000). Memudahkan penghitungan dilakukan dengan program komputerisasi modul analisis dwivariat program uji t-test Amatan Ulangan Edisi Sutrisnohadi dan Yuni Pamardiningasih (UGM). Hasilnya sebagai berikut.

Tabel 2.
Rangkuman Analisis Uji t-test Pemberdayaan Gepeng melalui Program Desaku Menanti (variabel Y)

Hipotesa	P	Uji Amatan (A1-A2)	Mean	T	Signifikansi	Kesimpulan	Keterangan
7	0,010	Kepemilikan keterampilan kerja sesuai dengan minat dan bakat serta pasaran	A1=10,879 A2=12,000	-3,768	P<0,05, artinya signifikan	Hipotesa ketujuh diterima	Ada perbedaan kepemilikan keterampilan kerja sesuai dengan minat dan bakat serta pasaran sebelum dan sesudah pemberdayaan
8	0,000	Kepemilikan UEP untuk kemandirian ekonomi keluarga	A1=11,455 A2=14,879	-8,965	P<0,01, artinya sangat signifikan	Hipotesa kedelapan diterima	Ada perbedaan kepemilikan UEP untuk kemandirian ekonomi sebelum dan sesudah pemberdayaan
9	0,000	Peran aktif di masyarakat	A1=12,636 A2=14,545	-6,062	P<0,01, artinya sangat signifikan	Hipotesa kesembilan diterima	Ada perbedaan peran atau keterlibatan di masyarakat sebelum dan sesudah pemberdayaan
10	0,000	Kepercayaan diri dan harga diri	A1=13,394 A2=14,939	-5,911	P<0,01, artinya sangat signifikan	Hipotesa kesepuluh diterima	Ada perbedaan kepercayaan diri dan harga diri sebelum dan sesudah pemberdayaan
11	0,000	Berubahnya tingkah laku dengan tidak kembali menjadi Gepeng	A1=12,485 A2=14,697	-5,802	P<0,01, artinya sangat signifikan	Hipotesa kesebelas diterima	Ada perbedaan perilaku dengan tidak kembali menjadi gepeng sebelum dan sesudah pemberdayaan
12	0,000	Mempunyai keinginan kembali ke daerah asal	A1=10,667 A2=13,333	-5,533	P<0,01, artinya sangat signifikan	Hipotesa keduabelas diterima	Ada perbedaan keinginan kembali ke daerah asal sebelum dan sesudah pemberdayaan
13	0,000	Mempunyai keinginan memiliki tempat tinggal tetap	A1=12,970 A2=14,909	-4,984	P<0,01, artinya sangat signifikan	Hipotesa ketigabelas diterima	Ada perbedaan keinginan memiliki tempat tinggal tetap sebelum dan sesudah pemberdayaan

Sumber: Hasil Analisis SPS Sutrisno Hadi (Program Dwi Variat: Uji t-test)

Kesimpulan hasil treatment melalui PBS (variabel Y= kemandirian Gepeng) menunjukkan efektif sebelum dan sesudah pemberdayaan. Tingkat efektivitas tersebut data temuan lapangan yakni ada peningkatan dalam hal: (1) Gepeng mempunyai tingkat kepemilikan keterampilan kerja sesuai dengan minat dan bakat serta pasar kerja sebelum dan sesudah pemberdayaan melalui PBS yang mengalami peningkatan sebelum pemberdayaan ada 3,13 persen dan sesudah pemberdayaan menjadi 100 persen. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari keterampilan kerja sudah sesuai minat dan bakat, sesuai pasar kerja, sesuai minat, bakat dan dapat untuk mencari nafkah, dan keterampilan kerja sesuai dengan pasar kerja, sehingga dapat membantu keberhasilan usaha.

(2) Gepeng mempunyai tingkat kepemilikan UEP untuk kemandirian ekonomi keluarga sebelum dan sesudah pemberdayaan melalui PBS yaitu ada peningkatan sebelum pemberdayaan

tidak ada (0%) dan sesudah pemberdayaan menjadi 100 persen. Peningkatan tersebut terkait keterampilan kerja sesuai minat dan bakat serta mampu membantu UEP. UEP yang disesuaikan dengan keterampilan kerja dan ditekuni dapat membantu mencari nafkah, membantu mencukupi kebutuhan keluarga, dan UEP yang dilakukan sesuai keinginan melibatkan seluruh anggota keluarga. Menurut Sumodiningrat (2001) bahwa upaya pemberdayaan masyarakat salah satunya melalui peningkatan kemampuan keterampilan dengan membangun *capacity building* melalui keterampilan yang disesuaikan dengan minat dan bakat akan lebih berhasil. Bila dikaitkan dengan pemberdayaan dalam penelitian ini ada beberapa alternatif bimbingan keterampilan yang diajukan, peserta pemberdayaan menentukan sendiri bimbingan keterampilan yang diminati dan disesuaikan dengan bakatnya, dari penentuan tersebut ada tiga kelompok bimbingan keterampilan yaitu

pembuatan topeng, pembuatan kardus dan pembuatan payung *moto*. Data yang ditemukan di atas juga didukung asli Jalal dan Nina Sardjunani (1996), bahwa esensi pemberdayaan masyarakat adalah memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat miskin, apabila dikaitkan dengan penelitian ini, maka bimbingan keterampilan telah memberikan kemampuan pada peserta pemberdayaan (Gepeng) untuk memperkuat potensi yang ada dalam keluarga agar berdaya, dengan keberdayaan tersebut keterampilan yang dimiliki ditularkan kepada anggota keluarga lain. Hal itu sesuai dengan prinsip khusus dalam Program Desaku Menanti yakni: (a) partisipasi, Gepeng beserta orang terdekat diikutsertakan dan dapat berperan optimal dalam upaya pelayanan dan rehabilitasi kembali ke masyarakat; (b) rehabilitasi berbasis desa, artinya penanganan Gepeng melalui program rehabilitasi sosial lebih dititikberatkan pada fungsi preventif, perlindungan dan pemberdayaan yang mengedepankan sumber daya manusia dan potensi yang ada di desa; (c) kapasitas kelembagaan lokal, artinya jaringan dan keterlibatan kelembagaan lokal yang ada di desa diarahkan untuk memberi dukungan materi ataupun nonmateri guna meningkatkan keberhasilan program; (d) keluarga sebagai pelaku, artinya program ini meyakini bahwa keluarga adalah kekuatan basis dan pelaku utama program baik keluarga dari para Gepeng ataupun keluarga lain; (e) potensi modal sosial, artinya program ini mendorong penguatan nilai-nilai, norma, kepercayaan serta jaringan sosial yang sudah ada di desa (Arif Rohman, 2013). Tujuan Program Desaku Menanti adalah (a) meningkatnya kapasitas Gepeng; (b) terciptanya kesempatan berusaha dan bekerja (c) memperkuat peran Gepeng dalam pengambilan keputusan; (d) meningkatnya kualitas kehidupan Gepeng; (e) meningkatnya akses Gepeng terhadap pelayanan sosial dasar; (f) memberikan jaminan sosial dan rasa aman (Arif Rohman, 2013).

(3) Gepeng meningkat peran aktifnya di masyarakat sebelum dan sesudah pemberdayaan

melalui PBS yaitu ada perbedaan sebelum pemberdayaan tidak ada (0%) dan sesudah pemberdayaan menjadi 100 persen. Peningkatan tersebut yakni dapat melakukan penyesuaian diri dengan sesama peserta pemberdayaan, dapat melakukan kerja bakti di lingkungan sekitar, dapat melakukan silaturahmi dengan masyarakat sekitar, terlibat dalam kegiatan sosial dengan sesama penghuni/tetangga, dan dengan masyarakat sekitar. Penelitian Ikawati (2014) Ikawati (2014) menemukan, bahwa kemiskinan membuat keluarga waktunya tersita untuk mencari nafkah sehingga tidak mempunyai kesempatan terlibat atau berperan aktif di masyarakat. Bila dikaitkan dengan pemberdayaan dalam penelitian ini, maka peningkatan pendapatan mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari dan dapat melakukan fungsi sosial dengan baik.

(4) Gepeng meningkat kepercayaan dirinya sebelum dan sesudah pemberdayaan melalui PBS, sebelum pemberdayaan tidak ada (0%), dan sesudah pemberdayaan menjadi 100 persen. Peningkatan tersebut dalam hal merasa dihargai karena telah memiliki KTP, percaya diri ketika berhubungan dengan orang lain, percaya diri ketika ikut kegiatan di masyarakat, memiliki harga diri ketika punya pekerjaan, dan mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Data yang ditemukan tersebut didukung oleh pendapat Awang, San Afri (2008) bahwa pemberdayaan keluarga miskin mengandung makna pengakuan terhadap potensi, kepercayaan dan kesempatan yang mendorong kemandirian, serta peningkatan kemampuan dalam memecahkan masalah. Bila dikaitkan dengan pemberdayaan dalam penelitian ini Gepeng mampu mengejar ketertinggalan, mampu berswadaya dan meningkatkan pendapatan keluarga, melalui kepemilikan keterampilan dapat mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

(5) Gepeng mengalami perubahan perilaku untuk tidak kembali menjadi Gepeng sebelum dan sesudah pemberdayaan melalui PBS yaitu ada perbedaan sebelum ada 46,87 persen dan sesudah menjadi 96,87 persen. Peningkatan

tersebut dalam hal bekerja sebagai Gepeng tidak menjanjikan penghasilann, bekerja sebagai Gepeng tidak nyaman, tidak tenang dan berisiko, serta tidak ada keinginan kembali bekerja sebagai Gepeng. Menurut Sayogyo (1986) bahwa keberdayaan pada masyarakat memungkinkan masyarakat dapat bertahan (*survive*) dan dinamis untuk mengembangkan diri. Bila dikaitkan dengan pemberdayaan Gepeng pada penelitian ini pemberdayaan mampu merubah pola pikir dari negatif ke positif.

(6) Gepeng mengalami perubahan terkait keinginan kembali ke daerah asal, sebelum dan sesudah pemberdayaan melalui PBS yaitu ada perbedaan sebelum pemberdayaan 12,5 persen, dan sesudah pemberdayaan menjadi 96,87 persen. Peningkatan tersebut usaha menabung untuk dapat kembali ke daerah asal, keinginan kembali ke daerah asal dengan bekal keterampilan kerja yang didapat, dan keinginan mengunjungi keluarga.

(7) Gepeng mengalami perubahan dalam hal keinginan memiliki tempat tinggal yang tetap, sebelum dan sesudah pemberdayaan melalui PBS yaitu ada perbedaan sebelum pemberdayaan 3,13 persen dan sesudah pemberdayaan menjadi 96,87 persen. Peningkatan tersebut ditunjukkan dengan bekerja keras agar dapat menabung, optimis dalam usaha, memiliki cita-cita dapat memiliki tempat tinggal/rumah tetap, serta memiliki keyakinan doanya dikabulkan oleh Tuhan. Menurut Sayogyo (1986) bahwa pemberdayaan mampu merubah pola pikir dari negatif ke positif, ditunjukkan dengan usaha menabung, tidak ingin menjadi Gepeng, ingin kembali ke daerah asal dan mempunyai tempat tinggal sendiri atau tetap.

Penutup

Kesimpulan: Kajian penelitian ini dapat disimpulkan adanya efektivitas pemberdayaan Gepeng melalui Program Desaku Menanti sebelum dan sesudah pemberdayaan dengan kegiatan PBS. Hasil penelitian dapat

disimpulkan pertama, ada peningkatan untuk variabel X (PBS), yaitu (1) Gepeng paham tentang pentingnya peran dan fungsi keluarga; (2) Gepeng dapat mengatasi permasalahan keluarga; (3) Gepeng dapat menentukan pemecahan masalah dengan mengacu potensi dan sumber kesejahteraan sosial; (4) Gepeng paham tentang kewirausahaan; (5) Gepeng paham tentang pemilihan keterampilan kerja sesuai dengan minat dan bakat untuk menentukan UEP yang akan dikerjakan; (6) Gepeng paham bantuan stimulan dapat digunakan untuk berusaha mandiri sesuai dengan minat dan bakat serta permintaan pasar.

Kedua, peningkatan pada variabel Y (kemandirian Gepeng) antara sebelum dan sesudah pemberdayaan melalui PBS, yakni: (1) kepemilikan keterampilan kerja sesuai dengan minat, bakat dan permintaan pasar (2) kepemilikan UEP untuk kemandirian ekonomi keluarga; (3) meningkatnya peran aktif di masyarakat; (4) meningkatnya kepercayaan diri dan harga diri; (5) berubahnya tingkah laku dengan tidak kembali menjadi Gepeng; (6) mempunyai keinginan kembali ke daerah asal, dan (7) mempunyai keinginan memiliki tempat tinggal yang tetap.

Rekomendasi: Berdasar hasil temuan penelitian direkomendasikan, perlunya pendampingan secara rutin untuk peserta pemberdayaan, mengingat pola pikir peserta belum semua berubah, kendala pemasaran masih menjadi faktor penghambat dari keterampilan yang diperoleh. Perlu keterlibatan pihak terkait terutama Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mempunyai andil besar dalam pemasaran sehingga membantu kemandirian Gepeng dan keluarga melalui usaha ekonomi produktif agar dapat menambah pendapatan keluarga.

Salah satu masukan bagi Kementerian Sosial RI, melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial yaitu: (a) memecahkan masalah sosial di perkotaan (mencegah kaum urban ke kota tanpa keterampilan kerja); (b) meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah dalam masalah

Gepeng; (c) keberdayaan Gepeng (berusaha dan bekerja); (d) sebagai salah satu program untuk mengurangi jumlah kemiskinan.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih Kepada Dinas Sosial Kota Malang, LKS Intan Sejahtera, dan warga Desaku Menanti Kota Malang atas segala bentuk kerja samanya sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

Pustaka Acuan

- Awang, San Afri, dkk. (2008). (2008). *Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan*. Fakultas Kehutanan UGM.
- Bagong Suyanto. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Kencana Predana Melda Group Indonesia.
- Gunansyah, G. (2015). *Masalah Sosial Gepeng*. Universitas Negeri Surabaya Fakultas Ilmu Pendidikan.
- Ikawati. (2014). *Kugadaikan Anakku Demi Suatu Kebahagiaan*. Citra Media.
- Ikawati, dkk. (2005). *Uji Coba Pola Peningkatan Keswadayaan Masyarakat Desa dalam Pendayagunaan Sumber Kesejahteraan Sosial*. B2P3KS Press.
- Irsan Suani. (2015). *Masalah Gepeng di Kota Makasar*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makasar.
- Payne, M. (1986). *Social Care in the Community*. MC. Millan.
- Rohman Arif. (2013). *Program Desaku Menanti: Rehabilitasi Sosial Gepeng Terpadu Berbasis Desa*. [http: arifrohmansocialworker.blogspot.co](http://arifrohmansocialworker.blogspot.co).
- Sayogyo. (1986). *Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan*. LP3ES.
- Siti Wahyu Iryani dkk. (2017). *Implementasi Program Desaku Menanti*. B2P3KS Press.
- Stanley, J.C, & Campbell, D. T. (1966). *Expeimental and Quasi-Experiment Design for Research*. Rand McNally & Company.
- Sudjud, A. (2010). *Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini*. Universitas Terbuka.
- Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih. (2000). *Modul Analisis Dwivariat Program Uji t-test Amatan Ulangan*. UGM.
- Vredembregt, J. (1984). *Metode dan Teknik Peneitian Masyarakat*. PT. Gramedia.
- Weinberg, & Martin, S, et al. (1981). *The Solution of Social Problem*. Oxford University Press.

Mekanisme Survival Warga Miskin Perkotaan Akibat Dampak Pandemi Covid-19

The Mechanism of Survival of the Urban Poor Due to the Impact of Covid-19 Pandemic

Soetji Andari

Balai Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta
Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1 Sonosewu Yogyakarta, Email soetjiandari@gmail.com 082227728790
diterima tanggal 15 April 2020 direvisi tanggal 4 Agustus 2020 disetujui tanggal 10 November 2020

Abstract

The urban poor are the poor who live in urban areas and have informal work locations not far from their homes. A total of 60 poor people became the source of data. Researchers used questionnaires to find data to be analyzed with descriptive qualitative methods that did not only rely on quantitative data. Researchers collected qualitative data by using guided interview to informants and examined the coping mechanisms of the urban poor due to the spread of Covid-19. 52 percent of the poor could not fulfill their basic needs and expected social assistance from the social ministry in the form of Non-Cash Food Assistance (BPNT) and the Family Hope Program (PKH). This assistance was able to prevent the poor from falling into the trap of loan sharks. By the time when social interaction restrictions was applied, the coping mechanism of the poor caused husbands and wives to work harder to meet their daily needs. In fact, the government made regulations so that citizens were prohibited from leaving the house. Then they sold food or increased working hours, and some became household assistants by washing and ironing the clothes of city residents who needed their labor. The efforts of the poor to survive during the spread of Covid-19 were to save expenses by making rice substitutes such as sweet potatoes or corn to meet the food needs of all family members. The government is trying to overcome the impact of the spread of Covid-19 by accelerating the distribution of social assistance, so that it can help poor people meet their food needs.

Keywords: *citizens; poor; urban; survival mechanism*

Abstrak

Warga miskin perkotaan merupakan penduduk miskin yang menempati wilayah perkotaan dan memiliki jenis pekerjaan informal di sekitar tempat tinggalnya. Responden penelitian sebanyak 60 warga miskin perkotaan di Yogyakarta. Tipe penelitian ini adalah deskriptif. Pengumpulan data kuantitatif menggunakan kuesioner sementara data kualitatif menggunakan pedoman wawancara dengan melakukan wawancara pada responden. Studi ini meneliti tentang mekanisme bertahan hidup warga miskin perkotaan akibat penyebaran Covid-19. 52% warga miskin bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan mengharapkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial berupa BPNT dan PKH. Mekanisme bertahan hidup dari masyarakat miskin pada saat terjadi pembatasan interaksi sosial mengakibatkan suami dan istri menjadi terpaksa bekerja untuk menambah penghasilan meskipun pemerintah membuat aturan agar warga tidak keluar rumah. Mereka ada yang berjualan makanan kecil di depan rumah, menjajakan makanan berkeliling dengan sepeda dan sebagian responden menambah jam kerja agar mendapat tambahan penghasilan. Ibu rumah tangga menjadi asisten rumah tangga, menjual jasa sebagai tukang cuci dan setrika. Upaya yang dilakukan untuk bertahan hidup dan menghemat pengeluaran juga dilakukan dengan mengganti makanan pokok beras dengan ubi-ubian, jagung untuk mencukupi kebutuhan makan anggota keluarga dan mengurangi jajan. Upaya pemerintah untuk mengatasi dampak penyebaran Covid-19 dilakukan dengan mempercepat penyaluran bantuan sosial agar dapat membantu warga miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Kata kunci: *warga; miskin; perkotaan; mekanisme survival*

Pendahuluan

Penyakit virus corona (COVID-19) disebabkan oleh SARS-COV2 berpotensi fatal dan menjadi masalah kesehatan masyarakat global yang besar. Dampak Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia terutama pada sektor rumah tangga mengalami penurunan pendapatan karena masyarakat sudah tidak beraktivitas di luar yang mengakibatkan daya beli konsumsi berkurang. Masyarakat terancam kehilangan pendapatan karena banyak yang tidak bekerja kembali bahkan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Kerugian itu hanya akan tertutupi apabila krisis dapat diakhiri sebelum menimbulkan kebangkrutan usaha secara massal. (Hadiwardoyo, 2020). Langkah ekstensif untuk mengurangi penularan COVID-19 dari orang ke orang telah diterapkan untuk mengendalikan wabah saat ini. Perhatian khusus dan upaya untuk melindungi atau mengurangi penularan harus diterapkan pada populasi yang rentan termasuk anak-anak, penyedia layanan kesehatan, dan orang tua. (Rothan & Byraredy, 2020).

Pemerintah Indonesia merilis data penambahan kasus positif COVID-19 melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (GTPP COVID-19) mencatat penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per tanggal 7 Juli 2020. Total kasus 66.226 orang setelah ada penambahan sebanyak 1.609 orang. Kemudian untuk pasien sembuh menjadi 31.473 orang untuk kasus meninggal menjadi 3.309 orang (Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, 2020).

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan hasil survei sosial demografi dampak Covid-19. Hasil survei bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan untuk menyusun kebijakan dalam menghadapi pandemi. Kelompok masyarakat yang paling terdampak selama pandemi Covid-19 adalah: masyarakat miskin, rentan miskin dan pekerja informal. (Kompas, 2020). Dampak penyebaran Covid-19 mengakibatkan keruntuhan ekonomi, bencana alam atau pandemi, memperdalam dan

memperbesar kerentanan sosial yang dihasilkan dari ketidaksetaraan.

Menurut Li, et al (1918) berdasarkan penelitian mengenai hubungan kepadatan penduduk dengan epidemi yang dilakukan tahun 2018 adalah ada korelasi yang lemah antara kepadatan penduduk dengan kematian akibat wabah. Berdasarkan data angka kematian, ditemukan bahwa wilayah dengan kepadatan penduduk rendah menghalangi penyebaran epidemi itu sendiri. Studi yang sama menunjukkan bahwa ada korelasi antara kepadatan penduduk dan wabah. Hal ini, sementara bertentangan dengan kondisi yang terjadi di Jakarta sampai saat ini di mana wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi tidak berbanding lurus dengan penyebaran wabah Covid-19. Kondisi ini dapat terjadi akibat minimnya test, terutama di kota yang memiliki kepadatan tinggi seperti DKI Jakarta, Bandung, dan Surabaya (Rujak Center for Urban Studies, 2020)

Kelompok yang paling rentan terhadap risiko kesehatan yang ditimbulkan akibat penyebaran virus corona (Covid-19) adalah orang tua dan warga miskin. Mereka menjadi kelompok yang paling menderita, akibat langkah mitigasi untuk mengurangi penyebaran pandemi. Mereka tidak boleh keluar rumah sehingga tidak memiliki penghasilan dan tidak memiliki simpanan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini menimbulkan krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung. Merebaknya virus corona di sejumlah negara di dunia memberikan kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat termasuk masyarakat miskin di perkotaan. Mekanisme bertahan warga miskin perkotaan dalam mengatasi dan mengurangi tekanan kemiskinan akibat penyebaran Covid-19. Warga miskin berupaya tidak masuk dalam perangkap hutang rentenir yang setiap saat menawarkan untuk meminjamkan uang dengan bunga tinggi.

Warga masyarakat miskin perkotaan tinggal di daerah kumuh dan berhimpitan sehingga sulit untuk memutus mata rantai Covid-19. Wabah

Covid-19 di daerah kumuh berdampak pada seluruh lapisan masyarakat. Penduduk sekitar memiliki pekerjaan di sektor informal seperti tukang parkir, tukang becak, buruh gendong, hingga buruh harian yang mengakibatkan pendapatnya menurun dratis. Mereka harus tetap bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Badan Pusat Statistik mengungkapkan angka kemiskinan per September 2019 sebesar 9,22 persen (Ausrianti et al., 2020). Angka ini terlihat menurun 0,19 persen jika dibanding kondisi Maret 2019. Upaya pemerintah dalam mengurangi kemiskinan melalui percepatan infrastruktur dan meningkatkan anggaran bantuan program penanggulangan kemiskinan.

Pemerintah mengalokasikan dana bantuan sosial untuk 92,4 juta jiwa penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan 10 juta keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu, program Bantuan Pangan non-tunai (BPNT) yang bergulir sejak 2017 juga berhasil menjangkau 1,28 juta keluarga. Dampak program tersebut menjadi salah satu faktor penurunan jumlah kemiskinan di Indonesia. Aspek kehidupan perkotaan antara lain meliputi aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Seiring berjalannya waktu, tingkat urbanisasi di negara-negara berkembang semakin meningkat setiap tahun. Perpindahan penduduk dari desa ke kota (urbanisasi) secara besar-besaran mengakibatkan perumahan menjadi masalah yang serius bagi pemerintah. Kota besar pada saat ini memang menjanjikan kesempatan dan kesejahteraan yang luas dan memperoleh kesempatan maju di kota.

Warga permukiman kumuh rentan secara ekonomi selama pandemi COVID-19. Setiap warga harus tanggap terhadap penyebaran COVID-19 yang tidak mengenali dan melaksanakan protokol kesehatan akan semakin membahayakan kelangsungan hidup. Protokol kesehatan dalam mengatasi COVID-19 harus melibatkan berbagai multidisiplin ilmu dalam upaya mencapai keberhasilan pengobatan dengan mengurangi efek samping. Sebagian besar strategi top-down untuk

menangkap penyakit menular kemungkinan akan mengabaikan kelompok-kelompok sosial yang sering kuat dan pengetahuan yang sudah ada di banyak daerah kumuh (Corburn et al., 2020).

Kehidupan masyarakat yang terpinggirkan dan miskin akibat tak mampu bersaing dalam kerasnya kehidupan kota. Penduduk miskin di perkotaan kebanyakan merupakan warga asli dan pendatang yang telah lama menjadi penduduk di tempat tersebut. Struktur kemiskinan di Kota Yogyakarta termasuk dalam struktur kemiskinan alamiah dan relatif (Ramadani et al., 2016). Permukiman kumuh merupakan salah satu masalah sosial yang tidak mudah untuk diatasi disertai dengan ketidaktertiban dalam hidup bermasyarakat di perkotaan. Pada dasarnya kemiskinan dapat ditanggulangi melalui pemerataan, peningkatan lapangan pekerjaan dan pendapatan kelompok miskin serta peningkatan pelayanan dasar bagi kelompok miskin. Penyebaran Covid-19 menyulitkan masyarakat untuk melakukan *social distancing* karena terbatasnya lahan sehingga sulit menerapkan menjaga jarak yang diperintahkan oleh pemerintah.

Pasien Covid-19 di D.I. Yogyakarta pada tanggal 6 November 2020 sebagai berikut. Terkonfirmasi 4.140 orang, sembuh 3.278 orang, dirawat 727 orang dan meninggal 102 orang. Sedangkan di Kota Yogyakarta yang sembuh dari penularan Covid-19 sebanyak 598 orang, 216 dirawat dan 40 orang meninggal dunia (Pemerintah Daerah DIY. 2020). Upaya pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengatasi penyebaran Covid-19 antara lain: Tutup mulut saat bersin/batuk dengan tisu atau gunakan masker. Buang tisu atau masker pada tempat sampah tertutup. Mencuci tangan dengan air dan sabun minimal 20 detik atau gunakan hand sanitizer berbasis alkohol minimal 60 persen. Membersihkan dan melakukan disinfeksi permukaan benda yang sering disentuh seperti *smartphone*, kunci, atau gagang pintu. Menerapkan pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan-makanan bergizi

dan rutih berolahraga. Menjauhi orang yang sedang sakit, batuk, atau bersin. Menyentuh hidung, mulut, atau mata dengan tangan yang tidak steril. Menimbun masker atau barang-barang yang saat ini dibutuhkan orang banyak. Bepergian ke luar rumah saat sedang sakit atau menunjukkan gejala Covid-19.

Yogyakarta yang terkenal sebagai kota pelajar dan kota budaya menjadi bias dengan masih adanya daerah yang sangat mempertahankan kondisinya dengan sawah dan para warga miskin perkotaan yang masih konsisten memilih jalur ini sebagai pertahanan hidup. Penelitian ini untuk mengetahui mekanisme survival warga miskin perkotaan akibat dampak pandemi Covid-19 bagi warga miskin yang hidup di daerah kumuh. Hasil penelitian menjawab permasalahan tentang mekanisme survival warga miskin perkotaan akibat dampak pandemi Covid-19 di daerah pinggiran Kota Yogyakarta. Subjek penelitian adalah penduduk miskin kota yang tinggal di daerah padat penduduk. Kawasan miskin perkotaan di huni oleh penduduk asli setempat dan pendatang yang tergolong miskin serta berpendidikan rendah. Permukiman kumuh yaitu permukiman yang padat, kualitas konstruksi rendah, prasarana, dan pelayanan minim adalah pengejawantahan kemiskinan (Kuswartojo, 2006).

Penduduk miskin perkotaan di Kota Yogyakarta mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kemiskinan di kota besar lainnya karena merupakan pusat pendidikan dan kebudayaan. Faktor urbanisasi sebagai faktor utama yang mempengaruhi tidak terlalu besar dikarenakan sebagian besar penduduk miskin merupakan warga asli dan pendatang yang telah lama menjadi penduduk di tempat tersebut. Mobilitas penduduk desa menuju kawasan perkotaan dipicu karena kota memiliki daya tarik seperti tersedianya berbagai fasilitas pendidikan, heterogenitas lapangan pekerjaan, hiburan dan berbagai fasilitas lainnya. (Widiawaty, 2018)

Kehidupan di Kota Yogyakarta tidak terlalu hingarbingarberpengaruh pada sistem sosialnya. Struktur kemiskinan di Kota Yogyakarta termasuk dalam struktur kemiskinan alamiah dan relatif. Respons kebijakan pemerintah merupakan program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengatasi kemiskinan di wilayahnya. Adapun kebijakan yang dianalisis terdiri dari program penanganan kemiskinan yang dilakukan di Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta mempunyai kebijakan pengentasan kemiskinan yang cukup bervariasi. Warga miskin juga sudah merasakan adanya bantuan pemerintah. Secara umum, struktur kemiskinan dan respons kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan karakteristik kemiskinan yang ada, masyarakat juga sudah merasakan kehadiran pemerintah (Fikri et al., 2016).

Warga miskin kota cenderung hidup di daerah kumuh, dan bahkan sebagian hidup di pemukiman liar atau di zona publik, akibat tidak memiliki aset produksi yang dapat diandalkan untuk menopang kelangsungan kehidupannya. Sebagian besar penduduk miskin kota biasanya menjadi pekerja upahan di pasar tradisional, menjadi buruh gendong atau buruh toko dan pusat kegiatan perdagangan dan jasa, menjadi pedagang kecil atau penjual jasa di sektor informal. Pada saat ini mereka masih mencari nafkah di tengah maraknya penyebaran Covid-19 meskipun terjadi penurunan lebih setengah pendapatan dari biasanya.

Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian tentang mekanisme bertahan warga miskin pada saat penyebaran Covid-19 dilakukan di Kota Yogyakarta Pada bulan April s.d. Juli 2020. Pandemi Covid-19 menyebabkan angka kemiskinan meningkat. Peningkatan kemiskinan di perkotaan lebih tinggi daripada di Perdesaan. Penduduk hampir miskin merupakan kelompok yang paling terdampak karena sebagian besar mereka bekerja di sektor informal (BPS-Statistics Indonesia, 2020).

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian, arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek. Alamiah, peneliti merupakan instrumen kunci. Penelitian ini tidak hanya bertumpu pada data kuantitatif melalui kuesioner, akan tetapi menjangkau data kualitatif melalui pedoman wawancara dengan melakukan wawancara pada para nara sumber (Sugiyono, 2016). Metode kualitatif menggunakan wawancara dengan masyarakat terdampak berjumlah 60 orang dan berbagai pihak terkait masalah Mekanisme Survival Warga Miskin Perkotaan Terdampak Penyebaran Covid-19. Penelitian dilakukan berdasarkan wawancara dengan menggunakan panduan wawancara kepada 60 warga miskin perkotaan sebagai data primer di Kecamatan Umbulharjo, Mergangsan dan Kecamatan Kotagede Yogyakarta. Selain itu, wawancara kepada LSM, para tokoh masyarakat, pendamping program, ataupun masyarakat penerima bantuan program kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil dan Pembahasan

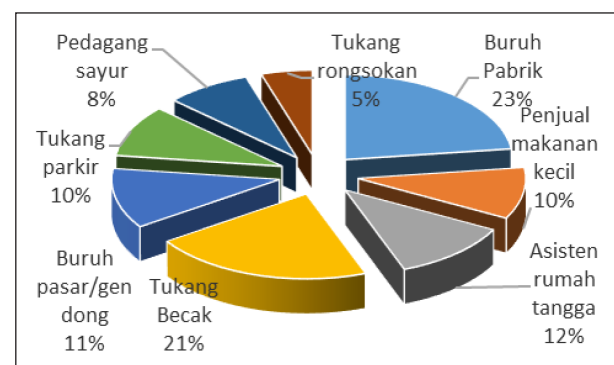
Warga masyarakat yang mengalami kemiskinan struktural diperkotaan adalah, kaum migran yang bekerja di sektor informal dengan hasil yang tidak menentu sehingga pendapatannya tidak mencukupi untuk memberi makan kepada dirinya sendiri dan keluarganya. Mereka yang termasuk golongan miskin adalah, kaum buruh, pedagang kaki lima, penghuni permukiman kumuh, pedagang asongan, dan lainnya baik warga yang tidak terpelajar dan tidak terlatih (*unskilled labour*). Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni berada di kawasan yang terabaikan menyebabkan ketidakteraturan bangunan mengalami penurunan kualitas fisik,

sosial ekonomi dan sosial budaya dan dihuni oleh orang miskin, penduduk yang padat, serta dengan sarana prasarana yang sangat minim. (Krisandriyana et al., 2019).

Bencana alam atau pandemi, memperdalam dan memperbesar kerentanan sosial yang dihasilkan dari ketidaksetaraan. Selain menjadi kelompok yang paling rentan terhadap risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh virus corona (Covid-19), orang miskin juga menjadi kelompok yang paling menderita dari langkah-langkah mitigasi yang diperkenalkan untuk mengurangi penyebaran pandemik. Rumah bagi seperlima dari populasi perkotaan di Indonesia, telah berkembang sebagai episentrum Covid-19 di Indonesia saat ini. Kasus terkonfirmasi 1810 dan 156 kematian, dengan total kasus nasional sebanyak 3512 kasus dan 306 kematian. Strategi mitigasi infeksi yang utama seperti peningkatan kegiatan cuci tangan, *social distancing* dan isolasi mandiri di rumah semuanya menjadi tantangan yang signifikan bagi realitas hidup kaum miskin (Rujak Center for Urban Studies, 2020).

Hasil penelitian tentang mekanisme bertahan warga miskin dari latar belakang pekerjaan responden dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 1.
Pekerjaan Responden

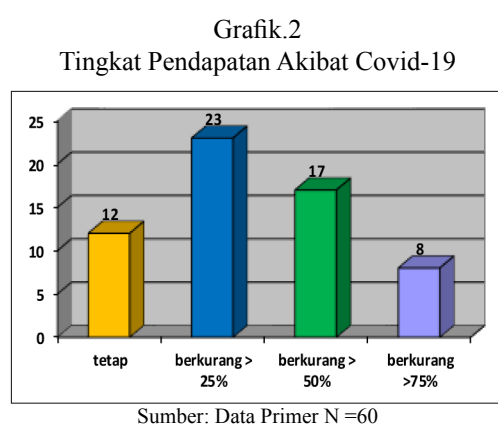


Sumber: Data Primer, N=60

Grafik 1 Pekerjaan responden paling banyak sebagai buruh pabrik 23 persen, mereka bekerja di pabrik tekstil, dan pabrik kulit, 21 persen bekerja sebagai tukang becak yang tidak menggunakan mesin

motor, 12 persen asisten rumah tangga yang bekerja membantu pada lingkup rumah tangga majikannya. 11 persen buruh pasar/buruh gendong yang bekerja di lingkungan pasar, bekerja serabutan apabila ada yang membutuhkan pekerjaan di lingkungan pasar. 10 persen responden bekerja sebagai tukang parkir dan penjual makanan kecil, 8 persen bekerja sebagai pedagang sayur, dan 5 persen sebagai tukang rongsokan yaitu mereka bekerja mencari barang bekas yang dapat dijual kembali. Mereka bekerja serabutan untuk mendapatkan uang dengan keterbatasan keterampilan yang dimiliki. Pekerjaan yang dilakukan semata-mata tuntutan kebutuhan yang harus dipenuhi di tengah maraknya penyebaran Covid-19. Salah satu temuan yang menarik adalah mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa untuk mencari uang, guna menghidupi keluarga. Mereka mengetahui berita tentang penyebaran Covid-19, akan tetapi tetap menjalankan pekerjaannya. Padahal Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta sudah menghimbau warganya untuk *stay at home* dan *sosial distancing*.

Pendapatan kotor responden dalam satu bulan terakhir akibat pandemi Covid-19 dapat dilihat pada grafik berikut.

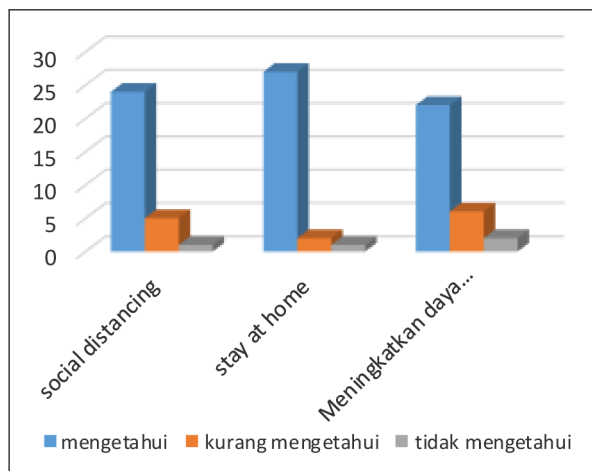


Grafik 2 Tingkat Pendapatan akibat pandemi Covid-19 membawa dampak yang sangat besar

dalam perekonomian masyarakat, terlebih lagi terhadap masyarakat warga miskin. Tingkat pendapatan responden akibat penyebaran Covid-19 sebulan terakhir, responden yang memiliki pendapatan tetap tidak berkurang atau pendapatan tetap sebanyak 12 responden (20%). Mereka bekerja sebagai pekerja rumah tangga dan pedagang sayur. Sementara itu, pendapatan berkurang lebih dari 25 persen sebanyak 23 responden (39 %), bekerja sebagai buruh pabrik dan pedagang makanan makanan kecil. Responden berkurang pendapatannya lebih dari 50 persen, sebanyak 17 responden (28 %), bekerja sebagai buruh gendong di pasar. Responden yang mengalami pengurangan pendapatan lebih dari 75 persen sebanyak 8 responden (13 %). Responden yang bekerja sebagai tukang parkir mendapat penghasilan kurang lebih Rp. 50.000, sedangkan di masa pandemi Covid -19 pendapatan mereka hanya berkisar antara Rp 10.000 s.d. Rp 15.000. Namun demikian, mereka tetap bersyukur dengan pendapatan yang mereka peroleh. Penurunan retribusi parkir dialami semua juru parkir yang ada di Kota Yogyakarta. Hal tersebut mengakibatkan penghasilan mereka menurun drastis. “Kendaraan bermotor jarang sekali yang berhenti untuk parkir sehingga penghasilan juru parkir sangat berkurang. Masyarakat lebih memilih beraktivitas di rumah sehingga berdampak pada berkurangnya pemasukan” demikian ungkap seorang juru parkir.

Pengetahuan warga masyarakat miskin dalam menghindari penyebaran Covid-19, baik tentang *sosial distancing*, dengan cara menaikkan stamina dan imun tubuh, apa yang harus dilakukan dalam berbagai kondisi kesehatan, dan kapan harus ke rumah sakit. Transparansi dan penyebaran informasi sangat penting dan butuh juga dipastikan bahwa orang-orang itu juga tahu tentang hal ini.

Grafik 3.
Pengetahuan Responden Mengantisipasi Penyebaran Covid-19



Sumber: Data primer N=60

Grafik 3 Pengetahuan responden mengantisipasi penyebaran Covid-19 bagi warga miskin dalam menghindari penyebaran Covid-19, berupa *social distancing* atau menjaga jarak antara 1-2 meter, sebesar 83,3 persen responden mengetahui tentang jarak sosial antarorang, 11,6 persen kurang mengetahui tentang *social distancing* dan 5,1 persen tidak mengetahui tentang *social distancing*. Tindakan menjaga jarak fisik dan mengisolasi diri jika sedang sakit memang diperlukan untuk meredam penyebaran Covid-19. Namun, hal itu bukan berarti lantas menjadikan seseorang menjadi terisolasi secara sosial. Pengetahuan responden tentang *stay at home* atau tinggal di rumah 90 persen responden mengetahui, 6,67 persen kurang mengetahui, dan 3,33 persen tidak mengetahui mengapa perlu *stay at home*.

Langkah yang harus segera dilakukan untuk melindungi penghuni permukiman informal perkotaan, para tunawisma, mereka yang tinggal di permukiman genting, dan seluruh populasi dari COVID-19 meliputi berikut. (1) melembagakan permukiman informal/komite perencanaan darurat daerah kumuh di setiap permukiman informal perkotaan; (2) segera menerapkan moratorium penggusuran; (3) memberikan jaminan langsung kepada orang miskin; (4) melatih dan mempekerjakan

petugas kesehatan masyarakat; (5) segera memenuhi standar *Sphere Humanitarian* untuk air, sanitasi, dan kebersihan; (6) memberikan bantuan makanan segera; (7) mengembangkan dan menerapkan strategi pengumpulan limbah padat; dan (8) segera mengimplementasikan rencana mobilitas dan perawatan kesehatan. Pada saat yang sama, ada peluang bagi kesehatan masyarakat, administrasi publik, bantuan internasional, LSM, dan kelompok masyarakat untuk berinovasi di luar tanggap bencana dan bergerak menuju rencana jangka panjang.

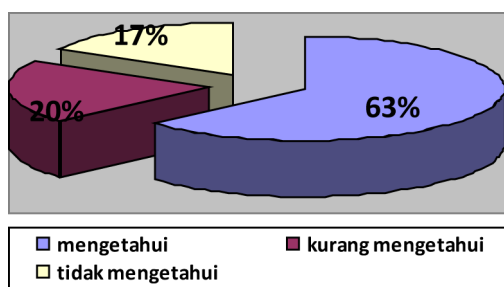
Pengetahuan responden tentang meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas pada saat penyebaran Covid-19, 73,3 responden mengetahui tentang meningkatkan daya tahan tubuh dengan menjadi tubuh supaya sehat. Mereka menggunakan jamu tradisional untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Responden kurang mengetahui tentang meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas tubuh sebesar 20 persen, dan 3,33 persen tidak mengetahui tentang imunitas tubuh. Pemahaman mereka tentang menjaga jarak atau *social distancing* diklaim sudah mengetahui, tetapi penerapannya masih rendah. Apalagi profesi mereka yang mengharuskan keluar rumah menjadi salah satu faktor pendukungnya.

Informasi tentang penyebaran virus Covid-19 mengindikasikan dua cara utama transmisi yaitu melalui percikan (*droplet*) saluran pernapasan dan kontak. Percikan saluran pernapasan dihasilkan saat seseorang batuk atau bersin. Setiap orang yang berada dalam kontak erat (dalam radius 1 M) dengan orang yang menunjukkan gejala-gejala gangguan pernapasan (batuk, bersin) berisiko terpapar percikan saluran pernapasan yang kemungkinan dapat menyebabkan infeksi (Kemenkes, 2020). Percikan juga dapat jatuh ke permukaan benda di mana virus tetap aktif. Oleh karena itu, lingkungan sekitar terdekat dari orang yang terinfeksi dapat menjadi sumber penularan (penularan kontak). Di beberapa negara, masker dipakai sesuai dengan kebiasaan setempat atau sesuai anjuran otoritas nasional dalam konteks

COVID-19. Dalam situasi demikian, praktik terbaik cara menggunakan, melepas, dan membuang masker serta membersihkan tangan setelah melepas masker harus diikuti (WHO, 2020).

Pengetahuan responden tentang pentingnya menggunakan masker dalam menghindari penyebaran Covid-19, dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 4.
Pengetahuan Responden Manfaat Penggunaan Masker dan Mencuci Tangan



Sumber: data penelitian N=60

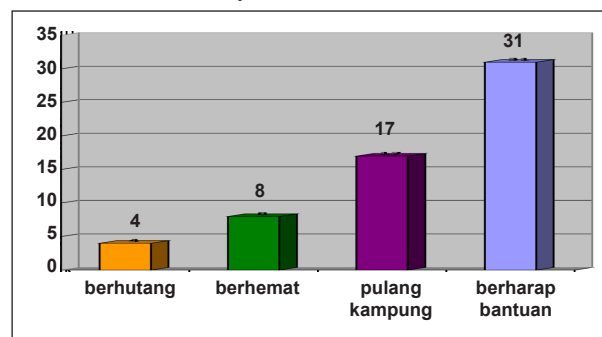
Grafik 4 Pengetahuan responden tentang manfaat penggunaan masker dan mencuci tangan untuk mencegah penyebaran Covid-19, responden yang mengetahui dan menggunakan masker serta mencuci tangan dengan sabun sebanyak 63 persen. Artinya, responden menggunakan masker untuk menghindari terjangkitnya virus dan mencuci tangan dengan sabun setiap saat. Responden tidak mengetahui penggunaan masker dan mencuci tangan sebagai cara untuk mencegah penyebaran Covid-19 sebesar 20 persen, dan 17 persen enggan untuk menggunakan masker karena ada persepsi dirinya tidak mungkin akan tertular, dan merasa sesak bila menggunakan masker.

Responden mengetahui manfaat penggunaan masker, akan tetapi tidak menggunakan masker dalam kegiatan sehari-hari sebesar 17 persen. Penggunaan masker sangat dianjurkan oleh pemerintah, masyarakat diwajibkan untuk mengenakan masker ketika keluar rumah guna mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19. Permintaan tersebut juga merupakan anjuran

dari Organisasi Kesehatan Dunia. WHO telah mengubah anjurannya seiring berbagai riset yang menunjukkan bahwa penggunaan masker dapat mengurangi penyebaran Covid-19.

Mekanisme bertahan masyarakat miskin di perkotaan memiliki strategi yang digunakan melalui peningkatan aset dengan melibatkan lebih banyak anggota keluarga untuk bekerja. Mereka memulai usaha kecil-kecilan, memulung barang-barang bekas, menyewakan kamar, menggadaikan barang, meminjam uang kepada tetangga. Bahkan, meminjam pada lintah darat dengan bunga tinggi. Meningkatkan aset merupakan salah satu cara untuk mengatasi berbagai permasalahan yang melingkupi kehidupannya (Simanjuntak & Amal, 2018). Mekanisme survival responden yang terimbas penyebaran Covid-19 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 5.
Mekanisme Bertahan Warga Miskin Dampak Penyebaran Covid-19



Sumber: data penelitian N=60

Grafik 5, 31 responden (52%) atau lebih dari separuh responden mengharapkan bantuan pemerintah cair baik berupa Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) maupun bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mempertahankan hidup. Responden yang memutuskan kembali ke kampung halaman untuk sementara karena tidak memiliki pekerjaan dan anak libur sekolah sebesar 28 persen. Sementara itu, 13 persen responden mempertahankan hidup dengan mengurangi konsumsi makan.

Mereka berhemat dengan mengurangi makan dan membuat makanan pengganti beras seperti ubi-ubian, jagung yang lebih murah dibandingkan nasi yang harus menyediakan lauk pauk. Selain itu, mereka berhemat mengeluarkan uang dengan mengurangi jajan anak. Responden berhutang kepada tetangga ataupun keluarga sebagai mekanisme survival yang paling sedikit. Mereka terpaksa berhutang karena tidak memiliki tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari meskipun harus menanggung bunga dari pinjaman.

Upaya pemerintah dalam mengatasi dampak penyebaran pandemi melalui protokol tatalaksana COVID-19. Pandemi COVID-19 merupakan masalah kesehatan yang serius di berbagai negara di dunia tak terkecuali Indonesia. Organisasi kesehatan dunia, WHO telah mencanangkan COVID-19 sebagai pandemi dan pemerintah Indonesia juga menyatakan COVID-19 merupakan bencana nasional. Pedoman tatalaksana COVID-19 saat ini belum seragam di seluruh dunia. Tiap negara mencoba berbagai modalitas pengobatan untuk menangani COVID-19 dalam rangka meningkatkan angka kesembuhan bagi para pasien. Berdasarkan pengalaman berbagai negara dalam memberikan regimen pengobatan COVID-19 perlu disusun dalam bentuk protokol pengobatan yang dapat menjadi dasar tatalaksana. Protokol tatalaksana COVID-19 harus melibatkan berbagai multidisiplin ilmu dalam upaya mencapai keberhasilan pengobatan dengan efek samping yang dapat mengurangi penyebaran virus (Tim COVID-19 IDAI, 2020). Selain itu, mempercepat penyaluran bantuan sosial, dapat membantu warga miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan dan menjaga daya beli.

Peran masyarakat sipil baik dalam bentuk organisasi nonpemerintah, organisasi sosial masyarakat, komunitas, dan individu untuk mengisi dan melengkapi peran negara untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Mengatasi dampak sosial dan ekonomi akibat kebijakan pembatasan sosial dan karantina

wilayah di Indonesia memunculkan kesadaran kolektif dan kesadaran akan ketidaksetaraan. Jaringan organisasi non-profit dan komunitas bekerja dalam jaringan pertemanan penulis beserta berita-berita di media sosial dan media massa (Nurhalimah, 2020).

Upaya meningkatkan kepedulian masyarakat mampu untuk peka terhadap kebutuhan nyata warga miskin yang terdampak COVID-19. Pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat perlu edukasi sosial dan menyosialisasikan informasi yang tepat, untuk meredam keresahan dan kepanikan masyarakat menengah ke bawah.

Dampak penyebaran COVID-19 warga miskin akibat pandemi sangat berpengaruh karena pendapatan mereka berkurang sehingga mengalami masa sulit. Krisis sosial, krisis ekonomi sampai pada krisis mental tak dapat terhindarkan karena sangat bersinggungan dengan masalah pemenuhan kebutuhan hidup, baik sandang maupun pangan, terutama warga miskin. Dampak lain yang diawatirkan muncul adalah sikap fatalisme, yaitu sikap atau paham seseorang putus asa dalam segala hal, dan ia mengatakan sudah ditentukan oleh nasib, hingga ia apriori dan stagnan (I.Solihin et al., 2020). Mekanisme bertahan bagi warga miskin sudah dilakukan untuk mempertahankan hidup pada masa penyebaran Covid-19 (Antara et al., 2020).

Pada saat ini pandemi Covid-19 menjadi penyebab dan sekaligus akibat dari terjadinya kemiskinan. Hal tersebut disebabkan berkurang pendapatan keluarga karena tidak memiliki keterampilan atau keahlian, rendahnya tingkat kesehatan dan pola konsumsi buruk. Sehingga hanya sebagian kecil penduduk yang dapat menjadi tenaga kerja produktif. Mereka terpaksa hidup pada tingkat yang hanya cukup untuk sekedar hidup. Di masa pandemi Covid-19 warga miskin perkotaan secara psikologis muncul perasaan dan sikap defensif atau mempertahankan diri dari sesuatu yang dianggap membahayakan. Mekanisme pertahanan diri yang dilakukan oleh warga

miskin tetap berkarya di luar rumah meskipun penyebaran Covid-19 masih tinggi angkanya.

Kebijakan pemerintah mengatasi warga miskin akibat kebijakan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) dengan memberikan bantuan sosial bagi warga miskin yang memiliki mata pencaharian sebagai pedagang, ojek online, tukang bangunan, pekerja serabutan karena kehilangan penghasilan. Pemerintah berupaya memfasilitasi segala kebutuhan pangan mereka selama kebijakan PSBB diterapkan oleh pemerintah. Pemerintah memastikan bahwa setiap warga masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga terjangkau, khususnya bagi lapisan masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah. Artinya, pemerintah menerapkan kebijakan PSBB harus dapat memberikan kepastian bagi para pekerja yang berpenghasilan rendah dan warga miskin yang ada di Indonesia merupakan solusi terbaik pada saat ini (Mufida, 2020)

Penutup

Kesimpulan: Warga miskin perkotaan yang terdampak COVID-19 adalah Warga miskin kota cenderung hidup di daerah kumuh, akibat tidak memiliki aset produksi yang dapat diandalkan untuk menopang kelangsungan kehidupannya. Covid-19 menyebabkan sebagian orang kehilangan atau berkurang pendapatannya. Kemiskinan menjadi muara yang tak terelakkan akibat pandemi. Mereka bertahan tetap bekerja untuk mendapatkan uang dengan keterampilan seadanya karena tuntutan kebutuhan yang harus dipenuhi di tengah maraknya penyebaran Covid-19. Salah satu temuan yang menarik adalah mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa untuk mencari uang. Mereka berhemat melalui pengurangan konsumsi sehari-hari dan pengganti beras dengan bahan makanan lain yang lebih murah dan mengenyangkan, seperti ubi-ubian, dan jagung. Responden melakukan hal tersebut agar keluarga dapat bertahan hidup.

Rekomendasi: Beberapa rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Penangan Fakir

Miskin Kementerian Sosial c.q Direktorat Penanganan Fakir Miskin di masa pandemi Covid-19 dengan mempercepat penyaluran bantuan sosial agar dapat membantu warga miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu, warga miskin memerlukan alat pelindung diri seperti masker, disinfektan dan vitamin untuk daya tahan tubuh. Pemerintah daerah, pencegahan penyebaran Covid-19 melalui sosialisasi tentang disiplin menjalankan protokol kesehatan, seperti penggunaan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan.

Ucapan Terimakasih

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat di Kecamatan Umbulharjo, Mergangsan dan Kecamatan Kotagede yang menjadi responden pada penelitian ini sehingga penelitian tentang Mekanisme Survival Warga Miskin Perkotaan Akibat Dampak Pandemi Covid-19 dapat terselesaikan.

Pustaka Acuan

- Antara, Pryanka, A., & Candra, S. A. (2020). Empat Sektor Ekonomi yang Paling Tertekan Pandemi Covid-19. *Republika.Co.Id*.
- Ausrianti, R., Andayani, R. P., Surya, D. O., & Suryani, U. (2020). Edukasi Pencegahan Penularan Covid 19 serta Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial pada Pengemudi Ojek Online. *Jurnal Peduli Masyarakat*. <https://doi.org/10.37287/jpm.v2i2.101>
- BPS-Statistics Indonesia. (2020). Berita Resmi Statistik 15 Juli 2020. In *Berita Resmi Statistik*.
- Corburn, J., Vlahov, D., Mberu, B., Riley, L., Caiaffa, W. T., Rashid, S. F., Ko, A., Patel, S., Jukur, S., Martínez-Herrera, E., Jayasinghe, S., Agarwal, S., Nguendo-Yongsi, B., Weru, J., Ouma, S., Edmundo, K., Oni, T., & Ayad, H. (2020). Slum Health: Arresting COVID-19 and Improving Well-Being in Urban Informal Settlements. *Journal of Urban Health*. <https://doi.org/10.1007/s11524-020-00438-6>
- Eka Dahlan. (2016). Strategi dan Penanganan Kawasan Kumuh di Kota Ambon. *Fikratuna*.
- Fikri, A. A. H. S., Sholeh, M., & Baroroh, K. (2016). Fenomena Kemiskinan Perkotaan (Urban Poverty) di Yogyakarta: Suatu Kajian Struktur Dan Respons Kebijakan. *Jurnal UNY*.

- Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. (2020). *Peta Sebaran Kasus COVID-19 di Indonesia*. Covid19.Go.Id.
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Baskara Journal of Business and Entrepreneurship*. <https://doi.org/10.24853/baskara.2.2.83-92>
- I.Solihin, Koko Adya Winata, Andewi Suhartini, & Nurwadjah. (2020). Peran Manusia Dalam Kehidupan Fatalisme. *Jurnal Al Amar*.
- Krisandriyana, M., Astuti, W., & Fitria Rini, E. (2019). Faktor Yang Mempengaruhi Keberadaan Kawasan Permukiman Kumuh Di Surakarta. *Desa-Kota*. <https://doi.org/10.20961/desa-kota.v1i1.14418.24-33>
- Kuswartojo, T. (2006). Asas kota berkelanjutan dan penerapannya di indonesia. *J. Tek. Ling. P3TL-BPPT.7.(1)*.
- Mufida, A. (2020). Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid 19. *ADALAH Buletin Hukum & Keadilan*.
- Nurhalimah, N. (2020). Upaya Bela Negara Melalui Sosial Distancing Dan Lockdown Untuk Mengatasi Wabah Covid-19 (Efforts To Defend The Country Through Social Distancing And Lockdown To Overcome The COVID-19 plague). *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3576405>
- Pemerintah Daerah DIY. 2020. (2020). *Data Terkait COVID-19 di D.I. Yogyakarta*. <https://corona.jogjapro.go.id/data-statistik>
- Ramadani, Sobri, N. A., & Enzeta, F. (2016). Permukiman kumuh. *ARSITEKTUR UR*.
- Rothan, H. A., & Byraredy, S. N. (2020). The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak. In *Journal of Autoimmunity*. <https://doi.org/10.1016/j.jaut.2020.102433>
- Rujak Center for Urban Studies, 2020. (2020). *Covid-19, Ketidaksetaraan dan Warga Miskin Kota Jakarta: Tangguh, Tetapi dalam Risiko Tinggi*. <https://rujak.org/covid-19-ketidaksetaraan-dan-warga-miskin-kota-jakarta-tangguh-tetapi-dalam-risiko-tinggi/>
- Simanjuntak, A., & Amal, B. K. (2018). Strategi Bertahan Hidup Penghuni Permukiman Kumuh. *Buddayah : Jurnal Pendidikan Antropologi*. <https://doi.org/10.24114/bdh.v1i1.8557>
- Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. *Bandung: Alfabeta*.
- Tim COVID-19 IDAI. (2020). Protokol Tatalaksana Covid-19. *I*.
- Widiawaty, M. A. (2018). Faktor-faktor Urbanisasi di indonesia. *Jurnal Ekonomi*.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial: Studi Kasus pada Perpustakaan Umum Kabupaten Magelang

Community Empowerment Activity in Realizing Social Inclusion-Based Library Services: Case Study at the Public Library of Magelang Regency

Reza Mahdi¹ dan Andi Asari²

Fakultas Sastra, Program Studi Ilmu Perpustakaan, Universitas Negeri Malang,
Jl. Cakrawala No.5, Sumber Sari,

Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145

E-mail: rezamahdi@gmail.com HP: 0812 9526 6627

diterima tanggal 13 Mei 2020, direvisi tanggal 22 Agustus 2020, disetujui tanggal 24 Oktober 2020

Abstract

Nowdays, the existence of public libraries is not only a place to read but to increase creativity and people's ability to work. It can be said that the library plays a role in empowering the community, for example in this study the Public Library of Magelang Regency. Currently the library has community empowerment activities in order to achieve social inclusion, which means that it is open to all groups, not limited to race, ethnicity, religion, or social or economic status. The problem of this research is what are the community empowerment activities carried out by public libraries to realize social inclusion in society? The purpose of this study is to describe the community empowerment activities carried out by libraries in realizing social inclusion-based library services. This research is a qualitative research with a case study method. Based on data found, the Public Library of Magelang Regency has carried out many community empowerment activities in realizing social inclusion. This activity pays attention to the community such as diffable, women, and ethnicity. For people with disabilities, there is an resin processing activity (wood sap) into decorative items. Furthermore, there is a kur rope processing activity for women, working with the Hand Magic community. Finally, for certain ethnic communities, the library has provided facilities and infrastructure for them even though the community has its own regulations. Regarding social inclusion itself, there are still studies that have not been carried out related to empowerment in other marginalized communities such as people with HIV / PLWHA. Therefore, researchers have a recommendation, further study can be done on community empowerment of people with HIV / PLWHA, in collaboration with non-governmental organizations (NGOs).

Keywords: *Social inclusion, community empowerment, social inclusion, Magelang Regency*

Abstrak

Pada era kini keberadaan perpustakaan umum tidak hanya sebagai tempat untuk membaca saja namun tempat untuk meningkatkan kreativitas dan kemampuan masyarakat untuk berkarya. Ini dapat dikatakan bahwa perpustakaan berperan dalam memberdayakan masyarakat sebagai contoh dalam studi ini adalah Perpustakaan Umum Kabupaten Magelang. Saat ini perpustakaan tersebut memiliki kegiatan pemberdayana masyarakat dalam rangka mewujudkan inklusi sosial yang artinya terbuka pada seluruh golongan tidak terbatas ras, etnis, agama, maupun status sosial atau ekonomi. Permasalahan penelitian ini adalah apa saja kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perpustakaan umum untuk mewujudkan inklusi sosial di masyarakat? Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perpustakaan dalam mewujudkan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Berdasarkan data yang ditemukan Perpustakaan Umum Kabupaten Magelang sudah banyak melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan inklusi sosial. Kegiatan tersebut memperhatikan masyarakat seperti difabel, perempuan, dan etnis. Untuk difabel, terdapat kegiatan pengolahan resin (getah kayu) menjadi barang hiasan. Selanjutnya, terdapat kegiatan pengolahan tali kur untuk kaum perempuan, bekerjasama dengan komunitas Hand Magic. Terakhir, terhadap komunitas etnis tertentu, pihak perpustakaan telah menyediakan sarana dan prasarana untuk mereka meskipun dari pihak komunitas memiliki peraturan tersendiri. Mengenai inklusi sosial itu sendiri, masih terdapat kajian yang belum dilakukan terkait dengan pemberdayaan pada masyarakat termarjinal lainnya seperti penderita HIV/ODHA. Oleh karena itu peneliti memiliki rekomendasi berupa

kajian mengenai pemberdayaan masyarakat terhadap pengidap HIV/ODHA bisa dilakukan, bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Kata Kunci: inklusi sosial; pemberdayaan masyarakat; perpustakaan umum; Kabupaten Magelang

Pendahuluan

Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan kegiatan membuat suatu masyarakat atau individu menjadi terampil dan terdidik dalam melakukan sesuatu. Jika melihat tidak dari konteks masyarakat, pemberdayaan ini berarti meningkatkan masyarakat menuju masa depan yang lebih baik dan memiliki potensi untuk keluar dari berbagai permasalahan, seperti taraf hidup dan sosial-ekonomi (Rahman, 2018; Salam, 2018). Instansi, lembaga, atau organisasi pemerintahan seperti kelurahan, RT, dan RW dan organisasi swasta berperan dalam memberdayakan masyarakat.

Kemitraan dapat dilakukan baik dengan masyarakat lokal, pemerintah maupun swasta demi keberdayaan suatu masyarakat. Pemanfaatan sumber daya yang ada di suatu masyarakat dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Sebagai contoh untuk mengembangkan ekonomi daerah yang potensial, pemberdayaan hutan mangrove dengan menjalin kemitraan dapat dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada (Mahmudah et al., 2019).

Contoh lain pemberdayaan masyarakat berbasis aset lokal yakni budidaya ikan koi di Desa Banyuglugur, Situbondo yang diselenggarakan oleh PJB Paiton sebagai program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR (Rahman, 2018). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan mengembangkan suatu masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Perpustakaan umum baik kabupaten/kota desa merupakan sumber daya informasi yang dimiliki institusi dalam memberdayakan masyarakat. Sebuah pertanyaan yakni, bagaimana perpustakaan memberdayakan masyarakat dengan sumber informasi dan

kegiatan yang ada? Tidak hanya ditunjukkan dari koleksi perpustakaan saja namun juga kegiatan yang diselenggarakan oleh perpustakaan. Seperti dilansir dari portal berita Kompas (2019), Deputy Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menyatakan.

“Pustakawan harus mampu menghubungkan antara masyarakat dan perpustakaan lewat ragam kegiatan kemasyarakatan sehingga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat mulai dari pelatihan, pendampingan hingga pemberdayaan”.

Di era sekarang perpustakaan bukan hanya sebagai ‘gudang’ buku, namun menjadi tempat di mana masyarakat dapat mengembangkan diri dengan kegiatan yang diadakan sebagai *makerspace* yakni ruang untuk berkarya (Utami & Prasetyo, 2019). Informasi di perpustakaan membuat masyarakat dapat berdaya apabila mampu memanfaatkan informasi menjadi *literate* (Winoto & Sukaesih, 2019). Pengetahuan yang sudah didapat dari informasi di perpustakaan dapat mesejahterakan masyarakat. Sebagai contoh, informasi yang disediakan untuk berkegiatan ekonomi, masyarakat mempelajari sehingga terdidik dan terlatih untuk melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan di perpustakaan, misalnya melalui pelatihan menjahit atau boga dapat dijadikan sebagai media memberdayakan masyarakat.

Perpustakaan umum merupakan sarana pembelajaran sepanjang hayat, tanpa membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi, dan gender (International Federation of Library and Information Associations & Institutions, 2016; Zen & Wuryani, 2011), tentu cocok sebagai sarana bagi masyarakat untuk memberdayakan diri. Perpustakaan umum

memiliki pengguna yang beragam sesuai dengan tugas dan fungsinya yakni melayani masyarakat mulai dari pelajar hingga mahasiswa serta peneliti dan masyarakat umum (Hendrawan, 2015).

Mereka memiliki peran penting dalam pengembangan dan memelihara masyarakat yang demokratis dengan memberikan akses individu ke berbagai pengetahuan, ide, dan pendapat yang luas dan beragam (IFLA, 2010). Koleksi di perpustakaan harus mencerminkan tren saat ini dan evolusi masyarakat, serta ingatan akan upaya dan imajinasi manusia (IFLA, 2016). Sebagai pusat informasi yang gratis bagi semua, sarana promosi literasi, pendidikan dan mempromosikan kebudayaan, perpustakaan umum memiliki manfaat yang besar bagi komunitas lokal (Vårheim et al., 2008).

Mereka dapat menggunakan perpustakaan umum untuk mengadakan aktivitas. Fungsi perpustakaan umum sebagai pusat kebudayaan dan literasi suatu daerah atau kota dijalankan dengan pemberdayaan konten lokal yang baik (Mahdi & Ramadhan, 2019). Menurut J.J. Honingman dan Koetjaraningrat kebudayaan diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat (Pujileksono, 2015), perpustakaan dapat mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan menjadi konten lokal perpustakaan.

Dari seluruh penjelasan tersebut, perpustakaan umum memiliki peran yang besar untuk memberdayakan masyarakat dari sumber daya yang mereka miliki, sebagai contoh kegiatan pelatihan ataupun layanan berupa *makerspace*. Kemudian membentuk generasi yang literat akan kebudayaan baik sekitar maupun luar sehingga masyarakat nantinya dapat bersikap bijaksana pada lingkungannya

Konsep pemberdayaan masyarakat ini berhubungan dengan konsep inklusi sosial dimana konsep tersebut mengayomi seluruh lapisan masyarakat tanpa pandang bulu. Inklusi sosial ini berarti membangun suatu masyarakat yang eksklusif agar semakin terbuka, melalui

peningkatan partisipasi serta peluang, akses ke sumber daya dan rasa hormat bagi mereka (UNDESA, 2016; Warsilah, 2015).

Masyarakat eksklusif ini datang dari mereka yang merasa atau benar-benar termarginalkan karena perbedaan warna kulit, suku, ras, agama, status sosial dan ekonomi bahkan masyarakat difabel (Noor, 2019). Pada akhirnya diharapkan martabat masyarakat akan terangkat sehingga mendorong interaksi sosial serta membuka akses partisipasi masyarakat pada umumnya (Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Jawa Barat, 2019; Silver, 2015).

Dari fenomena itu, perpustakaan umum suatu daerah atau kota sangat berperan untuk memberdayakan masyarakat tanpa membedakan suku, ras, gender, agama dan antar golongan. Perpustakaan umum tentu dibangun melalui pendekatan sistem sosial atau kemanusiaan agar memunculkan fungsi inklusif (Prasetyawan & Suharso, 2015). Kedepan, perpustakaan berbasis inklusi sosial kepada seluruh lapisan masyarakat dapat menjawab kebutuhan mereka dan berperan besar dalam pengembangan masyarakat.

Perpustakaan Umum Kabupaten Magelang merupakan salah satu perpustakaan di Indonesia yang mempunyai berbagai macam kegiatan untuk memberdayakan masyarakat. Dari keikutsertaan pada program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sejak tahun 2019, perpustakaan tersebut memiliki peran dalam memberdayakan seluruh lapisan masyarakat tanpa pandang bulu melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh mereka. Selain itu Perpustakaan Umum Kabupaten Magelang mendapat penghargaan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2019 terkait dengan perpustakaan dengan implementasi perpustakaan berbasis inklusi sosial terbaik ke-2 pada program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

Pertanyaan penelitian ini adalah, apa saja kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Perpustakaan Umum

Kabupaten Magelang dalam mewujudkan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial? Penelitian ini melihat apa yang dilakukan oleh pihak perpustakaan dalam mengayomi seluruh lapisan masyarakat untuk mengembangkan diri, demi terwujudnya layanan berbasis inklusi sosial.

Penggunaan Metode Penelitian

Jenis penelitian ini kualitatif dengan menggunakan informan langsung dari lokasi penelitian. Aspek yang diteliti yakni kebiasaan atau budaya masyarakat yang diteliti (Connaway & Powell, 2010). Metode yang digunakan adalah studi kasus yaitu mempelajari individu, institusi, atau fenomena dalam lingkungan unik secara intens dan sedetail mungkin (Lawal, 2009). Jadi studi kasus ini melihat keadaan secara wajar atau secara alamiah pada kegiatan yang ada di Perpustakaan Umum Kabupaten Magelang.

Pengambilan data dilakukan dengan dua macam cara yakni wawancara dan dokumentasi. Sebenarnya terdapat rencana untuk melakukan observasi dengan melihat kegiatan yang diselenggarakan oleh perpustakaan tersebut, tetapi batal dilaksanakan karena terkendala pandemi Covid-19.

Pengambilan data dengan cara wawancara, dilakukan secara semi-berstruktur dengan mengikuti pedoman yang ada namun direvisi setelah ide baru muncul (Rachmawati, 2007). Informan adalah A.M yaitu Kepala Seksi Pengembangan Layanan Perpustakaan. Wawancara dilakukan terhadap masyarakat yang mengikuti program di sana pada bulan Maret 2020, namun terkendala dengan Covid-19.

Informan bernama A.M. dipilih dengan cara purposive sampling yakni memilih informan disesuaikan dengan kriteria berdasarkan tujuan dari penelitian yang ingin dilakukan (Mamik, 2015). A.M merupakan seorang yang bertanggung jawab terhadap jalannya program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Perpustakaan Umum Kabupaten

Magelang. Hal tersebut membuat beliau memiliki wawasan yang banyak terkait dengan pemberdayaan masyarakat.

Terakhir, teknik pengambilan data dengan cara dokumentasi dilakukan dengan menyelidiki dokumen terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dokumen yang diteliti mengenai laporan kegiatan Perpustakaan Umum Kabupaten Magelang pada periode 2018-2019.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Perpustakaan

Pada Standar Nasional Perpustakaan Umum tahun 2011, dituliskan bahwa perpustakaan umum sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat (Zen & Wuryani, 2011). Pembelajaran ini tentu tidak hanya terkait dengan penyediaan koleksi saja, namun lebih dari itu. Mahdi (2020) menuliskan bahwa perpustakaan umum memastikan terselenggaranya kegiatan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Perpustakaan umum berperan untuk memberdayakan masyarakat guna menaikkan taraf hidup mereka.

Sejak Perpustakaan Umum Kabupaten Magelang mengikuti program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial oleh Perpustakaan Nasional, banyak kegiatan yang dilakukan untuk memberdayakan masyarakat. Pada tahun 2019, Perpustakaan Umum Kabupaten Magelang memiliki enam kegiatan untuk masyarakat. Salah satu kegiatan tersebut yakni menambah jam layanan perpustakaan. Berikut adalah hasil wawancara dengan informan A.M, Kepala Seksi Pengembangan Layanan Perpustakaan yang merupakan PIC (*person in charge*) dari kegiatan inklusi sosial di perpustakaan

“...karena pada PP No. 18 tahun 2016 tentang pelayanan daerah, perpustakaan sudah menjadi urusan wajib non pelayanan dasar, dituntut untuk melayani sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di kegiatan transformasi Kabupaten Magelang, misalnya dari segi peningkatan layanan kita menambah jam layanan, dampaknya pengunjung bisa meningkat 300 persen”.

Peningkatan pengunjung tersebut dihitung sejak tahun 2017. Saat itu pengunjung perpustakaan kira-kira 50 sampai 100 per hari. Setelah jam layanan diperpanjang, pengunjung mencapai 250 per hari, menurut penuturan A.M terkait dengan sarana untuk pemberdayaan masyarakat, Perpustakaan Umum Kabupaten Magelang telah menyediakan gedung serbaguna untuk kegiatan bagi komunitas atau organisasi yang ada di masyarakat secara gratis. Berikut pernyataan AM terkait dengan pemberdayaan bagi masyarakat difabel.

“...untuk sahabat-sahabat kita komunitas difabel, kami fasilitasi dengan kegiatan sesuai dengan kebutuhan mereka misalnya ingin meningkatkan keterampilan apa? Ketuanya kami undang ke sini. Kemudian mereka mintanya pelatihan mengolah resin. Ini contohnya ni (... *memperlihatkan karya...*) dari teman-teman difabel ini. Dari yang tuna grahita, cacat fisik kaki. Target 20 orang tapi yang datang 27 orang. Ada juga kalung yang dibuat dari resin”



Gambar 1.

Kegiatan pengolahan resin bagi masyarakat difabel
Sumber: Laporan Perpustakaan Umum Kabupaten Magelang

Pengolahan resin yaitu getah dari tanaman yang dapat mengeras dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat difabel tuna grahita dan cacat fisik hingga kreatif. Kedepan diharapkan pelatihan mengolah resin dilanjutkan, sehingga mendorong perekonomian masyarakat difabel.

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat juga menjalin kerjasama dengan

BUMD Kabupaten Magelang. Karya yang dihasilkan berupa barang-barang hiasan.



Gambar 2.

Hasil olahan resin dari pelatihan
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Kegiatan pemberdayaan masyarakat juga dilakukan terhadap wanita untuk memberdayakan ekonomi mereka seperti yang dituturkan oleh AM berikut,

“Untuk kaum ibu-ibu juga kami fasilitasi sesuai dengan kebutuhan, untuk menambah ekonomi keluarga. Mereka minta pelatihan craft dari tali kur. Sama itu mas, target 20 orang yang datang 33 orang”.

Kerjasama dalam kegiatan ini juga dilakukan dengan komunitas *handmagic*.

Pemberdayaan masyarakat bagi pelajar Perpustakaan Umum Kabupaten Magelang mengadakan pelatihan penulisan artikel populer bagi pelajar SMA/SMK/MA Kelas 10 dan 11 di wilayah Kabupaten Magelang pada tanggal 16, 23 Februari, dan 2 Maret 2019. Narasumber bermitra dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Kabupaten Magelang. Narasumber memberikan pengetahuan terkait tips, trik, strategi menulis yang baik, benar, menarik dan laku dipublikasikan. Tak hanya itu saja, narasumber selalu memberikan tugas penulisan pada setiap sesinya sehingga dapat terpantau perkembangannya.

Saat Perpustakaan Umum Kabupaten Magelang mengadakan Lomba Penulisan Artikel pada tanggal 27 Mei 2019, berdasarkan laporan dari Perpustakaan Umum Kabupaten

Magelang, salah seorang peserta yang juga ikut dalam pelatihan menulis artikel bernama Febriwati (SMAN 1 Muntilan-Kelas XI) memenangkan lomba tersebut. Tindak lanjut dari lomba tersebut, pemenang 6 (enam) besar diikutsertakan dalam lomba penulisan artikel tingkat provinsi, namun keenam perwakilan tersebut belum berhasil memenangkan kejuaraan. Terkait dengan Febriwati tadi, ia pun sudah berani mengirimkan artikelnya ke Majalah Suara Gemilang.



Gambar 3.

Pelatihan Artikel Populer

Sumber: Laporan Perpustakaan Umum Kabupaten Magelang

Kegiatan yang sudah dijelaskan pada wawancara tadi juga terdapat di Laporan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Perpustakaan Umum Kabupaten Magelang. Tabel berikut ini merupakan rincian laporan kegiatan dimaksud.

Tabel 1.
Kegiatan yang Diselenggarakan oleh Perpustakaan Umum Kabupaten Magelang (per-2019)

Kegiatan	Banyaknya peserta	Keterangan
Pelatihan artikel populer	25	3 kali dilaksanakan
Pelatihan membuat brosur	27	Bekerjasama dengan komunitas Hand Magic. Peserta dapat menjual sebanyak 25-100 buah karya mereka
Pelatihan Membuat olahan resin	20-27 (berdasarkan hasil wawancara)	Menjalin kemitraan dengan Kemitraan Komunitas Warsamundung (Difabel)

Seluruh kegiatan mengindikasikan bahwa perpustakaan umum dapat menjadi pusat kegiatan bagi seluruh masyarakat secara gratis. Perpustakaan tidak hanya buku saja namun 'hidup' dengan kegiatan-kegiatan yang akan menambah produktivitas dari masyarakat sehingga mereka berdaya Mulai dari layanan seperti jam kunjungan diperpanjang, hingga meningkatkan produktivitas masyarakat yang menggunakan perpustakaan.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat sebaiknya memanfaatkan koleksi yang ada di perpustakaan. AM juga mengatakan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat juga dikemas dari koleksi yang ada di perpustakaan, baik koleksi tercetak maupun informasi elektronik, sehingga fungsi perpustakaan sebagai penyedia koleksi bahan pustaka untuk sumber belajar bermanfaat.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Perpustakaan Umum Kabupaten Magelang telah melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan baik. Dari berbagai kegiatan yang ada dapat disimpulkan bahwa peran perpustakaan umum dalam mewujudkan masyarakat yang literat, tidak hanya menyediakan buku namun didalamnya juga melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan. Literasi diartikan sebagai kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan di masyarakat.

Mewujudkan Inklusi Sosial di Masyarakat

Perpustakaan umum pada dasarnya merupakan lembaga yang melayani masyarakat tanpa memandang bulu. Perpustakaan umum yang berbasis inklusi sosial tidak hanya mengizinkan seluruh lapisan masyarakat mengakses perpustakaan, namun juga membuat kegiatan yang melibatkan mereka. Utami & Prasetyo (2019) menuliskan bahwa perpustakaan yang berbasis inklusi sosial menjadikannya sebagai ruang untuk berkarya.

Terkait dengan inklusi sosial itu sendiri, Perpustakaan Umum Kabupaten Magelang telah memperhatikan kaum difabel, ekonomi lemah,

dan perempuan. Perihal inklusi sosial bagi masyarakat difabel dilihat dari jenis layanan bagi difabel seperti tersedianya ruang khusus dan pintu masuk khusus, bahkan kegiatan khusus. Masyarakat yang dari segi ekonomi rendah dapat mengikuti kegiatan yang ada di perpustakaan sehingga mereka lebih percaya diri dan tidak merasa marginal.

Bagaimana dengan lapisan masyarakat lainnya? Mahdi (2020) menyatakan terdapat masyarakat lain yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan perpustakaan berbasis inklusi sosial antara lain dari segi ras, etnis, agama, bahkan mantan atau penderita HIV/AIDS (ODHA) dan narkoba.

Terkait dengan etnis itu sendiri, Perpustakaan Umum Kabupaten Magelang terbuka untuk seluruh etnis seperti yang dituturkan oleh AM berikut.

“Jadi sebenarnya begini, dari kegiatan melibatkan masyarakat kebanyakan dari kaum ekonomi lemah, kalau dari beda etnis setiap hari Selasa, komunitas Chinese (Tionghoa) mengadakan pelatihan di sini seperti yoga jam 4 sore, bahkan dari pihak kami tidak boleh melihat karena mungkin, ya saya ga tau, karena kalau sudah gitu yaaa... Kita benar-benar inklusi tidak membedakan.... Fokus kami di sini adalah kepada masyarakat disabilitas (difabel) untuk membangkitkan semangat kemandirian.

Dari hasil wawancara tersebut, komunitas Tionghoa diperbolehkan untuk menyelenggarakan kegiatan yoga di perpustakaan walaupun memiliki aturan sendiri, dikarenakan inklusi sosial yang harus diterapkan di perpustakaan tersebut. Lebih lanjut, sebenarnya hal terkait dengan pemberdayaan etnis yang termarginal dapat dikaji lebih dalam oleh pihak perpustakaan. Mengenai masyarakat etnis yang termarginal karena diskriminasi, terdapat berita terakhir yang dilansir dari Tirto (2018) yaitu penelitian dari pihak Komnas Ham.

Mereka mencatat sedikitnya 101 kasus diskriminasi ras dan etnis dalam periode 2011-2018 yang dilaporkan, salah satunya adalah

layanan terhadap fasilitas publik. Maka dari itu, Perpustakaan Umum Kabupaten Magelang dapat menelaah lebih lanjut mengenai data masyarakat yang termarginal secara etnis dalam menggunakan fasilitas umum. Setelah itu dibuat kajian mengenai langkah untuk memberdayakan mereka.

Kemudian untuk masyarakat lain seperti ODHA, berikut penuturan AM

“Terus terang kalau mengenai HIV itu kan sensitif, jadi kita belum mencoba ke arah situ. Dari dinas kesehatan, sosial, maupun kepolisian belum tentu memberi data karena itu sangat sensitif.”

Dapat dikatakan bahwa pihak Perpustakaan Umum Kabupaten Magelang belum memberdayakan pengidap HIV/ODHA. Menurut AM, sebenarnya hal tersebut dapat dilakukan dengan membuat kegiatan yang melibatkan pengidap HIV/ODHA, karena berpijak pada definisi inklusi sosial tadi yakni mengayomi seluruh masyarakat tanpa pandang bulu.

Kegiatan pemberdayaan bagi pengidap HIV/ODHA dapat dilakukan kerjasama dengan lembaga terkait. Sebagai contoh, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Graha Mitra yang bekerja untuk memberdayakan pengidap HIV/ODHA (Yayasan Pelita Ilmu, 2018). Pelayanan untuk mereka membutuhkan seseorang atau lembaga yang benar-benar peduli atau dapat menerima kondisi mereka (Tursilarini & Hermawati, 2019). Hal itu karena biasanya mereka telah mempelajari seluk beluk mengenai ODHA dan bagaimana kondisi yang mereka rasakan baik dari segi fisik maupun psikis. Namun, sebenarnya yang lebih dirasakan oleh penderita HIV/AIDS adalah beban psikologis akibat dikucilkan oleh masyarakat (Iswati et al., 2017).

Maka dari itu, perpustakaan umum dalam meningkatkan layanan berbasis inklusi sosial sebenarnya juga memiliki peran untuk mengayomi pengidap HIV/ODHA, walau tidak sebanyak peran dinas terkait yang mengurus hal tersebut. Perpustakaan umum dapat

memberikan fasilitas atau layanan (termasuk program) untuk memberdayakan mereka

Terakhir, aspek lain yakni kesadaran masyarakat, AM menuturkan bahwa sampai sekarang belum terlihat masyarakat normal yang berkeinginan untuk memberdayakan masyarakat yang berpotensi termarjinalkan. Kesadaran masyarakat ini tentu juga menjadi aspek untuk membangun kota atau daerah yang inklusif (Maftuhin, 2017). AM kemudian melanjutkan, solusinya berupa promosi yang lebih kuat kepada masyarakat tentang inklusi sosial di perpustakaan.

Penutup

Kesimpulan: Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa Perpustakaan Umum Kabupaten Magelang telah melakukan berbagai macam kegiatan dengan melibatkan masyarakat dalam mewujudkan inklusi sosial di lingkungan sekitar. Memberi perhatian pada seluruh masyarakat terutama difabel, wanita dan siswa.

Untuk masyarakat difabel, seperti tuna grahita, Perpustakaan Umum Kabupaten Magelang menyelenggarakan kegiatan prakarya dengan mengolah resin. Bagi perempuan terdapat kegiatan pengolahan tali kur yang diselenggarakan bekerjasama dengan komunitas Hand Magic.

Pemberdayaan masyarakat di perpustakaan juga memperhatikan etnis yang tergolong minoritas yakni komunitas Tionghoa. Perpustakaan menyediakan fasilitas dan layanan kepada mereka dalam membuat kegiatan walau mereka memiliki peraturan sendiri. Ini merupakan suatu langkah yang baik dalam mewujudkan inklusi sosial. Namun pihak mereka masih belum mengarah untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat penderita HIV/ODHA karena masih sensitif.

Rekomendasi: Sebaiknya dilakukan kajian bagi pengidap HIV/ODHA tentang bagaimana memberdayakan mereka. Hal tersebut dapat dilakukan, bekerjasama dengan organisasi lain seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM). Selain itu, perpustakaan dapat melihat

potensi masyarakat yang termarjinal untuk diberdayakan oleh pihak perpustakaan. Perwujudan perpustakaan berbasis inklusi sosial, berarti mengayomi seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat yang termarjinal baik ras, agama, suku, status maupun keadaan.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada pihak Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang yang sudah memberikan izin penelitian ini, serta dosen pembimbing saya, bapak Andi Asari, S.IP., M.A yang telah membantu dalam penelitian ini.

Pustaka Acuan:

- Bhaskara, I. L. A. (2018). *Survei Komnas HAM: Diskriminasi Etnis & Ras Masih Terus Ditolerir*. Tirto. <https://tirto.id/survei-komnas-ham-diskriminasi-etnis-ras-masih-terus-ditolerir-dahP>
- Connaway, L. S., & Powell, R. R. (2010). *Basic research methods for librarians* (5th ed.). Libraries Unlimited.
- Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Jawa Barat. (2019). *Siti, sebuah bukti positif dari praktik inklusi sosial di perpustakaan jawa barat*. Laman Web Dipuspida Jawa Barat. <http://dispupida.jabarprov.go.id/artikel/detail/19061316044544>
- Harususilo, Y. E. (2019). *Perpustakaan: dari Pusat Informasi menjadi Pemberdayaan Masyarakat*. Kompas. <https://edukasi.kompas.com/read/2019/03/14/22513901/perpustakaan-dari-pusat-informasi-menjadi-pemberdayaan-masyarakat?page=all>
- Hendrawan, M. (2015, August 19). Peran Perpustakaan Umum dalam Membangun Masyarakat Informasi : Sebuah Telaah Ruang Publik Jürgen Habermas. *Semiloka Kepustakawanan Infonesia 2015 "Library Move On: Bangga Menjadi Profesional Di Dunia Perpustakaan Dan Informasi."* <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4247.4961>
- IFLA. (2010). The mission and purposes of the public library. In C. Koontz & B. Gubbin (Eds.), *IFLA Public Library Service Guidelines* (pp. 1–20). International Federation of Library Association. <https://doi.org/10.1515/9783110232271.1>
- IFLA. (2016). Access and Opportunity for all: How libraries contribute to the United Nations 2030 Agenda. *IFLA Journal*, 24. <http://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/access-and-opportunity-for-all.pdf>

- International Federation of Library and Information Associations & Institutions. (2016). *IFLA/UNESCO Public Library Manifesto 1994*. IFLA Webpage. <https://www.ifla.org/publications/ifaunesco-public-library-manifesto-1994>
- Iswati, R., Utami, S. B., & Matahari, R. (2017). IbM Pemberdayaan kelompok dukungan sebaya (KDS) ODHA berdaya wujudkan kemandirian dan kesejahteraan. *Media Komunikasi Dan Informasi Hasil Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2).
- Lawal, I. (2009). Library and Information Science Research in the 21st Century. *Library and Information Science Research in the 21st Century*. <https://doi.org/10.1533/9781780630151>
- Maftuhin, A. (2017). Mendefinisikan Kota Inklusif: Asal-Usul, Teori Dan Indikator. *Tataloka*, 19(2), 93. <https://doi.org/10.14710/tataloka.19.2.93-103>
- Mahdi, R. (2020). Strengthening Community Economy Inclusively through Literacy for Prosperity National Library of Indonesia's Role to Support. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 1(2), 160–176. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v1i2.62>
- Mahdi, R., & Ramadhan, F. W. (2019). Local content promotion in forming Malang City Public Library's brand equity. *EduLib*, 9(2). <https://doi.org/10.17509/edulib.v9i2.18648>
- Mahmudah, S., Badriyah, S. M., Turisno, B. E., & Soemarmi, A. (2019). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(4), 393. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.393-401>
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif* (N. Retnowati (ed.)). Zifatama Publisher.
- Noor, M. U. (2019). Aplikasi Layanan Informasi Berbasis Internet untuk Menumbuhkan Inklusi Sosial di Perpustakaan Daerah. *Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 4(1), 84–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.30829/jipi.v4i1.4122>
- Prasetyawan, Y. Y., & Suharto, P. (2015). Inklusi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Perpustakaan Desa. *Acarya Pustaka*, 1(1), 31–40. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/AP/article/view/7146/4874>
- Pujileksono, S. (2015). *Pengantar antropologi: memahami realitas sosial budaya* (ed. rev.). Intrans Publishing.
- Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35–40. <https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184>
- Rahman, N. E. (2018). Potret Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Aset Lokal pada Kelompok Budidaya Ikan Koi di Desa Banyuglugur Kecamatan Banyuglugur Situbondo. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 17(3), 207–216. <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/jpks/article/download/1457/863>
- Salam, A. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kebudayaan. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 3(2), 104–106. <https://doi.org/10.30653/002.201832.95>
- Silver, H. (2015). The Contexts of Social Inclusion. *SSRN Electronic Journal*, 144. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2641272>
- Tursilarini, T. Y., & Hermawati, I. (2019). Pendampingan Pekerja Sosial dalam Rehabilitasi Sosial Orang dengan HIV-AIDS = Social Workers Assistance in Social Rehabilitation of People Living With HIV-AIDS Tateki. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 18(2), 149–166. <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/jpks/article/view/1805>
- UNDESA. (2016). Identifying social inclusion and exclusion. In *Leaving no one behind: imperative on inclusive development* (pp. 17–31). <https://doi.org/10.18356/5890648c-en>
- Utami, D., & Prasetyo, W. D. (2019). Perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk pembangunan sosial-ekonomi masyarakat. *Visi Pustaka*, 21(1), 29–35.
- Vårheim, A., Steinmo, S., & Ide, E. (2008). Do libraries matter? Public libraries and the creation of social capital. *Journal of Documentation*, 64(6), 877–892. <https://doi.org/10.1108/00220410810912433>
- Warsilah, H. (2015). Pembangunan Inklusif Sebagai Upaya Mereduksi Eksklusi Sosial Perkotaan: Kasus Kelompok Marjinal di Kampung Semanggi, Solo, Jawa Tengah. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 17(2), 207–232. <https://doi.org/10.14203/JMB.V17I2.283>
- Winoto, Y., & Sukaesih. (2019). Studi Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyelenggaraan Perpustakaan Desa (Pusdes) Dan Taman Bacaan Masyarakat (Tbm). *EduLib*, 9(1), 79–94. <https://doi.org/10.17509/edulib.v9i1.16170>
- Yayasan Pelita Ilmu. (2018). *Social entrepreneurship sebagai upaya pemberdayaan ODHA*. Yayasan Pelita Ilmu. <http://ypi.or.id/social-entrepreneurship-sebagai-upaya-pemberdayaan-odha/>
- Zen, Z., & Wuryani, I. (2011). Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota. In *Standar Nasional Perpustakaan (SNP)*. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Faktor-Faktor Keberhasilan Keluarga Penerima Manfaat untuk Mencapai Graduasi dari Program Keluarga Harapan

Success Factors for Beneficiary Families to Achieve Graduation from the Hope Family Program (PKH)

Risna Kusumaningrum¹, Fentiny Nugroho², dan Alfrojems³

^{1,2,3}Universitas Indonesia, JL. Margonda Raya Pondok Cina, Depok, Jawa Barat 16424

¹e-mail: riku.chrysalis@gmail.com, ² e-mail: fentiny2015@gmail.com, ³ e-mail: alfro.jems@gmail.com

Diterima tanggal 26 Juni 2020, direvisi tanggal 15 Juli 2020, disetujui tanggal 27 Agustus 2020

Abstract

One of the programs carried out by the Government of Indonesia to reduce poverty is the Family Hope Program (PKH). Until 2020 PKH has reached a total of 10 million of Beneficiary Families (KPM). In the midst of this program, PKH is currently focused on the contribution of the poverty reduction program, one aspect of which is the KPM graduation rate. The purpose of this study was to describe and analyze the determinants of the success of KPM in achieving graduation from PKH. This research approach was descriptive qualitative. Data were collected using in-depth interviews, observation and documentation study. Informants were selected purposively based on the criteria relevant to the research objectives. Primary data and secondary data collected were analyzed descriptively. The results of this study indicated that there were eight success factors that made KPM achieved graduation from PKH, such as mindset, bad experiences in the past, high fighting power and enthusiasm, not easily discouraged, money management ability, taking advantage of opportunities, discipline and commitment and social sensitivity. The mindset and the ability to manage money were the most dominant factors in determining the graduation. Researchers recommend that the Ministry of Social Affairs and local governments increase the empowerment of KPM to leave PKH and the need to strengthen the role of human resources from PKH as stated in the Family Capacity Building Meeting (P2K2) material, especially related to the eight success factors for achieving KPM graduation from PKH. Researchers also recommend that PKH facilitators need to continue to increase their role, especially in carrying out P2K2 activities that can change the mindset and independence of KPM and to increase their ability in financial management.

Keywords: *poverty; graduation; Hope Family Program*

Abstrak

Salah satu program yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mengurangi kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Sampai dengan tahun 2020 PKH telah menjangkau sejumlah 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Di tengah berlangsungnya program tersebut, saat ini PKH difokuskan pada kontribusi program pengurangan angka kemiskinan, salah satu aspeknya adalah angka graduasi KPM. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa faktor-faktor penentu keberhasilan KPM untuk mencapai graduasi dari PKH. Pendekatan penelitian ini adalah diskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Informan dipilih secara purposif berdasarkan kriteria yang relevan dengan tujuan penelitian. Data primer dan data sekunder yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat delapan faktor keberhasilan yang membuat KPM mencapai graduasi dari PKH, seperti pola pikir, pengalaman pahit di masa lalu, daya juang dan semangat yang tinggi, tidak mudah putus asa, kemampuan pengelolaan uang, memanfaatkan peluang, disiplin dan komitmen serta kepekaan sosial. Pola pikir dan kemampuan atas pengelolaan uang menjadi faktor yang paling dominan dalam menentukan graduasi. Peneliti merekomendasikan agar Kementerian Sosial dan pemerintah daerah meningkatkan pemberdayaan KPM agar keluar dari PKH serta perlunya penguatan peran SDM dari PKH yang tertuang dalam materi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), khususnya terkait dengan delapan faktor keberhasilan demi tercapainya graduasi KPM dari PKH. Peneliti juga merekomendasikan agar pendamping PKH perlu terus meningkatkan perannya khususnya dalam melakukan kegiatan P2K2 yang dapat mengubah pola pikir dan kemandirian dari KPM serta untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan keuangan.

Kata Kunci: kemiskinan; graduasi; Program Keluarga Harapan

Pendahuluan

Sistem perlindungan sosial di Indonesia berkembang dari waktu ke waktu. Melalui UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan sistem jaminan sosial yang lebih terstruktur dan juga menyeluruh. Pemenuhan hak-hak dasar melalui program jaminan serta bantuan sosial akan memberi dampak pada penurunan kemiskinan dan ketimpangan. Salah satu program perlindungan sosial diberikan dalam bentuk bantuan sosial. Bantuan sosial merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada suatu kelompok tertentu difokuskan kepada kelompok masyarakat paling miskin dari seluruh populasi. Beberapa program bantuan sosial di Indonesia yang menjadi prioritas nasional antara lain Program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia Sehat (PIS) khususnya untuk kelompok masyarakat miskin yang ditetapkan untuk menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk PKH, mengingat penerimanya adalah masyarakat dengan kategori paling miskin maka pemerintah mewajibkan bahwa peserta PKH juga menjadi penerima program bantuan sosial lainnya. PKH merupakan program yang dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers (CCT)*. CCT saat ini banyak diadopsi di berbagai negara sebagai strategi program bantuan sosial (Rawlings dan Rubio, 2005). Banyak negara di Amerika Latin, Afrika dan Asia yang menerapkan CCT di negaranya seperti Meksiko, Brazil, Turki, Chili, Kolombia, Ekuador, Jamika, Honduras, Panama, Afrika Selatan, Nikaragua, Kamboja, Filipina, Pakistan, Bangladesh termasuk Indonesia.

CCT seperti PKH (bantuan tunai bersyarat di Indonesia) dinilai efektif dan tidak diragukan dalam meningkatkan konsumsi bagi rumah tangga penerimanya serta mengurangi insidensi dan intensitas kemiskinan serta ketimpangan (Fiszbein and Schady, 2009; Stampini and

Tornarolli, 2012; Levy and Schady, 2013). Bantuan PKH diberikan dalam bentuk nontunai yang dapat dikelola rumah tangga KPM. Bantuan sosial tersebut, mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Bahkan sebuah penelitian mengungkapkan bahwa CCT bukan hanya meningkatkan konsumsi dalam rumah tangga, tetapi juga meningkatkan kualitas dan variasi konsumsi makan dalam rumah tangga (Ruiz-Arranz et al., 2006). Fatma (2014) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa dampak PKH terhadap konsumsi rumah tangga bervariasi, mulai dari konsumsi makanan, maupun konsumsi pendidikan. PKH juga memberikan dampak secara signifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga. Microsave Consulting (2019) menyampaikan dalam hasil penelitiannya bahwa pengeluaran total secara bulanan dari KPM lebih tinggi 3,8 persen daripada non-KPM PKH. Sedangkan untuk pengeluaran non-makanan secara bulanan lebih tinggi 11,8 persen daripada non-KPM PKH.

Tidak hanya terhadap konsumsi rumah tangga, CCT juga dinilai memberikan dampak pada pengurangan angka pekerja anak dan meningkatkan anak masuk dan kehadiran di sekolah (Galiani and McEwan, 2013; Edmonds and Schady, 2012). Di Meksiko, setelah 3 sampai dengan 5 tahun program diimplementasikan, pendidikan sekolah meningkat dari enam bulan menjadi satu tahun. Ini juga terjadi di Nicaragua, setelah tiga tahun anak penerima program mengalami peningkatan lebih cepat dibandingkan dengan anak dari rumah tangga yang tidak menerima program (Barham, Macours and Maluccio, 2013).

Dalam bidang kesehatan, dapat dilihat dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan. World Bank pada Midline Study 2010 menyatakan bahwa dampak PKH terhadap konsumsi kesehatan meningkat. Kunjungan ke fasilitas kesehatan sebelum proses kelahiran (ante natal) meningkat 13 persen, sedangkan kunjungan setelah proses kelahiran meningkat

(post natal) meningkat 7 persen. Balita PKH dicatat memiliki peluang 3 persen lebih besar dibanding non-PKH untuk menyelesaikan vaksinasi. TNP2K (Endline Study, 2014) menyatakan bahwa balita yang menyelesaikan imunisasi meningkat 5 persen. Microsave Consulting juga mencatat bahwa penerima PKH 7,4 persen lebih sering mengunjungi fasilitas kesehatan dibandingkan dengan non-PKH. Penerima PKH 20,9 persen lebih sering melakukan pemeriksaan perkembangan anak dibanding non-PKH.

Program Keluarga Harapan dilaksanakan sejak tahun 2007 di Indonesia, jumlah penerima manfaat terus mengalami peningkatan setiap tahun. Amanah UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, untuk menggunakan satu data terpadu (pasal 10). Data tersebut merupakan data penduduk miskin yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh daerah melalui teknologi informasi kemudian ditetapkan menjadi data terpadu oleh Menteri Sosial. Dengan demikian, untuk seluruh program penanggulangan kemiskinan di Indonesia diamanatkan untuk menggunakan data terpadu dimaksud yang saat ini disebut dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Kementerian Sosial pada Januari 2019 mencatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terdapat 27.305.510 jumlah rumah tangga (RT), 31.430.304 jumlah keluarga (KK), dan 99.359.312 jumlah penduduk (jiwa) yang berada pada kategori miskin dan hampir miskin (rentan). Program bantuan sosial yang diluncurkan pemerintah difokuskan menyasar pada kelompok ini, untuk PKH mencapai 10 juta keluarga.

Tantangan yang kemudian muncul adalah penilaian kinerja pemerintah melalui program bantuan sosial khususnya PKH. Setelah berjalan mencapai 12 tahun, program ini mulai disorot untuk menghasilkan dampak yang lebih luas dan bersifat jangka panjang, khususnya dalam

peningkatan kesejahteraan penerima manfaat. Hingga saat ini, Kementerian Sosial sebagai pelaksana PKH belum memiliki indikator yang digunakan secara resmi untuk mengukur kesejahteraan penerima manfaat. Sistem informasi mencatat bahwa sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini, terdapat 1.966.619 keluarga yang sudah tidak mendapatkan bantuan PKH lagi, baik karena mereka sudah dinyatakan sejahtera (sehingga tidak layak menerima program) oleh pendamping maupun karena mereka sudah tidak memiliki komponen yang dipersyaratkan dalam kepesertaan PKH (Direktorat JSK, 2019). Dari data tersebut 19 persen atau sebanyak 374.326 keluarga yang dinyatakan telah graduasi secara mandiri. Dalam konteks penelitian ini, graduasi yang dimaksud adalah graduasi mandiri. Terdapat beberapa cerita menarik tentang KPM PKH yang dinyatakan graduasi sejahtera mandiri. Salah satunya di Kota Bekasi, KPM (SJ) yang berhasil graduasi sejahtera mandiri hingga diberi apresiasi oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Februari 2019 (<https://www.kemsos.go.id/kpm-pkh-graduasi-mandiri-asal-bekasi-dapat-apresiasi-dari-presiden>).

Data Kementerian Sosial (Direktorat Jaminan Sosial Keluarga) menunjukkan sampai dengan tahun 2019, masih terdapat keluarga yang menerima bantuan PKH sejak tahun 2007 yaitu sebanyak 177.045 keluarga. Sedangkan untuk peserta sejak tahun 2008 sebesar 125.802 keluarga. Dengan demikian, keluarga ini menerima bantuan sosial PKH lebih dari 10 tahun. Kondisi ini juga terjadi di Kota Bekasi dimana terdapat 6.130 KPM yang belum graduasi sejak tahun 2012 setelah 7 (tujuh) tahun menerima PKH.

Temuan di lapangan terdapat KPM yang dapat graduasi hanya dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun (Kementerian Sosial, 2019). Hal ini menarik untuk diteliti, salah satunya adalah menggali faktor-faktor pendukung apa saja yang dimiliki keluarga tersebut untuk keluar (graduasi) secara mandiri dari PKH. Bagaimana

KPM menjadi tidak tergantung akan bantuan sosial berupa uang tunai yang mereka terima dari pemerintah. Berdasarkan latar belakang tersebut maka tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor keberhasilan bagi KPM untuk graduasi secara mandiri dari PKH?

Penggunaan Metodel Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pola pikir yang akan digunakan secara induktif. Penelitian ini berangkat dari fakta yang ada dan data hasil temuan lapangan akan disandingkan dengan menggunakan pemikiran teoritis ataupun dalam pembentukan konsep baru (Neuman, 2006). Lokasi penelitian adalah Kota Bekasi, Jawa Barat dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah sub urban yang berbatasan dengan ibu kota.

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Neuman (2006) menjelaskan bahwa teknik *purposive sampling* adalah teknik pemilihan informan di mana peneliti diperbolehkan untuk memilih sampel sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah ditetapkan. Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang yang terdiri atas 3 orang pendamping PKH dan 6 orang KPM yang sudah dinyatakan graduasi secara mandiri dari PKH. Adapun informan KPM dalam penelitian ini adalah KPM sesungguhnya yang menjadi dampingan dari informan pendamping PKH. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara. Selanjutnya, baik data primer maupun data sekunder yang terkumpul dibaca dan dipelajari, ditandai dengan kata-kata kunci dan diambil gagasan ataupun tema dalam data kemudian dicatat model yang ditemukan dan selanjutnya dilakukan koding (McDrury dalam Moleong, 2007). Tema akan dikelompokkan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif sesuai dengan tujuan penelitian.

Hasil Dan Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti menggambarkan faktor-faktor penentu keberhasilan KPM untuk graduasi mandiri dari PKH. Suharnan (2012) juga mengungkapkan dalam jurnal penelitiannya bahwa mandiri yaitu cenderung mempercayai dan memanfaatkan secara maksimal kemampuan-kemampuan yang dimiliki di dalam menjalankan tugas, mengambil keputusan atau memecahkan masalah tanpa banyak berharap bantuan ataupun pertolongan orang lain. Salah satu aspek kemandirian antara lain mengambil inisiatif atau prakarsa sendiri di dalam memikirkan sesuatu dan melakukan tindakan, tanpa diperintah, disuruh, diingatkan ataupun dianjurkan orang lain. Artinya, seseorang dikatakan mandiri jika ia menyadari sesuatu yang penting dan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Beberapa faktor penentu keberhasilan graduasi mandiri ditemukan peneliti dari jawaban-jawaban informan khususnya SDM PKH dan juga KPM Kota Bekasi sebagai berikut.

Pola Pikir

Dalam menuju kemandirian, terdapat empat aspek yang dapat memberikan kontribusi yaitu kognitif, konatif, afektif dan psikomotorik. Semua aspek ini akan mempengaruhi kondisi masyarakat yang memiliki kecukupan wawasan dan dilengkapi dengan keterampilan yang memadai sehingga dapat mencapai kemandirian (Ambar, 2004, h 80). Pola pikir merupakan aspek kognitif seseorang yang dapat mempengaruhi perilakunya (afektif dan psikomotorik) termasuk dalam pengambilan keputusan.

Salah satu informan adalah pendamping sosial menyampaikan bahwa KPM yang graduasi umumnya mereka memiliki pola berpikir yang visioner. Mereka tidak nyaman berada dalam kondisi kemiskinan sehingga berpikir bagaimana memperbaiki kehidupannya. *"Menurut saya, KPM yang graduasi adalah mereka punya pola pikir yang lebih maju."* (RN, 1 Mei 2020).

Hal yang sama juga ditemui peneliti pada jawaban-jawaban informan yang merupakan KPM graduasi. Pada umumnya mereka memiliki kesadaran bahwa pendidikan penting bagi investasi anak-anak mereka. Berikut beberapa pernyataan KPM dimaksud: *“Kalau saya pikirannya, gimana biar hidup saya nggak kaya gini terus.. yang penting anak-anak bisa selesai sekolah..”* (MN, 2 Mei 2020). Aspek kognitif atau pola pikir KPM ini menjadi dasar dalam mendukung aktivitas anak-anaknya dalam menempuh pendidikan ataupun upaya KPM dalam memiliki usaha sendiri. Pendamping PKH melalui kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) berperan penting dalam mengubah pola pikir KPM sehingga diwujudkan dalam perubahan perilaku menuju kesejahteraan dan kemandirian.

Dari pernyataan salah satu KPM, peneliti menemukan cara pandang yang tidak hanya melihat kondisi kehidupan tersebut di keluarganya saja, melainkan membandingkan dengan kehidupan KPM yang lain. *“Saya bahkan kepikiran, kalau liat orang-orang masih banyak yang miskin dan merasakan jadi orang miskin. Oleh karena itu, saya berharap PKH dilanjutkan, tetapi jangan salah sasaran..”* (SH, 5 Mei 2020).

Berdasarkan jawaban informan pendamping dan 4 orang KPM yang sudah graduasi, peneliti menemukan bahwa pola pikir (*mindset*) dari KPM yang telah graduasi ingin menjadi lebih maju. Temuan peneliti dari sudut pandang KPM searah dengan pendapat dari sisi pendamping. Temuan di lapangan, KPM ini dapat terbilang cukup visioner menentukan masa depannya. KPM ingin anak-anak mampu menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi dari mereka. Bahkan, KPM memiliki inisiatif untuk membuka usaha sebagai cara mencapai ataupun mewujudkan keinginan mereka. Dalam hal ini, KPM membuka usaha berdagang karena ia sadar bahwa meningkatkan kesejahteraan hidupnya adalah tugas dan tanggung jawabnya sendiri. Hal ini disebutkan oleh Suharnan (2012) dalam

hasil penelitiannya bahwa salah satu aspek kemandirian seseorang antara lain mengambil inisiatif ataupun prakarsa sendiri di dalam memikirkan sesuatu dan melakukan tindakan. Seseorang tersebut dapat mengambil prakarsa tanpa diperintah, disuruh, diingatkan ataupun dianjurkan orang lain. Artinya, seseorang dikatakan mandiri jika ia menyadari sesuatu yang penting dan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Mereka melakukannya atas kemauan sendiri dan bukan atas perintah orang lain. Meskipun pendamping juga berperan dalam mempengaruhi pola pikir tersebut, namun KPM memiliki keinginan yang kuat untuk lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Pernyataan KPM yang menyatakan bahwa dirinya tidak dapat melihat anaknya tidak sekolah menggambarkan bahwa ia berpikir dan berusaha atas kehidupan masa depan anaknya. Keinginan tersebut tidak hanya sebuah keinginan, tetapi ia melakukan berbagai upaya untuk mewujudkannya yaitu dengan memulai usaha berjualan makanan. Usaha tersebut diinisiasi dari KPM itu sendiri sehingga ketika usahanya berkembang, ia juga yang berinisiasi untuk mengundurkan diri dari PKH.

Pengalaman Pahit di Masa Lalu

Peneliti menemukan bahwa masa lalu KPM yang sangat kelam dan susah ternyata dapat memotivasi dirinya untuk berjuang meningkatkan kesejahteraannya. Hasil wawancara 75 persen KPM, ditemukan jawaban KPM selalu membandingkan kehidupannya saat ini dengan masa lalu, khususnya sebelum menerima PKH. Berikut pernyataan KPM dimaksud. *“Ya liku-liku hidup saya emang pahit Bu mudah-mudahan anak saya jadi orang. kalau ingat itu sedih Bu, dagang nasi uduk kalau nggak abis ya di makan sendiri. Anak-anak saya sampai ngeluh Bu emang nggak ada makanan lain. Rasanya sakit waktu itu kalau anak saya ngomong kayak gitu, saya merasa sedih. Ih jual ketupat nggak habis Makanlah nak ketupat. Gitu terus jadi nggak kayak orang-*

orang yang ngerasain. Hari ini makan ayam besok makan ikan atau apa gitu. Kalau saya sih cuma ngingetin anak-anak jangan sampai makanan itu dibuang.” (MN, 2 Mei 2020).

Pengalaman masa lalu ternyata dapat menjadi kekuatan bagi KPM untuk berubah. Berubah di sini berarti ia berupaya untuk memperbaiki keadaan. Dalam pernyataan KPM, peneliti bukan saja menemukan pengakuan atas pengalaman pahitnya, tetapi bagaimana ia juga mengekspresikan masa lalunya sebagai sesuatu yang kelam. Dari nada bicaranya, ia sangat berharap ia tidak mengulang kejadian seperti itu. Ia mampu menceritakan secara rinci atas pengalaman pahitnya. Ada kesan yang sangat mendalam dari dirinya di masa itu. Berdasarkan pernyataan tersebut maka peneliti mendapat gambaran bahwa KPM tersebut telah berhasil melewati masa sulitnya. Ia mengaku bahwa bantuan dari PKH sangat membantu dirinya saat itu sebagai langkah awal peningkatan pendapatan dalam keluarganya. Kemudian perlahan ia dapat berpikir bagaimana ia mengembangkan dirinya untuk bertahan hidup. Inilah yang disebutkan Suharto bahwa kemiskinan seringkali erat kaitannya dengan kondisi tidak adanya masa depan karena tidak ada intervensi untuk pendidikan dan keluarga (Suharto, 2004). Dengan adanya PKH yang membantu KPM untuk mengakses pada layanan pendidikan, membuat KPM menjadi lebih dapat berkonsentrasi atau fokus pada pengembangan hidupnya. Midgley mengungkapkan bahwa definisi kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia di mana seluruh permasalahan sosialnya terkelola dengan baik, kebutuhannya dapat terpenuhi dan kesempatan sosialnya termaksimalkan (Midgley, 1995).

Daya Juang dan Semangat yang Tinggi

Selain pola pikir, hal yang terungkap adalah mereka memiliki daya juang dan semangat yang tinggi. Mereka kerap berjuang dengan melakukan banyak usaha demi memperbaiki

hidupnya. Berikut jawaban-jawaban dari para KPM yang telah graduasi: *“Tadinya saya kerja, tetapi begitu sudah tidak kerja lagi, kita mah apa aja.. ya cuci gosok, bikin kue di tetangga.. namanya perempuan ya bu.. sekarang mah udah ah jualan ini (makanan) aja di depan rumah..” (TR, 2 Mei 2020).* *“Waktu awal jualan, saya ngga mikir banyak untung dulu bu. Jujur saja saya ngambil untungnya dikit. Karena saya berpikir kalau orang pada suka terus pesen banyak, berarti nanti saya dapat banyak juga. Biar kecil, yang penting rutin. Kalau saya gitu bu. Yaah namanya kalau usaha, biasa lah bu ada naik turun.” (YA, 7 Mei 2020).*

Salah satu informan pendamping menyebutkan bahwa kultur budaya seseorang berpengaruh terhadap etos kerja ataupun daya juang yang dimiliki KPM. Temuan dari jawaban informan adalah bahwa daya juang dan semangat yang tinggi sangat berpengaruh pada hasil yang mereka capai. Meskipun mereka tidak menyebutkan secara langsung, namun peneliti dapat menganalisa dari jawaban para informan, tersirat bahwa mereka adalah pekerja keras. Mereka menggunakan segala cara untuk menjadi produktif. Pekerjaan apapun dilakukan demi adanya pendapatan dalam keluarga. Mereka memulai dari suatu yang kecil dan sederhana. Sebagian KPM sudah lebih berhasil dalam mengembangkan usahanya, sebagian masih mencoba pola untuk peluang usahanya. Dalam hal ini, peneliti melihat bahwa KPM menyadari bahwa dirinya harus bertahan hidup. Mereka tidak pernah bermimpi sebelumnya bahwa terdapat program yang dapat menolong mereka untuk membantu anak-anak baik dalam pendidikan maupun anggota keluarga dalam mendapat layanan kesehatan. Pernyataan KPM, sebelum mereka menerima PKH usaha keras yang mereka lakukan lebih kepada upaya agar anak-anak mereka dapat menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka menyadari bahwa pendidikan anak penting sebagai modal baik untuk memperoleh pekerjaan maupun penghasilan yang lebih baik.

Namun, karena tidak ada dukungan layanan sosial yang membantu mereka baik dalam pendidikan maupun kesehatan, kerja keras mereka tidak mencapai hasil yang maksimal. Dengan kata lain, mereka sudah bekerja keras, namun karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki (misalnya pendidikan mereka yang rendah) mempengaruhi hasil yang diperoleh (pendapatan rendah). Sedangkan di sisi lain, biaya hidup termasuk biaya pendidikan dan kesehatan sangat tinggi. Inilah kemudian yang membuat mereka terperangkap dalam kemiskinan atau yang sering dikenal dengan *poverty trap* (Chambers dalam Suyanto, 2013).

Tidak Mudah Putus Asa

Peneliti menemukan bahwa KPM graduasi di Kota Bekasi adalah orang-orang yang tidak mudah putus asa. Ini tergambar dari bagaimana mereka berjuang dan mengalami kegagalan ataupun kesulitan, tetapi tetap terus mencoba memperbaiki kondisi tersebut untuk menjadi lebih baik. Tidak mudah putus asa menggambarkan situasi di mana seseorang bisa kembali bangkit dari kegagalan. Dalam jawaban-jawaban informan baik pendamping maupun KPM menggambarkan bahwa KPM yang graduasi sejahtera mandiri adalah mereka yang terus berjuang memperbaiki kesulitan dan kegagalannya. Mereka tidak berhenti ketika mereka gagal khususnya pada saat mereka mengembangkan usaha. Mereka yang awalnya karena keterdesakan ekonomi membuat mereka berinisiatif dengan mengandalkan kemampuan yang dimiliki untuk mencoba membuka usaha. Tidak ada pelatihan baik dari sisi keterampilan teknis maupun pengelolaan keuangan secara spesifik dalam kewirausahaan, “memaksa” mereka menggunakan pengalaman sebagai media belajar untuk tetap bertahan dalam usaha ekonomi.

Kemampuan Pengelolaan Uang

Kemampuan mengelola uang dengan baik ternyata menjadi faktor yang mempengaruhi

keberhasilan para KPM graduasi dari PKH. Berikut ini merupakan pernyataan KPM yang menggambarkan pengalaman mereka dalam mengelola keuangan. *“Cara mengelola uang ya yang 50 itu biasanya kita simpan karena kan saya punya tanggungan untuk bayar kontrakan. Saya juga masih punya utang buat bayar anak kemarin masuk SMA itu saya utang Rp5.000.000 jadi saya kan belum bisa bayar waktu itu jadi masih ada tunggakan. Jadi kalau ada rezeki saya bayar ngangsur gitu Bu sisa angsuran saya masih 3 juta. Kalau untuk modal setiap hari kita jualan nasi padang untuk beli cabe, daun singkong, ayam, daging ya kira-kira habis sekitar Rp.500.000,- sampai Rp700.000,-. Selain itu, saya harus beli gas dan beras. Satu tabung gas yang kecil tidak cukup untuk 2 hari. Saya tidak tau isi tabung gas sesuai atau tidak karena hampir setiap hari harus beli gas.”* (WI, 2 Mei 2020).

Dalam melakukan usaha ekonomi diperlukan kemampuan dalam mengelola keuangan. Hal ini penting mengingat keberhasilan usaha bukan hanya dihitung dari berapa banyak keuntungan yang dihasilkan, tetapi bagaimana ia mampu mengelola keuntungan dalam pendapatan dengan bijaksana. Mengelola keuangan dapat berupa mengatur pengeluaran di mana ia harus mengutamakan kebutuhan dibanding keinginan atau bagaimana ia kemudian menyisihkan pendapatan tersebut untuk menabung. Seluruh informan KPM mengungkapkan bahwa mereka terbiasa menyisihkan pendapatan mereka sebagai bentuk menabung dengan jumlah bervariasi. Rata-rata mulai dari Rp.500.000,- sampai dengan Rp.3.000.000,- per bulan. Namun, terdapat 1 (satu) KPM yang saat ini omset penjualannya mencapai Rp.3.000.000 - Rp.8.000.000,- per hari.

Memanfaatkan Peluang

Mengingat KPM graduasi yang menjadi informan adalah mereka yang memiliki usaha maka peneliti memperoleh kesimpulan dari pendamping dan KPM bahwa mereka yang

graduasi ternyata adalah orang-orang yang seringkali memanfaatkan peluang yang ada di sekeliling mereka untuk kepentingan usahanya. *“KPM menggunakan apa yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha. Misalnya dia punya HP ya gimana caranya bisa memasarin barang-barang jualannya dia. Misalnya di grup-grup sekolah anaknya trus lama-lama dia punya medsos (media sosial). Jadi semangatnya dia itu, bagaimana cara mengembangkan usahanya dengan menggunakan fasilitas yang ada.”* (AU, 30 April 2020). *“Mereka sejak awal berinisiatif jika dana bantuan yang mereka terima itu dapat mereka kembangkan. Jadi mereka seperti “mengambil peluang” untuk memanfaatkan dana PKH itu untuk usaha.”* (RN, 1 Mei 2020)

Temuan penelitian lainnya adalah terkait dengan kemampuan KPM dalam memanfaatkan peluang baik dalam memulai maupun mengembangkan usahanya. Peneliti menemukan bahwa KPM mengeksplorasi sumber-sumber yang memperkuat usahanya, mulai dari ide usaha dengan memperhatikan trend pasar, bahan baku yang mereka dapat, cara mengolah bahan baku menjadi produk dagang serta bagaimana mereka memasarkannya. Para KPM ini secara tidak langsung telah berpikir sistematis dalam melihat peluang sehingga dapat memulai usaha dan berupaya mengembangkannya. KPM menentukan ide usaha dikaitkan dengan potensi pasar yang ada yaitu karena rumahnya di dekat sekolah maka KPM melakukan usaha dengan berjualan. KPM juga memanfaatkan lokasi rumahnya yang dekat dengan pasar di mana mereka dapat memperoleh bahan baku dengan mudah dan lebih murah. Selain itu, KPM lain juga memanfaatkan sumber lain yang memiliki pengetahuan dan keterampilan (*skill*). KPM juga memanfaatkan teknologi seperti *google* dan *youtube* sebagai sistem sumber lain di mana mereka dapat belajar. Hal ini juga dilakukan dalam melakukan pemasaran, KPM pada umumnya memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai media pemasarannya (Whats App, dan Go Food).

Disiplin dan Komitmen

Selain beberapa hal di atas, peneliti melihat dalam pernyataan-pernyataan informan bahwa KPM yang graduasi adalah orang-orang yang memiliki kedisiplinan dan komitmen yang cukup baik. Hal ini tergambar pada saat mereka diwajibkan menghadiri kegiatan P2K2, atau kewajiban peserta PKH dalam menyekolahkan anaknya, bahkan dalam membayar utang ataupun cicilan yang mereka miliki sampai dengan lunas. Berikut beberapa pernyataan informan-informan dimaksud: *“Lebih ke semangat hidup mereka lebih teratur juga sih bu. Mereka komitmen gitu bu.. contoh sederhana aja mengikuti P2K2.”* (AU, 30 April 2020),

Disiplin dan komitmen merupakan salah satu modal yang diperlukan seseorang untuk mencapai kesuksesan. KPM yang dinyatakan graduasi sejahtera mandiri pada umumnya memiliki hal yang teratur dalam hidupnya. Ia tahu tujuan hidup dan mewujudkannya dengan memanfaatkan berbagai potensi yang ada. Hal ini tergambar pada saat KPM menyadari bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, salah satu faktor pendukungnya adalah pendidikan anak-anak mereka. Oleh karena itu, KPM berkomitmen untuk terus menyemangati dan mendukung anaknya setiap hari ke sekolah. Hal lain misalnya karena ia sadar bahwa P2K2 merupakan suatu cara bagi mereka untuk belajar maka KPM komitmen untuk hadir di kegiatan tersebut. Selain itu, disiplin dan komitmen juga ditemui pada saat mereka harus menyisihkan pendapatan mereka guna menyelesaikan hutang mereka di bank.

Rajin Mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) merupakan pertemuan bulanan yang diwajibkan bagi KPM sebagai bagian dari pemenuhan komitmen. Kegiatan ini berisi proses belajar secara terstruktur untuk memperkuat perubahan perilaku KPM. P2K2 bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan,

pemahaman mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan dan pengelolaan keuangan bagi keluarga di mana hal-hal tersebut dituang dalam modul-modul yang diajarkan pendamping pada KPM.

Hampir seluruh informan KPM dan pendamping menyatakan bahwa KPM graduasi adalah orang-orang yang rajin mengikuti P2K2. Berikut kutipan dari beberapa informan, *“Justru rata-rata yang graduasi ini bu yang rajin ikut P2K2 buuu.. yang ikut pertemuan.. makanya saya bilang mereka lebih teratur.. mereka tau bahwa itu kewajiban mereka jadi mereka dahulukan. Rata-rata sih anak mereka jang lebih teratur untuk sekolahnya. Yaah meskipun banyak juga yang rajin ikut P2K2 tapi masih gitu-gitu aja.”* (WK, 30 April 2020).

Mengikuti P2K2 merupakan salah satu persyaratan dalam kewajiban KPM di PKH. Mengingat PKH adalah bantuan sosial bersyarat maka dari sisi kebijakan, terdapat konsekuensi bagi KPM yang tidak mengikuti P2K2. Bantuan mereka akan ditangguhkan bahkan mereka dapat dikeluarkan dari kepesertaan PKH. Meskipun demikian, peneliti melihat bahwa KPM yang dinyatakan graduasi sejahtera mandiri selama ini menghadiri P2K2 dengan kesadaran penuh. Hal ini tergambar dalam aktivitas yang mereka lakukan, mereka menjadi lebih antusias mengikuti materi dengan banyak bertanya atau berkonsultasi dengan pemberi materi. Selain itu, mereka pada umumnya dapat menyebutkan dengan mudah materi-materi apa saja yang diberikan dan bagaimana manfaatnya bagi keluarga. Mereka dapat menceritakan bagaimana kemudian materi-materi P2K2 tersebut diimplementasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Kepekaan Sosial

KPM graduasi juga mengungkapkan hal-hal terkait kondisi lingkungan sosial di sekitarnya. Ia membandingkan kondisi dirinya dengan tetangga-tetangga di sekitar mereka yang kondisinya lebih miskin dan sulit, namun

tidak menerima PKH. Hal ini ternyata mampu mendorong mereka untuk mengundurkan diri dari PKH. Berikut kutipan KPM dimaksud, *“Kalau saya liat ya bu tetangga di sini ada yang suaminya tidak kerja, anaknya sekolah 3 orang. Jadi, saya merasa tidak enak Sempet bu Y (ketua kelompok) bilang tidak usah mengundurkan diri, karena masih memiliki komponen kepesertaan PKH. Akan tetapi, saya jawab tidak enak bu, tetangga saya banyak yang kurang mampu.. dia tidak menerima (PKH), sedangkan saya menerima..”* (MN, 2 Mei 2020). KPM merasa bahwa diri mereka lebih baik dibandingkan dengan orang-orang di sekitar mereka yang belum mendapat PKH. Akan tetapi, pada saat mereka akan menyampaikan keluar dari PKH, ada perasaan sungkan dari diri mereka. KPM khawatir dianggap menjadi orang yang sombong dan sudah tidak memerlukan bantuan lagi. Berikut kutipan pernyataan KPM dimaksud, *“Saya tuh sebenarnya dah lama.. dah lama bu pengen keluar..., tetapi saya bingung ngomongnya.. takutnya dianggap sombong amat.. saya ampe nanya ama sesama penerima PKH, saya mau keluar gimana caranya yaa.”* (SH, 5 Mei 2020).

Temuan lapangan lainnya yang diperoleh peneliti adalah bahwa ternyata kepekaan sosial terhadap lingkungan sekitar mempengaruhi keputusan KPM untuk mengundurkan diri dari kepesertaan PKH. Pengajuan data dari daerah melalui sistem tersendiri di luar PKH seringkali berdampak pada implementasi PKH di lapangan. Artinya, ditemukan fakta bahwa terdapat keluarga yang miskin dan layak menerima bantuan sosial, namun masih belum para menjadi peserta PKH. Hal ini berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti dapat melihat bahwa informan sudah tidak lagi hanya fokus pada diri atau keluarganya. Bahkan, mereka sudah mampu melakukan penilaian pada diri mereka sendiri dan membandingkannya dengan kondisi keluarga lain.

Penutup

Kesimpulan: Saat ini terdapat delapan faktor yang dapat mengakibatkan berhasilnya KPM untuk graduasi dari PKH, yaitu pola pikir, pengalaman pahit di masa lalu, daya juang dan semangat yang tinggi, tidak mudah putus asa, kemampuan pengelolaan uang, memanfaatkan peluang, disiplin dan komitmen, dan kepekaan sosial. Di antara delapan faktor tersebut, faktor pola pikir dan kemampuan pengelolaan keuangan menjadi faktor yang dominan dalam menentukan graduasi. Kedua faktor ini disadari adalah bagian dalam materi P2K2 yang dilaksanakan oleh pendamping kepada KPM setiap bulannya.

Rekomendasi: Perlunya penguatan peran SDM PKH dalam materi-materi P2K2 khususnya terkait dengan delapan faktor keberhasilan demi tercapainya graduasi KPM PKH. Kementerian Sosial bersama-sama dengan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial dan instansi terkait lainnya termasuk juga SDM PKH juga diharapkan dapat meningkatkan upaya pemberdayaan KPM graduasi dengan memberikan keterampilan usaha ekonomi produktif maupun bantuan stimulan bagi KPM. Selain itu, diperlukan upaya penguatan jaringan khususnya dengan sistem sumber yang dibutuhkan KPM dalam meningkatkan dan mempertahankan usaha perekonomian yang dimiliki agar sejahtera dan mandiri dan tidak kembali menjadi KPM PKH.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti percaya bahwa penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, terlebih khusus pada Kementerian Sosial karena telah diizinkan melaksanakan penelitian tentang PKH dan juga Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia, yang telah berkenan untuk memberikan bimbingan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian ini.

Pustaka Acuan

- A. Dwi Fatma & Sulistyaningrum, Eny. (2016). *Dampak Kebijakan Program Keluarga Harapan terhadap Konsumsi Rumah Tangga Indonesia Tahun 2014*. Universitas Gajah Mada, S2 Ekonomi Pembangunan. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/106762>.
- Ambar, Teguh Sulistiyani. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Barham, Tania, Karen Macours, and John Maluccio. 2013. *More Schooling and More Learning? Effects of a 3-Year Conditional Cash Transfer Program in Nicaragua after 10 Years*. IDB Working Paper Series No. 432. Washington, DC: Inter-American Development Bank.
- Edmonds, Eric, and Norbert Schady. 2012. "Poverty Alleviation and Child Labor." *American Economic Journal: Economic Policy* 4 (4): 100–124. doi:10.1257/pol.4.4.100.
- Fiszbein, Ariel, and Norbert Schady. 2009. *Conditional Cash Transfers: Reducing Present and Future Poverty*. Washington, DC: World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2597>.
- Galiani, Sebastian, and Patrick J. McEwan. 2013. "The Heterogeneous Impact of Conditional Cash Transfers." *Journal of Public Economics* 103: 85–96. doi:10.1016/j.jpubeco.2013.04.004.
- Levy, Santiago, and Norbert Schady. 2013. "Latin America's Social Policy Challenge: Education, Social Insurance, Redistribution." *Journal of Economic Perspectives* 27(2): 193–218. doi:10.1257/jep.27.2.193
- Microsave Consulting, 2019. *Hasil Survei Operasional dan Dampak Program Keluarga Harapan (PKH)*
- Midgley, James. 1995. *Social Development: The Developmental Perspektif Dalam Kesejahteraan Sosial*, SAGE Publication Inc.
- Moleong, L. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offside.
- Neuman. 2006. *Social Research Methods Qualitative And Quantitative Approach*. Boston: Pearson.
- Rawlings, L. B., & Rubio, G. M. 2005. "Evaluating the Impact of Conditional Cash Transfer Programs". *The World Bank Research Observer* 20 (1): 29-55.
- Ruiz, A., Marta, Benjamin, D., Sudhanshu, H., Marco, S., & Paul, W. 2006. "Program Conditionality and Food Security: The Impact of PROGRESA and PROCAMPO Transfers in Rural Mexico". *Revista Economía* 7 (2): 249–78.
- Stampini, M., & Leopoldo, T. 2012. "The Growth of Conditional Cash Transfers in Latin America and the Caribbean: Did They Go Too Far?." IDB Policy Brief, 185. <https://publications.iadb.org/handle/11319/1448>.

- Suharnan. 2000, *Pengembangan skala kemandirian, Persona*, Jurnal Psikologi Indonesia, September 2012, Vol. 1, No. 2, hal 66-76.
- Suharto, Edi dkk. 2004. *Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial: Studi Kasus Rumah Tangga Miskin di Indonesia*, Bandung: STKSPress.
- Suyanto, B. 2013. *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*. Malang: Intrans Publishing.
- Ulya, Alif Mufida. 2019. *KPM PKH Graduasi Mandiri Asal Bekasi Dapat Apresiasi dari Presiden*. Jakarta: Kementerian Sosial RI. <https://www.kemsos.go.id/kpm-pkh-graduasi-mandiri-asal-bekasi-dapat-apresiasi-dari-presiden>.

Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah, Indonesia

Implementation of Poverty Alleviation Programs in Central Java, Indonesia

Mursid Zuhri dan Arif Sofianto

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Jl. Pemuda No. 127-133 Semarang, Jawa Tengah

Telp. (024) 3515591. Fax. (024) 3546802

E-mail: zmursid_2010@yahoo.co.id; 01arifsofianto@gmail.com

HP.08156507871 (Mursid Z); 085227001825 (Arif S)

Naskah diterima 18 Juni 2020, direvisi 24 Agustus 2020, disetujui 2 September 2020

Abstract

Central Java is one of the centers of national economic growth, but poverty still requires special attention. The research objective was to describe the implementation of poverty alleviation programs in Central Java, as well as to formulate poverty reduction designs that were implemented according to needs. This type of research was descriptive, using a mixed method approach, namely qualitative and quantitative. Research locations were in 15 districts in Central Java with the highest poverty rates, 777 informants involved, family heads from the poor, community/institutional leaders, village officials and program assistants. Data were collected using interview techniques, observation, and focused group discussion. The qualitative data analysis used an interactive model developed by Miles and Huberman. While the quantitative data analysis used descriptive statistics in the form of mean and percentage values. The conclusion of this study was First, in the implementation of poverty alleviation programs, there were many cases of wrong targeting due to inaccurate data, program implementation appeared to be more of a gift which increased consumptive behavior than productive, there was no education for people to release themselves from poverty. Second, the expected poverty reduction design was to use the principle of empowerment, the main role was in the poor, where they also determined the programs to be run on the principle of providing education to the poor to be productive and independent.

Keywords: *poverty; prevention program; Central Java*

Abstrak

Jawa Tengah menjadi salah satu kawasan pusat pertumbuhan ekonomi nasional, namun kemiskinan masih memerlukan perhatian khusus. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan implementasi program penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah, serta merumuskan desain penanggulangan kemiskinan yang implementatif sesuai dengan kebutuhan. Tipe penelitian ini ialah deskriptif, menggunakan pendekatan mixed method, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Lokasi penelitian di 15 kabupaten di Jawa Tengah dengan angka kemiskinan tertinggi, informan yang terlibat sebanyak 777 orang, para kepala keluarga dari unsur orang miskin, tokoh masyarakat/kelembagaan, aparat desa dan pendamping program. Data dikumpulkan dengan tehnik wawancara, observasi, serta *Focussed Group Discussion*. Analisis data kualitatif menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Sedang analisis data kuantitatif memakai statistik deskriptif berupa nilai rata-rata dan persentase. Kesimpulan penelitian ini ialah Pertama, dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan, terdapat banyak kasus salah sasaran akibat data yang kurang tepat, implementasi program nampak lebih bersifat pemberian yang meningkatkan perilaku konsumtif dibanding produktif, tidak ada pendidikan kepada masyarakat untuk melepaskan diri mereka dari kemiskinan. Kedua, desain penanggulangan kemiskinan yang diharapkan yakni adalah menggunakan prinsip pemberdayaan, peran utama berada pada masyarakat miskin dimana mereka ikut menentukan program yang akan dijalankan dengan prinsip pemberian edukasi kepada masyarakat miskin agar menjadi produktif dan mandiri.

Kata Kunci: kemiskinan; program penanggulangan; Jawa Tengah

Pendahuluan

Jawa Tengah memiliki angka kemiskinan yang tinggi, jauh lebih tinggi dibanding DKI Jakarta, Bali, Banten, dan Jawa Barat. Jumlah absolut penduduk miskin Jawa Tengah berada di posisi kedua setelah Jawa Timur. Berdasarkan data BPS tahun 2018, tercatat bahwa jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah sebanyak 3.897.200 jiwa, adapun Jawa Timur sebesar 4.332.590 jiwa (BPS, 2019).

Menurut BPS (Berita Resmi Statistik, Maret 2019) sumbangan terbesar pada angka kemiskinan antara lain bantuan pangan non tunai (BPNT) semakin lancar sehingga membantu pemenuhan kebutuhan. Berdasarkan karakteristik pekerjaan penduduk miskin di Jawa Tengah, sebesar 39,93 persen tidak bekerja, dan sebesar 60,07 persen bekerja, dimana 18,51 persen bekerja di sektor pertanian, dan 41,56 persen di luar sektor pertanian (BPS Jawa Tengah, 2019).

Kemiskinan dapat dipahami berdasarkan konsep yang komprehensif. Menurut Chambers (1998), kemiskinan adalah suatu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1. Keterbatasan pemilikan aset (*proper*), 2. Ketidakberdayaan (*powerless*), 3. Kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4. Ketergantungan (*dependence*), dan 5. Keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis. Ragnar Nurkse (Kuncoro, 2004) mengemukakan teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*), yang mengatakan: "*a poor country is poor because it is poor*" (Negara miskin itu miskin karena dia miskin). Oleh karena itu, setiap usaha untuk mengurangi kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkap kemiskinan ini (Mudrajad Kuncoro, 2004). Kemiskinan juga dapat dibagi dengan empat bentuk (Suryawati, 2005), yaitu Absolut, Relatif, Kultural, Struktural.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mengeluarkan berbagai program dan kegiatan untuk menggulangi kemiskinan. Ada

empat kelompok utama program penanggulangan kemiskinan. *Pertama*, kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. *Kedua*, kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. *Ketiga*, kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. *Keempat*, kelompok program lainnya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan.

Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga adalah yang paling populer dan mendapatkan banyak perhatian. Program ini meliputi bantuan sosial di bidang kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Sangat Miskin. Program ini dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers (CCT)*, berupa pemberian dana transfer yang dipergunakan untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Menurut Nainggolan, dkk (2012) PKH telah berdampak positif dalam bidang kesehatan dan pendidikan, namun belum berdampak positif terhadap status sosial ekonomi. Hasil penelitian Mursyidah (2017) di Kabupaten Temanggung juga menunjukkan bahwa PKH belum berdampak pada perbaikan gizi bayi dan balita. Hasil penelitian Rohmi (2018) menunjukkan bahwa PKH efektif dari aspek input dan proses, dan output pendidikan, namun output untuk bidang kesehatan belum efektif.

Hasil penelitian Kharismawati & Rosdiana (2018) menunjukkan bahwa program PKH dan BPNT memiliki sumberdana dan SDM yang cukup, namun ada hambatan teknis seperti mesin EDC yang tidak berfungsi, agen yang tidak ramah dalam pelayanan, kurangnya pengetahuan penerima program, serta adanya sikap pelaksana yang tidak bertanggung jawab.

Penelitian Mustafida (2019) menunjukkan BPNT memberikan dampak dan manfaat yang baik untuk kesejahteraan masyarakat, di sisi lain

bagi sebagian KPM berdampak ketergantungan. Sesuai dengan hasil penelitian Marhaeni, dkk (2014), bahwa efektivitas program bantuan bidang pangan lebih rendah dibandingkan bantuan bidang pendidikan dan kesehatan.

Program perlindungan lainnya adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau yang dikenal dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS) berupa jaminan kesehatan, layanan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan. Pendanaan KIS bersumber dari 3 (tiga) anggaran pemerintah yaitu APBN (Kementerian Kesehatan), APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/ Kota.

Di sektor pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (usia 6 - 21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin. Bantuan ini berupa pemberian dana kepada anak sekolah dari keluarga miskin yang diberikan melalui rekening tabungan. Dana tersebut diperuntukkan memenuhi kebutuhan biaya pendidikan.

Program pemerintah pusat tersebut (BPNT, PKH, PIP, JKN) lebih mengarah pada bantuan sosial berbasis keluarga. Sesuai dengan hasil penelitian Nuraida, dkk (2019) di Kabupaten Subang bahwa program bantuan yang hanya berbasis keluarga dan tidak ada program khusus bagi kepala keluarga kurang efektif. Hal tersebut juga diperkuat hasil penelitian Apsari dkk (2019) di Kalimantan Selatan terkait Program Gerbangmas-Taskin di Desa Pandak Daun (pemberdayaan ekonomi, masyarakat dan lingkungan/Tri Daya). Program pemberian bantuan modal (simpan pinjam) yang diberikan kepada anggota keluarga ini tidak efektif terhadap pertumbuhan ekonomi karena jumlah yang minim sehingga tidak mencukupi untuk modal dan akhirnya hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Program bantuan sosial biasanya diberikan dengan syarat yang ketat terutama administrasi kependudukan, dimana tidak semua orang yang

benar-benar miskin memilikinya. Sebagian lagi justru terjadi salahsasaran akibat data yang kurang tepat. Sebagaimana hasil penelitian Suryawati (2014) di DKI Jakarta, dimana orang miskin tidak mendapatkan bantuan Kartu Jakarta Sehat (KJS) karena tidak memiliki KTP dan KK, meskipun sudah mengurus ke instansi terkait.

Di sisi lain, program penanggulangan kemiskinan juga memberi beberapa manfaat. Hasil penelitian Damanik & Marom (2016) menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan melalui program pelatihan keterampilan di Kelurahan Mangunharjo, Kota Semarang cukup efektif dimana warga miskin semakin meningkat perannya, dan mereka terentaskan dari kemiskinan. Peningkatan peran masyarakat miskin dalam penanggulangan kemiskinan sangat penting sebagai penentu keberhasilan program.

Hasil penelitian Asfi dan Wijaya (2015) tentang program Gerdu Kempling di Kota Semarang kurang efektif karena kapasitas masyarakat belum cukup mampu untuk mengambil peran yang besar dalam pembangunan. Dengan demikian, kegiatan atau bantuan yang diberikan kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bantuan terkesan sia-sia dan tidak berdampak pada penyelesaian kemiskinan.

Program saat ini juga terkait dengan dengan ketepatan sasaran penerima program penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan laporan Susenas 2018, terdapat *inclusion error* maupun *exclusion error*. Rumah tangga tidak miskin yang menerima BPNT sebesar 46,69 persen padahal mereka seharusnya tidak berhak menerima. Di sisi lain penduduk miskin yang menerima BPNT sebesar 70,61 persen dan sisanya 29,39 persen tidak menerima BPNT padahal mereka berhak menerima. Begitu juga untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagian besar yang menerima adalah penduduk kategori desil 5 ke atas. Untuk Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebagian besar adalah desil 6 ke bawah, meskipun masih ditemukan desil 10.

Provinsi Jawa Tengah menggulirkan berbagai program untuk penanggulangan kemiskinan seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat PBI, Beasiswa siswa miskin, Perbaikan rumah tidak layak huni, kartu tani dan nelayan, kredit tanpa agunan, Pendampingan desa miskin untuk setiap OPD satu desa. Namun program-program tersebut sifatnya masih dalam kerangka perlindungan sosial sedangkan program yang sifatnya meningkatkan pendapatan belum banyak dirasakan oleh orang-orang miskin.

Penelitian Ariyani, dkk (2015), tentang keberlanjutan program berdasarkan dimensi *input*, proses, dan *output* program berbasis zakat memiliki keberlanjutan lebih baik dibandingkan program CSR dan pemerintah. Hal tersebut terjadi karena adanya ketepatan pengelolaan dan sasaran, serta keberadaan kelembagaan di masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka perlu dilakukan penelitian atau kajian mengenai dampak program terhadap percepatan penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah. Apakah program memberikan dampak kepada rumah tangga miskin, sudah sesuai dan memberikan perbaikan, atau konsep seperti apa yang sesuai kondisi lapangan. Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, perlu dilakukan penelitian dalam rangka menemukan desain yang sesuai untuk menanggulangi masalah kemiskinan di Jawa Tengah di masa yang akan datang.

Sesuai dengan latar belakang tersebut di atas, masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana implementasi program penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah?; 2) Bagaimana desain penanggulangan kemiskinan yang implementatif sesuai dengan kebutuhan di Jawa Tengah?

Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini deskriptif dengan pendekatan *mixed method*, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Lokasi penelitian di 15 Kabupaten di Jawa

Tengah dengan angka kemiskinan tertinggi. Jumlah informan sebanyak 777 orang, dari unsur orang miskin 647 orang, sisanya tokoh masyarakat, aparat desa, dan pendamping program. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, pengisian kuesioner, serta FGD. Analisis data menggunakan teknik kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif menggunakan model interaktif dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Analisis kuantitatif jenis deskriptif berupa rerata, dan persentase yang diberlakukan terhadap data-data yang diambil dari kuesioner. Analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan sikap dan persepsi responden terhadap kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Hasil Dan Pembahasan

1. Hasil

a. Profil Informan

Penelitian ini melibatkan sebanyak 647 informan dari masyarakat penerima program penanggulangan kemiskinan yang tersebar di 15 Kabupaten.

Berdasarkan usia, sebagian besar merupakan penduduk usia produktif yaitu usia 31 – 50 tahun.

Tabel 1
Rentang Usia Informan

No	Rentang Usia	Jumlah	Persentase
1	20 tahun ke bawah	2	0,31
2	21 – 30 tahun	57	8,81
3	31 – 40 tahun	245	37,87
4	41 – 50 tahun	169	26,12
5	51 – 60 tahun	64	9,89
6	61 tahun ke atas	32	4,95
7	NA	78	12,06

Sumber : Data primer diolah (2019)

Berdasarkan data tabel 1 di atas, potensi kelompok produktif penduduk miskin sangat tinggi. Usia terbanyak adalah 31-40 tahun, kemudian usia 41-50 tahun, dan hanya sebagian kecil yang berusia di atas 60 tahun. Kondisi

tersebut menunjukkan adanya potensi produktif pada sebagian besar penduduk miskin.

Jenjang pendidikan yang ditamatkan terbesar adalah jenjang sekolah dasar (SD) dan SMP.

Tabel 2
Tingkat Pendidikan Informan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tidak Sekolah	69	10,66
2	SD sederajat	365	56,41
3	SMP sederajat	144	22,26
4	SMA sederajat	51	7,88
5	Diploma sederajat	3	0,46
6	NA	15	2,32

Sumber : Data primer diolah (2019)

Dari tabel 2 di atas, tingkat pendidikan terbesar adalah SD, kemudian disusul SMP, dan tidak sekolah, hanya sebagian kecil yang lulus SMA. Kondisi tersebut mencerminkan besarnya peran tingkat pendidikan terhadap kemiskinan.

Berdasarkan status pekerjaan anggota rumah tangga informan hanya 40,48 persen yang bekerja tetap.

Tabel 3
Status Pekerjaan Informan

No	Status Bekerja	Jumlah	Persentase
1	Belum bekerja	410	30,62
2	Bekerja	542	40,48
3	Tidak bekerja	236	17,62
4	Kadang-kadang	151	11,28

Sumber: Data primer diolah (2019)

Berdasarkan data tabel 3 di atas, kurang dari separuh (40,48%) yang bekerja secara tetap, sebagian kecil bekerja di waktu tertentu saja (11,28%). Sebagian merupakan kelompok non produktif (belum bekerja dan tidak bekerja). Kondisi tersebut menunjukkan perlunya perluasan akses terhadap lapangan kerja.

Pekerjaan utama kepala keluarga informan didominasi oleh buruh tani (44,98%), buruh

sektor jasa (10,36%), pedagang (8,50%), dan sektor lainnya (14,68%).

Berdasarkan pengeluaran rumah tangga per bulan, didapatkan bahwa mayoritas informan memiliki tingkat pengeluaran antara 1 – 2 juta rupiah per bulan. Data Berita Resmi Statistik Maret 2019 bahwa garis kemiskinan Jawa Tengah sebesar Rp. 369.385,- (BPS Jawa Tengah, 2019). Jika dikaitkan dengan klasifikasi status kesejahteraan masyarakat miskin berdasarkan konsep TNP2K, yaitu: 1) Sangat miskin dengan pengeluaran perkapita/bulan kurang dari 0,8 Garis Kemiskinan; 2) Miskin dengan kondisi pengeluaran sama dengan 0,8- dibawah Garis Kemiskinan; 3) Hampir miskin dengan kondisi pengeluaran sama dengan sampai kurang dari 1,2 Garis Kemiskinan; 4) Rentan Miskin dengan pengeluaran sama dengan 1,2 sampai kurang dari 1,6 Garis Kemiskinan; dan 5) Tidak Miskin dengan pengeluaran sama dengan atau di atas 1,6 Garis Kemiskinan. Dengan klasifikasi tersebut, serta penghitungan pengeluaran per kapita per bulan, maka didapatkan data pengeluaran keluarga miskin dibanding garis kemiskinan seperti pada tabel berikut.

Tabel 4
Status Pengeluaran Keluarga Dibanding Garis Kemiskinan Jawa Tengah

No	Pengeluaran per kapita	Jumlah	Persentase
1	Sangat Miskin	163	26,21
2	Miskin	87	13,99
3	Hampir Miskin	121	19,45
4	Rentan Miskin	136	21,86
5	Tidak Miskin	134	21,54
6	NA	6,00	0,96

Sumber : Data primer diolah (2019)

Data tabel 4 tersebut di atas menunjukkan sebagian orang (21,54%) memiliki pengeluaran jauh di atas rata-rata garis kemiskinan. Kondisi tersebut menunjukkan ada penerima program kemiskinan yang bukan orang miskin.

b. Program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

- **Kartu Jateng Sejahtera (KJS)**

Kartu Jateng Sejahtera merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka meringankan beban kelompok miskin tidak produktif. KJS diberikan kepada kelompok miskin tidak produktif yang belum tersentuh oleh bantuan pemerintah pusat. Program ini dijalankan oleh Dinas Sosial melalui sinergi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait.

- **Jamkesmas PBI Non Kuota**

Jamkesmas PBI non kuota bersumber dari pemerintah daerah sebagai untuk masyarakat miskin yang belum mendapatkan Program Indonesia Sehat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berinisiatif memberikan tambahan alokasi bantuan bagi keluarga miskin. Tercatat 327.000 jiwa menerima manfaat dari program ini. Program ini dijalankan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

- **Penanganan RTLH**

Program ini dilaksanakan dalam rangka memperbaiki kualitas tempat tinggal masyarakat miskin yang dijalankan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta menggandeng beberapa pihak terkait. Bentuk program berupa stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada rumah tangga miskin agar lebih layak huni.

- **Bantuan Siswa Miskin (BSM)**

BSM merupakan pendamping dari Program Indonesia Pintar dari pemerintah pusat. Program ini diberikan kepada siswa dari keluarga miskin yang belum menerima bantuan PIP atau KIP. Pada tahun 2014 siswa yang mendapatkan fasilitasi sebanyak 16.045, di tahun 2018 turun menjadi 7.479. dan pada tahun 2019 ditargetkan 10.000

siswa penerima BSM dengan anggaran sebesar 10 milyar rupiah.

- **SMK Boarding School**

SMK *Boarding School* diperuntukkan bagi keluarga miskin dengan harapan meningkatkan akses mereka terhadap lapangan kerja yang layak. Semua biaya ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Saat ini telah dibangun 3 SMK Negeri Jawa Tengah (boarding school) di Kabupaten Pati, Kabupaten Purbalingga, dan Kota Semarang. Kedepan akan dibangun asrama SMK Negeri (semi boarding school) di 15 kabupaten dengan kemiskinan tinggi.

- **Kartu Tani**

Kartu Tani merupakan program bantuan subsidi sarana produksi, terutama pupuk kepada petani. Harapan program ini adalah meringankan beban petani, sekaligus meningkatkan produktifitasnya. Program ini diberikan berupa insentif bagi petani dalam pembelian pupuk dengan harga yang berbeda. Sampai dengan bulan Desember 2018 telah disalurkan sebanyak 2.444.689 kartu kepada semua petani di Jawa Tengah.

- **Kartu Nelayan**

Kartu nelayan berfungsi sebagai media penyaluran subsidi sarana produksi nelayan, terutama Bahan Bakar Minyak (BBM). Kartu ini merupakan bagian dari Sistem Informasi Layanan BBM Bersubsidi untuk Nelayan (SIMINA). Kartu nelayan sudah didistribusikan di 16 Kabuapten/Kota di pesisir Jawa Tengah sampai akhir 2018 terdistribusi sebanyak 114.443 Kartu.

- **Menumbuhkan Start Up Wirausaha Baru**

Program ini merupakan upaya menciptakan wirausaha baru dari kelompok miskin, terutama kelompok muda yang produktif. Kegiatan utama

dari program ini ialah peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai pelatihan dan bimbingan teknis.

- **Kredit Usaha Dengan Bunga Rendah**
Program ini diperuntukkan bagi kelompok miskin produktif yang ingin meningkatkan kapasitas usahanya. Program dilaksanakan melalui kerja sama dengan Bank Jateng. Pemberian kredit usaha rakyat (KUR) melalui 2 skema, yaitu: 1) KUR Mitra 02 untuk usaha kecil tanpa agunan, maksimal pinjaman 2 juta rupiah dan bunga sebesar 2 persen, diberikan secara kelompok dengan anggota minimal 5 orang; 2) KUR Mitra 25, yaitu pinjaman khusus bagi pelaku usaha mikro dengan plafon sampai 25 juta rupiah, serta bunga 7 persen.

c. Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah

Program-program yang berasal dari Pemerintah Pusat seperti BPNT, PKH, JKN-KIS, PIP-KIP, dan RTLH, merupakan program pemenuhan kebutuhan dasar yang sifatnya jangka pendek, namun masyarakat sangat membutuhkan. Sasaran program sebenarnya jelas kepada orang yang termiskin (desil 1 sampai 4), namun penerima program tidak lagi sesuai sasaran, banyak di luar sasaran (desil 5-10) yang juga menerima program.

Sebagaimana data lapangan, dihimpun dari informan penerima program diapati hasil 21,54 persennya memiliki pengeluaran per kapita lebih dari 1,6 garis kemiskinan, atau termasuk kalangan tidak miskin. Dari total informan penerima program, hanya 26,21 persen yang sangat miskin dan 13,99 persen miskin. Hal ini menunjukkan prioritas penerima program belum sesuai ketentuan.

Penerima program PKH teridentifikasi masih banyak orang yang mampu, sebaliknya banyak orang miskin yang semestinya berhak mendapatkan bantuan tetapi tidak mendapatkan

PKH. Demikian juga keluarga yang mempunyai lansia dan difabel tidak menerima, sehingga komponen PKH yang diterima tidak komplit. Orang desa baik miskin ataupun mampu sangat mengharapkan mendapat PKH karena PKH dianggapnya gaji bulanan yang datang dari pemerintah. Program BPNT juga hampir sama, banyak orang yang mampu menerima BPNT, masih ada masyarakat penerima BPNT diminta sukarela untuk diberikan pada warga miskin yang tidak menerima.

Penerima bantuan PIP sebagian adalah kelompok tidak miskin, hal ini terjadi karena basis data yang digunakan adalah data anak sekolah. Sedangkan anak-anak di kampung/desa yang tidak sekolah karena tidak mampu tidak bisa dijangkau dengan program itu karena belum masuk data anak sekolah.

Program jaminan kesehatan (KIS) masih banyak warga yang miskin tidak bisa berobat karena tidak mendapatkan kartu, dimana banyak kartu yang jatuh kepada masyarakat yang mampu. Dalam satu keluarga miskin terjadi ada yang mempunyai KIS, tetapi ada yang tidak mempunyai KIS, sehingga bagi yang tidak mempunyai kartu menyulitkan ketika dia sakit padahal masih dalam satu keluarga miskin.

Program RTLH baik melalui Kementerian PUPR maupun Kementerian Sosial memerlukan persyaratan formal, seperti sertifikat tanah, kepemilikan rumah, dan modal, sehingga orang miskin yang tidak mempunyai persyaratan formal tidak memperoleh RTLH, walaupun rumahnya tidak layak huni. Bahkan orang yang tidak memiliki tanah dan rumah sama sekali tidak mungkin tersentuh program ini.

Program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan pendamping dari program pusat, serta sebagian program yang dikembangkan sendiri. Untuk program yang sifatnya mendampingi alokasinya ditujukan kepada masyarakat miskin yang seharusnya memperoleh tetapi belum memperoleh dalam arti memenuhi kuota program pemerintah pusat saja seperti KIS (BPJS PBI Non Kuota). Namun karena data

masyarakat miskin belum beres maka penerima program tetap saja masih bias. Program yang diluar program pemerintah pusat seperti Kartu Tani, Kartu Nelayan, KUR, *Start Up*, *Boarding School*, penerima programnya masih belum focus menysar kepada warga miskin yang masuk pada desil 1 sampai 4, masih banyak yang menysar ke desil 5 keatas.

Program pemerintah kabupaten sangat beragam, ada yang peduli dengan mengalokasikan dana, ada juga yang hanya berharap dari dana pusat dan provinsi. Ada juga yang mengalokasikan dana kemiskinan yang sumbernya dari APBD, non APBD, iuran sukarela pegawai, Basnas peruntukannya pun beragam.

Pemerintahan Desa sebagian besar tidak mengalokasikan dana desa, padahal orang miskin, lokasinya di desa, dan itu merupakan warganya. Mestinya desa sudah mulai merancang anggaran desa untuk penanggulangan kemiskinan.

Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kota dan Desa/Kelurahan perlu membangun sinergitas agar terjadi kolaborasi program dan kegiatan. Mengingat semua tingkatan pemerintahan mempunyai alokasi dana, maka perlu juga pihak swasta terlibat, sehingga masyarakat miskin betul betul tertangani dengan program yang jelas, pertanggung jawaban jelas, sasarannya juga tidak bias. Siapa yang harus menangani kebutuhan dasar jangka pendek, siapa yang harus menangani peningkatan kapasitas, orang miskin, siapa yang harus menangani peningkatan pendapatan, siapa yang harus menangani sapsras dan lain sebagainya. Sehingga program tidak tumpang tindih dan setiap saat bisa di lihat penurunan orang miskin.

d. Persepsi Terhadap Implementasi Program

Pengetahuan informan terhadap pengertian dan konsep program penanggulangan kemiskinan cukup beragam. Informan yang menyatakan bahwa mereka mengetahui pengertian dan

konsep penanggulangan kemiskinan sebesar 58 persen, dan 29 persen menyatakan tidak tahu, sementara 13 persennya tidak memberikan pendapat. Informan yang menjawab bahwa mereka mengetahui program penanggulangan kemiskinan mendeskripsikan bahwa program penanggulangan kemiskinan adalah program pemerintah untuk membantu mengurangi kemiskinan, dilakukan dengan cara memberi bantuan seperti KIP, KIS, dan PKH. Sebagian lain menyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan program untuk meringankan beban ekonomi masyarakat kurang mampu. Sebagian juga memberi pernyataan bahwa program penanggulangan kemiskinan merupakan bantuan yang diberikan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat. Sebagian lain menyatakan program penanggulangan kemiskinan membantu orang-orang yang tidak mampu, yang mempunyai anak sekolah, lansia, ibu hamil dan balita, pendapat lain yang hampir sama juga menyatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan adalah biaya ditanggung pemerintah seperti kesehatan dan sekolah. Pengertian tersebut lebih merujuk kepada konsep PKH.

Sebagian informan yang menyatakan tidak tahu tentang program penanggulangan kemiskinan disebabkan karena kurangnya sosialisasi. Mereka tidak tahu atau tidak paham tentang program penanggulangan kemiskinan karena tidak pernah mendapatkan sosialisasi atau jarang mengikuti berita-berita terkini.

Sebagian besar informan (71,72 %) menyatakan bahwa mereka mengetahui jenis-jenis program yang telah dilaksanakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, sedangkan sisanya menyatakan tidak tahu dan tidak menjawab. Informan yang menyatakan mengetahui jenis program penanggulangan kemiskinan sebagian besar menjawab berupa bantuan anak sekolah, bantuan beras, telur, bedah rumah, kesehatan, dan uang. Bentuk program yang paling banyak diketahui adalah KIP, PKH, BPNT, KIS, serta RTLH dan Jamban.

Informan yang menjawab belum menyatakan karena mereka tidak mengetahui detilnya, dan sebagian kecil menyatakan karena belum tepat sasaran.

Mayoritas informan (80%) menyatakan program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan selama ini bermanfaat bagi mereka. Sebagian kecil informan menyatakan bahwa program selama ini belum ada manfaat bagi mereka, serta sebagian lagi tidak menjawab.

Menurut sebagian besar informan, program penanggulangan kemiskinan telah meringankan biaya kehidupan sehari-hari, memenuhi kebutuhan sehari-hari, mengurangi pengeluaran, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Program penanggulangan kemiskinan juga membantu biaya pengobatan (gratis), mengurangi biaya sekolah dan menambah bahan pokok. Secara umum program penanggulangan kemiskinan telah meringankan biaya, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan pertanian. Program penanggulangan kemiskinan bermanfaat mengentaskan kemiskinan. Informan yang berpendapat bahwa program tidak bermanfaat karena mereka belum mendapatkan bantuan, sebagian lagi belum merasakan adanya perubahan.

Mayoritas informan (71%) menyatakan bahwa program yang dijalankan telah tepat sasaran. Sebagian tidak menjawab pertanyaan, dan sebagian lagi menjawab tidak tepat sasaran. Informan yang menjawab sudah tepat sasaran karena menurut mereka hanya warga miskin yang berhak menerima. Bantuan tersebut diberikan kepada keluarga yang tidak mampu atau ekonomi lemah agar bermanfaat meringankan beban masyarakat miskin. Sedangkan yang menjawab tidak tepat karena mereka melihat bahwa ada tetangga tidak mampu tapi tidak dapat bantuan, dan sebaliknya, yang sudah mampu mendapat bantuan, terutama PKH. Sebagian melihat kelompok rentan seperti janda tua yang belum mendapatkan. Sebagian sudah tepat sasaran, tetapi sebagian masih belum tepat.

Sebanyak 72 persen informan menyatakan bahwa bentuk program telah sesuai dengan kebutuhan sehari-hari mereka (konsumsi, pendidikan, kesehatan), 10 persen lainnya menyatakan tidak sesuai dengan kebutuhan sehari-hari mereka. Informan yang menjawab bahwa program telah sesuai menyatakan bahwa program sangat membantu kebutuhan hidup mereka, sudah tepat sasaran bagi yang menerima. Sementara mereka yang menjawab tidak sesuai karena program yang belum tepat sasaran, dimana banyak orang mampu mendapat bantuan, sementara sebagian yang tidak mampu belum mendapat bantuan.

Sebagian besar informan menyatakan bahwa orang miskin membutuhkan bantuan, terutama pendidikan, kesehatan, pangan, uang tunai dan berbagai bantuan lainnya. Sebagian juga menyatakan mereka membutuhkan bantuan modal, bantuan tempat tinggal, lapangan pekerjaan, pendampingan berusaha, dan subsidi.

Harapan informan terhadap pemerintah terkait dengan penanggulangan kemiskinan adalah agar program-program bantuan yang sudah berjalan tetap dilanjutkan, bahkan ditambah jumlah dan jenisnya. Sebagian informan juga menginginkan adanya evaluasi dan pendataan ulang agar bantuan tepat sasaran, pemberian bantuan modal, bantuan uang tunai, bantuan pendidikan, pelatihan dan meringankan beban dengan menggratiskan semua biaya untuk masyarakat miskin.

2. Pembahasan

a. Analisis Kondisi Lapangan

1) Konsep dan Definisi Kemiskinan

Salah satu permasalahan adalah masih belum tuntasnya pemahaman mengenai makna kemiskinan makro dan mikro. Banyak pihak menganggap bahwa penyelesaian kemiskinan mikro *by name by address* akan berpengaruh langsung terhadap survei kemiskinan makro yang dilakukan BPS. Akibatnya

terdapat miskonsepsi ketika pejabat pemerintah daerah merasa sudah berupaya optimal berdasarkan data mikro, namun angka kemiskinan masih tetap tinggi sesuai data makro.

Di lapangan juga masih terjadi kebingungan tentang indikator seseorang masuk dalam kategori miskin. Belum ada sosialisasi menyeluruh tentang siapa yang berhak masuk dalam BDT, apa indikatornya dan siapa yang menentukan otoritasnya, akibatnya banyak persepsi yang menentukan pada proses pendataan tersebut. Maka, indikator kemiskinan perlu dirubah, sehingga wilayah yang semestinya daerah mampu menjadi daerah miskin karena indikator, sebagai contoh, perilaku masyarakat desa yang masyarakatnya mampu, tetapi karena perilaku tidak mau punya MCK karena BAB lebih senang ke kolam, walau pendapatannya tinggi mereka tetap menjadi orang miskin, padahal secara absolut mereka tidak miskin karena punya rumah bagus, punya mobil dan motor, punya perhiasan yang banyak.

Selain itu kerancuan mengenai data dan program, seolah-olah jika sudah masuk data harus mendapat bantuan, kenyataannya setiap program memiliki sasaran tersendiri yang memang harus bersumber dari data BDT namun tidak semua yang masuk dalam data dijamin BDT mendapat program. Karena BDT berisi 40 persen penduduk berpenghasilan terendah.

Lebih lanjut, fakta menunjukkan bahwa penurunan penduduk miskin yang tercermin dari laporan BPS dinilai tidak jadi jaminan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan. Meski penduduk miskin turun, kualitas hidup dan ketergantungan terhadap berbagai bantuan-bantuan dari pemerintah dianggap masih terlalu tinggi sehingga

masyarakat belum mandiri atau lepas dari kemiskinan absolut.

2) Dukungan Kebijakan

Sebagian daerah penelitian telah memiliki regulasi khusus tentang penanggulangan kemiskinan, antara lain Purbalingga, Banyumas, Kabumen, Purworejo, Grobogan, Demak, Sragen.

Selain regulasi, di beberapa kabupaten juga mempunyai terobosan strategi penanggulangan kemiskinan secara spesifik, seperti Gebertaskin di Grobogan, UPTPK Sragen, Kartu Banyumas pintar dan Banyumas Sehat, Pronanhkis di Purbalingga. Ada juga daerah yang melakukan kerjasama dengan pihak non pemerintah seperti Kabupaten Pemalang dengan LSM KOMPAK, sebagian lagi memanfaatkan lembaga BAZNAS seperti di Blora dan Kebumen. Kabupaten Brebes membentuk satuan kerja tersendiri fokus penanggulangan kemiskinan yaitu Bagian Penanggulangan Kemiskinan pada Sekretariat Daerah.

Untuk persoalan anggaran, pada umumnya setiap Kabupaten mengalokasikan anggaran pendamping untuk program pusat, terutama JKN KIS untuk kesehatan, RTLH, dan Beasiswa. Pemerintah daerah juga mempunyai program dampingan untuk pendidikan berupa kartu pintar.

Di Jawa Tengah belum ada kebijakan baik dari pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk mengalokasikan dana pendamping PKH. Tidak ada bantuan dari pemerintah daerah untuk masyarakat miskin yang tidak tercover PKH. Pemerintah provinsi dan kabupaten juga belum menyediakan personel tenaga pendamping program PKH yang sesuai kebutuhan masyarakat di tingkat desa. Pendamping PKH yang disediakan

pemerintah pusat hanya sampai di tingkat kecamatan dengan jumlah terbatas, sehingga beban pekerjaan cukup berat, serta kurang memahami kondisi lapangan di setiap desa.

3) Database Kemiskinan

Di lapangan ditemukan bahwa salahsatu sumber masalah utama penanggulangan kemiskinan adalah banyak data salah sehingga sasaran program menjadi kurang tepat bahkan menimbulkan konflik di masyarakat. Oleh sebab itu pemutakhiran data perlu mendapat perhatian serius agar sasaran program lebih baik. Data BDT (Basis Data Terpadu) Penanggulangan Kemiskinan sampai saat ini masih bermasalah pada *updating* data, akibatnya terjadi *inclusion error* dan *exclusion error* yang terus menerus.

Salah satu upaya penyelesaian *updating* data yang bermasalah adalah melalui pemutakhiran data BDT berbasis masyarakat di tingkat desa atau melalui musdes, namun terbentur pada permasalahan politik kepala desa atau perangkat desa misalnya karena pendukungnya, kerabat, atau orang dekat. Kendala lain masalah *updating* data di desa adalah tidak tersedianya dana untuk melakukan update data. Beberapa daerah sudah melakukan upaya pemutakhiran data dari tingkat desa/kelurahan melalui Musdes setahun 2 kali. Di beberapa daerah juga diberlakukan kebijakan data orang miskin harus ditempel di balai desa dan bisa dicek oleh masyarakat.

Kendala pada proses pemutakhiran di tingkat lanjutan belum adanya tindaklanjut yang sama di tingkat pusat. Ketika dilakukan verifikasi dan validasi data di tingkat desa kemudian diusulkan ke tingkat Kabupaten dan diteruskan ke

Kemensos, data yang ditetapkan masih data yang lama, sehingga tidak terdapat perubahan sesuai usulan dari tingkat desa. Untuk menyikapi hak tersebut, maka otoritas verifikasi dan validasi data sebaiknya diserahkan kepada daerah, kabupaten maupun provinsi, adapun indikator masih tetap menjadi kewenangan pusat.

Masalah pendataan saat ini terkendala oleh anggaran pemerintah daerah yang terbatas. Dengan adanya partisipasi masyarakat, maka pemutakhiran data sebetulnya bisa lebih efisien. Sebetulnya tersedia potensi dana desa untuk mengatasi masalah tersebut.

4) Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Peran masyarakat dan pemerintah desa adalah melakukan monitoring untuk memastikan program tepat sasaran. Monitoring dilakukan untuk memastikan penggunaan bantuan sesuai dengan peruntukan. Masyarakat bisa memanfaatkan kelembagaan yang ada, atau dibentuk lembaga baru. Dengan adanya partisipasi maka diharapkan data, usulan penerima program, dan jenis bantuan bisa sesuai dengan kondisi di lapangan.

Pada tingkat masyarakat penerima program, kesadaran kelompok masyarakat yang sudah tergolong mampu untuk mengundurkan diri masih rendah. Masih sedikit masyarakat yang mendapatkan bantuan namun merasa mampu dan memiliki keinginan mengundurkan diri. Mereka yang sudah mampu masih tetap menikmati bantuan, sebaliknya mereka yang merasa berhak dan belum mendapatkan bantuan memiliki perasaan iri, hal ini menyebabkan konflik horizontal di masyarakat. Selain itu juga terdapat

konflik kepentingan ketika kepala desa tidak mau mencoret nama-nama dalam data BDT untuk kepentingan pendukungnya. Fakta menunjukkan banyak kesalahan atau ketidaksesuaian sasaran penerima dari akibat kepentingan sosial dan politik ini.

Berdasarkan kondisi di atas, perlu strategi agar warga miskin yang sudah merasa mampu dengan kesadaran sendiri keluar dari penerima bantuan program kemiskinan agar kuota bisa dimanfaatkan masyarakat yang lebih miskin. Salah satu cara sederhana yaitu dengan pemasangan (stiker) tanda keluarga miskin, dan memberikan penghargaan berupa piagam dari kepala daerah. Selain itu, sebagai upaya memberikan penghargaan kepada pelaksana di lapangan dalam hal ini pengelola program penanggulangan kemiskinan (Kepala Desa, Pendamping, dan petugas lainnya) perlu diadakan award untuk mendapatkan reward. Untuk Pendamping atau PPL pemberian reward berbasis kinerja.

Program pengembangan ekonomi untuk penanggulangan kemiskinan seperti KUR, KUBE, BAZNAS dan Bantuan atau Kredit lainnya perlu pendampingan yang bersifat kreativitas inovatif untuk tercapainya program, bantuan modal agar dapat berhasil meningkatkan pendapatan, dengan melibatkan perusahaan swasta yang beroperasi di wilayah sekitar.

5) Tata Kelola Program

Penentuan data masyarakat miskin (BDT/DTKS) sebagai dasar penerima program penanggulangan kemiskinan dari pusat sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat/Kemensos. Meskipun verifikasi telah dilakukan dari tingkat desa, namun ketika sampai pusat berlaku

ketentuan kuota, dimana kelebihan data (usulan orang miskin) langsung dipotong begitu saja berdasarkan urutan, sehingga data yang baru cenderung tidak tertampung. Sistem kuota program yang menjadi kebijakan Kemensos yang didasarkan pada anggaran yang tersedia ini tidak sesuai dengan jumlah usulan setiap daerah sehingga tidak bisa menjangkau pada jumlah orang miskin yang perlu dibantu.

Sistem program *top down* menimbulkan konflik antarmasyarakat, dan antar masyarakat dan perangkat desa. Masyarakat menganggap desa atau ketua kelompok PKH tidak memasukkan nama mereka, namun kades juga tidak memiliki otoritas untuk menentukan penerima bantuan. Selain itu juga terdapat konflik kepentingan ketika kepala desa tidak mau mencoret nama-nama dalam data BDT untuk kepentingan pendukungnya. Fakta menunjukkan banyak kesalahan atau ketidaksesuaian sasaran penerima.

Pada saat implementasi program di lapangan juga masih terlihat adanya ego sektoral cukup menonjol. Sedangkan di sisi lain aksi penanggulangan kemiskinan memerlukan kolaborasi semua program OPD, karena kemiskinan bersifat multidimensi. Untuk operasionalisasi, kelembagaan penanggulangan kemiskinan juga belum sampai ke *grassroot*, sehingga koordinasi program tidak sampai ke bawah. Hal ini menjadi salah satu penyebab belum tepatnya sasaran kegiatan penanggulangan kemiskinan sampai tingkat bawah.

Sasaran program masih kurang tepat, karena banyak penerima program yang tidak memenuhi syarat sebagai orang miskin. Hal ini dikarenakan data yang kurang valid, dan konsep *top down* dimana penerima langsung

ditentukan dari atas. Oleh sebab itu perlu mekanisme yang lebih moderat dan memahami kondisi di lapangan.

Dalam konteks pelaksanaan program terdapat beberapa hal yang di satu sisi memerlukan persyaratan dan penyesuaian, sehingga tidak semua orang bisa mengaksesnya. Sebagai contoh bantuan seperti RTLH dan jambanisasi terdapat persyaratan untuk modal / iuran biaya tambahan sehingga banyak kalangan termiskin tidak mampu untuk mengakses program tersebut.

Implementasi program di beberapa daerah juga dimodifikasi oleh masyarakat. Sebagai contoh di Cilacap terdapat kebijakan lokal di salah satu desa bantuan tidak disampaikan seluruhnya, namun diambil/dipotong sebagian dan diberikan kepada yang tidak mendapatkan bantuan. Ada kesadaran dari masyarakat bahwa sebagian mereka sebenarnya tidak pantas, sementara sebagian lagi yang lebih pantas belum mendapatkan bantuan.

6) Dampak Program

Penerima program yang bersifat bantuan seperti BPNT, PKH, KIS, KIP sebagian besar merasakan manfaat berupa terbantunya beban kebutuhan hidup mereka. Ketika dilihat lebih mendalam, penerima bantuan tersebut tidak sedikit yang sebenarnya tergolong keluarga produktif, berpotensi untuk mampu. Sebagian besar menyatakan ingin tetap mendapatkan bantuan sampai pemerintah menghentikannya, dan ditemukan bahwa bantuan yang diterima masyarakat relatif tidak berkelanjutan dan lebih bersifat konsumtif, bukan ke arah produktif. Oleh karena bantuan yang disampaikan sifatnya sesaat, belum ada bantuan yang berorientasi pada produktifitas kelompok masyarakat

miskin agar mereka menjadi lebih produktif.

Ada kecenderungan umum bantuan penanggulangan kemiskinan tidak dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya. Misalnya bantuan sekolah digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Dengan demikian orientasi program yang berharap bisa meringankan beban, dan jatuh ke tangan orang yang tidak miskin justru akan meningkatkan konsumtif mereka.

b. Desain Penanggulangan Kemiskinan yang Dibutuhkan

Perbaikan terhadap konsep penanggulangan kemiskinan atau desain baru penanggulangan kemiskinan dapat dilihat dari tiga aspek. Pertama adalah kebijakan berisi tentang konsep dan sinergi, kedua adalah kelembagaan, dan ketiga adalah desain program (prinsip dan bentuk teknis kegiatannya).

Kebijakan penanggulangan kemiskinan sebenarnya sudah menjadi gerakan bersama, namun masih memiliki keterbatasan kolaborasi. Mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, bahkan desa memiliki komitmen penurunan angka kemiskinan, akan tetapi belum ada komitmen kolaborasi. Perlunya komunikasi dan sinergi antar stakeholder, kerjasama, dan saling melengkapi dari semua unsur, baik pemerintah maupun non pemerintah. Seluruh OPD dan stakeholder lainnya seperti pengusaha swasta, harus diarahkan. sehingga menjadi optimal, tidak boleh ada ego sektoral yaitu dengan "sistem keroyokan". Komitmen kebijakan ini tidak saja diwujudkan dalam regulasi berupa aturan, tetapi juga adanya alokasi sumberdaya yang memadai. Sinergi juga bukan berarti semua harus sama dan terpusat, akan tetapi justru kebijakan tersebut harus mampu melihat realitas lapangan yang berbeda-beda.

Pembenahan kelembagaan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan revitalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Daerah (TKPKD) dengan kewenangan yang lebih kuat dan melakukan kolaborasi antarpihak. TKPKD hanya sampai tingkat kabupaten, serta hanya melibatkan unsur pemerintah daerah saja dengan fungsi koordinatif yang kurang optimal. Maka, usulan perubahan kelembagaan adalah transformasi TKPK dari administratif, menjadi kolaboratif. TKPK memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi bentuk kegiatan dan sasaran bagi OPD dan lembaga terkait agar penanggulangan kemiskinan. Dari aspek struktur kelembagaan TKPK seharusnya sampai tingkat desa untuk mengkoordinir di tingkat bawah.

Usulan perbaikan desain program penanggulangan kemiskinan sesuai analisis data lapangan, diwujudkan dalam konsep terpadu yang memiliki 5 area utama. Area utama program penanggulangan kemiskinan yang harus disentuh, yaitu: 1) penguatan organisasi masyarakat miskin; 2) pemberdayaan masyarakat; 3) perlindungan sosial; 4) peningkatan kapasitas masyarakat miskin; dan 5) perluasan kesempatan kerja. Prinsip tersebut bersifat keberlanjutan, bukan pemenuhan kebutuhan sesaat sebagaimana yang dominan saat ini.

Penguatan organisasi masyarakat miskin diperlukan untuk membuka akses mereka kepada program yang diperlukan. Saat ini akses masyarakat miskin ke organisasi masih rendah, oleh sebab itu perlu adanya upaya penguatan akses dan pelibatan masyarakat miskin di dalam setiap pengambilan kebijakan. Masyarakat miskin harus dipastikan memiliki akses yang terbuka terhadap lembaga pemberdayaan masyarakat. Organisasi penanggulangan kemiskinan rata-rata sampai tingkat kabupaten, maka perlu diturunkan sampai tingkat desa agar menyentuh sasaran. Selain itu perlu dioptimalkan dan disinergikan lembaga swasta agar lebih berperan dalam penanggulangan kemiskinan.

Pemberdayaan masyarakat miskin seyogyanya diarahkan yang bersifat produktif,

melalui pelatihan, fasilitasi usaha, akses peralatan, modal, dan pasar. Masyarakat miskin masih sebagai objek program yang bersifat *top down*, oleh sebab itu perannya perlu ditingkatkan melalui pelibatan dalam setiap pengambilan keputusan. Penetapan calon penerima program oleh OPD seyogyanya melibatkan peran kelompok masyarakat, sehingga tepat sasaran pada masyarakat miskin. Selain itu perlu peningkatan sosialisasi berbagai ketentuan, jenis dan bentuk program kepada calon penerima program.

Perlindungan sosial selama ini sudah banyak mendapatkan perhatian, hanya saja sasarannya kurang optimal. Perlu ada evaluasi terhadap data dan kriteria orang miskin sehingga sasarannya lebih tepat. Perlu dipastikan bahwa yang mendapatkan perlindungan sosial adalah mereka yang benar-benar memerlukan. Selain itu, jangka waktu perlindungan perlu dibatasi agar bisa mendorong masyarakat miskin berubah menjadi mandiri, serta sumberdaya bisa dialihkan untuk sasaran lainnya. Lebih penting lagi, jenis bantuan sosial hendaknya disesuaikan dengan potensi masalah dan kebutuhan kelompok masyarakat.

Fokus penanggulangan kemiskinan adalah peningkatan kapasitas dan daya saing orang miskin melalui perbaikan kesehatan, pendidikan, dan keterampilan sehingga bisa menjadi kelompok masyarakat produktif. Catatan dalam RPJMD Jateng pendidikan akan menjadi perhatian, termasuk juga sekolah swasta, sehingga bisa menjamin semua anak bisa sekolah tidak terbentur biaya. Pelatihan terhadap masyarakat miskin perlu disesuaikan dengan kompetensi calon penerima, serta potensi dan peluang kerjanya. Balai latihan kerja juga agar didekatkan dengan lokasi calon penerima manfaat.

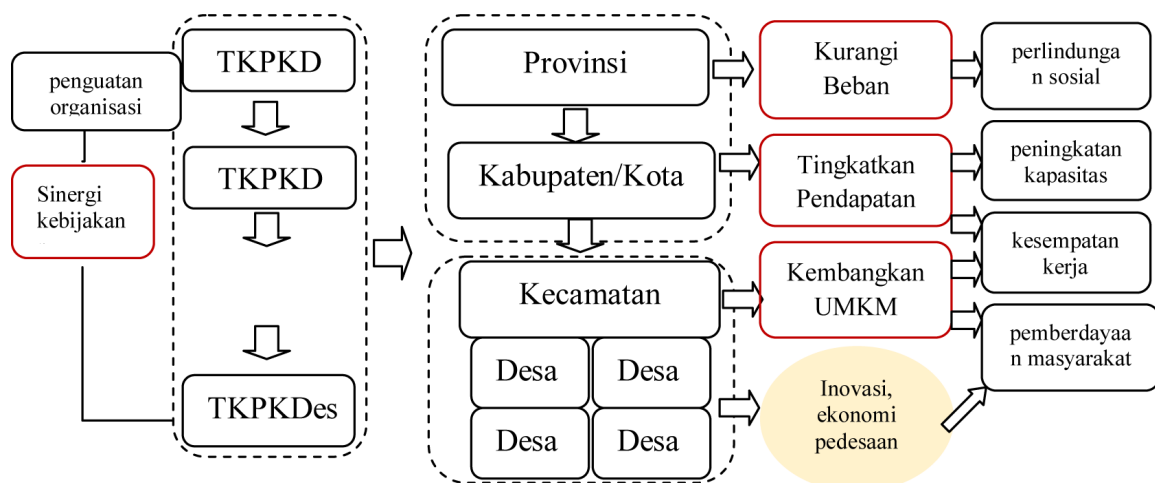
Perluasan kesempatan kerja disamping pada lapangan kerja yang bersifat padat karya, juga yang berkelanjutan. Pemerintah daerah selain fokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, juga harus memperhatikan

pemerataan. Ketimpangan pembangunan menyebabkan ketimpangan pendapatan. Banyaknya kemiskinan di pedesaan dimana pembangunan terpinggirkan menunjukkan hal tersebut.

Peluang lapangan kerja untuk orang miskin sebaiknya diperluas ke berbagai sektor, terutama ekonomi kreatif agar memberikan kesempatan lapangan kerja baru. Hal ini sesuai dengan kecenderungan masyarakat miskin dimana sebagian besar memiliki keterbatasan akses terhadap sektor pekerjaan formal. Banyak industri yang mensyaratkan tingkat pendidikan tertentu, sertifikat keterampilan, dan persyaratan lainnya yang sulit dipenuhi orang miskin. Oleh sebab itu sektor informal dan industri kreatif

perlu didorong sebagai salahsatu alternatif utama menciptakan lapangan kerja.

Desain penanggulangan kemiskinan yang dibutuhkan sesuai penjelasan di atas adalah memiliki dimensi keberlanjutan, menjadikan masyarakat sebagai subjek dimana mereka ikut menentukan program yang akan dijalankan, prinsip pemberdayaan dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan program penanggulangan kemiskinan, sekaligus mengedukasi masyarakat miskin, berubah mental menjadi produktif. Pemetaan kemiskinan berdasarkan kelompok usia produktif, usia non produktif, disabilitas, kondisi kesehatan fisik, dan keterampilan.



Gambar 1

Desain Program Penanggulangan Kemiskinan Jawa Tengah

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap data dan fenomena di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Implementasi program penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah masih ditemui kendala salah sasaran dan kurang efektif. Salah sasaran karena data kurang akurat. Program kurang efektif karena bersifat pemberian dibanding kegiatan produktif, dan

kurang pendidikan untuk lepas dari kemiskinan. Program menimbulkan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan.

Desain program yang implementatif berprinsip pemberdayaan dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan. Masyarakat ditempatkan sebagai subjek yang ikut menentukan program dan kegiatan. Substansi program sekaligus mengedukasi masyarakat miskin untuk berubah mental dan budaya (kultur) menjadi produktif.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

Mengatasi salah sasaran program perlu perbaikan pendataan, yaitu peninjauan kembali terhadap kriteria kemiskinan, verifikasi dan validasi melibatkan masyarakat. Verifikasi dan validasi data melibatkan unsur terkait (polri, kejaksaan) dalam penertiban data agar menjadi *shock therapy* bagi pemberi data palsu.

Substansi program sebaiknya diarahkan kepada kegiatan produktif, ditambahkan pendidikan atau edukasi tentang pengentasan kemiskinan.

Pemerintah daerah melibatkan masyarakat dalam penyusunan desain program penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebutuhan. Desain program memperhatikan kebutuhan, kemampuan dan potensi lokal masyarakat. Bentuk program juga mampu memilah sasaran, apakah kelompok produktif atau nonproduktif. Untuk kelompok produktif lebih bersifat meningkatkan kapasitas dan kesempatan kerja. Salahsatu alternatif adalah potensi perekonomian desa melalui konsep pengembangan wilayah pedesaan seperti pengembangan pariwisata, UMKM pengolahan, industri kreatif.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memungkinkan terlaksananya penelitian dan penyusunan naskah laporan ini.

Pustaka Acuan

- Apsari, Lindiya, Endriatmo Soetarto, & Lukman M. Baga (2019). Evaluasi Program Pemberdayaan Partisipatif Gerbangmas-Taskin (Studi di Desa Pandak Daun, Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Penyuluhan*, Maret 2019 Vol. 15 No. 1. H 1-16
- Asfi, Nuskhiya dan Holi Bina Wijaya (2015). Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Pada Program Gerdu Kempling Di Kelurahan Kemijen Kota Semarang. *Jurnal Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota*, Volume 4 Nomor 2 2015. H 253 – 268. Online : <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/pwk>. Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik UNDIP
- Ariyani, Nafiah, Akhmad Fauzi, Bambang Juanda, & Irfan Syauqi Beik (2015). Evaluasi Pogram Pengentasan Kemiskinan Menggunakan Metode Rappoverty. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 6, No. 2, Desember 2015. Hal. 181 - 197
- BPS. 2019. Pofil Kemiskinan di Indoensia, Maret 2019. <https://www.bps.go.id/website/images/Profil-Kemiskinan-Maret-2019-ind.jpg>, diakses3 Desember 2019
- BPS Jawa Tengah. 2019. Berita Resmi Statistik Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Maret 2019 No. 47/07/33/Th.XIII 15 Juli 2019. <https://jateng.bps.go.id/pressrelease/>. Diakses 3 Desember 2019
- _____. 2019. Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah 2019. <https://jateng.bps.go.id/publication/>, diakses 3 Desember 2019
- Chambers, Robert (1998). *Pembangunan Desa: Mulai dari Belakang*. Jakarta: LP3ES (Terjemahan)
- Damanik, Yenchilia Tresna, & Aufarul Marom (2016). Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pelatihan Keterampilan Di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang, *Journal Of Public Policy And Management Review*. Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
- Hidayat (2017). Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Barat (Studi Kasus Kebijakan Pembangunan Desa). *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA)*, No.2 Tahun XI Juni 2017. H. 66-72
- Kharismawati, Ika Surya, & Weni Rosdiana (2018). Implementasi Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Melalui E-Warung di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. *Jurnal Publika*. Vol 6, No 8 (2018, <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/>. UNESA
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Mahaeni, AAIN, I Ketut Sudibia, IGAP Wirathi, Surya Dewi Rustariyuni, & Ni Putu Martini Dewi (2018). Evaluasi Program-Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Bali, *PIRAMIDA Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Volume X No. 1 Juli 2014. H 8-18
- Mursyidah, Lailul (2017). Efektivitas Program Bantuan Tunai Bersyarat Mengatasi Kemiskinan dan Kelaparan, *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 5 (2), September 2017, 245-260
- Mustafida, Nunung Ifanatul (2019). *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kajarharjo Kecamatan Kalibaru Kabupaten*

- Banyuwangi. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember. [https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/96399/Nunung%20Ifanatul%20Mustafida-150910301011.pdf?sequence=1&is Allowed=y](https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/96399/Nunung%20Ifanatul%20Mustafida-150910301011.pdf?sequence=1&isAllowed=y). Diakses 2 Maret 2020
- Nainggolan, Togiaratua, Sutaat, Anwar Sitepu, Teti Ati Padmini, Muchtar, Irmayani, & Bonar Hutapea (2012). *Program Keluarga Harapan Di Indonesia: Dampak Pada Rumah Tangga Sangat Miskin di Tujuh Provinsi*. Jakarta: P3KS Press.
- Nuraida, Budiman Rusli, Sintaningrum, & Mudiayati Rahmatunnisa (2019). Evaluasi Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Subang. *MIMBAR: Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*. Volume 8 No. 1. Juni 2019. Hal 38 - 47
- Rohmi, Misfi Laili (2018). *Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bantuan dan Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat (Studi Kasus di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung)*. Skripsi. Program Pascasarjana Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Bandar Lampung. <http://digilib.unila.ac.id/31010/3/TEISIS%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>. Diakses 2 Maret 2020
- Suryawati, Indah (2014). Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Joko Widodo Dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Opini Pemegang Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar di DKI Jakarta). *Jurnal Ilmiah Komunikasi MAKNA*, Vol. 4 No. 2, Agustus 2013-Januari 2014

Ucapan Terimakasih

Dalam Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial (JPKS) Volume 19 Nomor 3 Desember 2020, review dan proses cetak artikel melibatkan empat mitra bestari, dewan redaktur mengucapkan terimakasih kepada mitra bestari yang namanya tersebut di bawah ini:

1. Prof. Dr. Ir. Husein Avicenna Akil, M.Sc. (Science, Technology and Innovation Policy, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
2. Prof. Dr. Phil Janianton Damanik, M.Si. (Pembangunan Sosial, Universitas Gadjah Mada)
3. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono (Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia)
4. Prof. Dr. Bagong Suyanto (Sosiologi, Universitas Airlangga)
5. Prof. Dr. Achmad Nurmandi (Kebijakan Publik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
6. Drs. Latiful Khuluq, MA, BSW, Ph.D. (Kesejahteraan Sosial, UIN Sunan Kalijaga)
7. Dr. Harmona Daulay, S.Sos, M.Si. (Sosiologi, Universitas Sumatera Utara)
8. Dwi Harsono, S.Sos., MPA, MA, Ph.D. (Evaluasi Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta)

Semoga kerjasama dengan mitra bestari tersebut dapat mengontrol kualitas sajian tulisan di JPKS, lebih membawa manfaat bagi pembaca, masyarakat yang memiliki kepedulian dalam permasalahan sosial pada umumnya dan masalah kesejahteraan sosial pada khususnya.

Dewan Redaktur JPKS